PRABOWO SUBIANTO

PARADOKS INDONESIA

DAN SOLUSINYA







Dan Saudara-saudara mengetahui bahwa Kemerdekaan daripada bangsa Indonesia itu sekadar hanyalah, saya katakan berulang-ulang, satu jembatan untuk menuju dan akhirnya mencapai cita-cita bangsa Indonesia yang pokok, yaitu:

Suatu masyarakat yang adil dan makmur.

Suatu masyarakat yang tiap-tiap warga negara dapat hidup sejahtera di dalamnya.

Suatu masyarakat tanpa penindasan, tanpa *exploitation*.

Suatu masyarakat yang memberi kebahagiaan kepada seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke

Suatu masyarakat yang berulang-ulang menjadi inspirasi penegak semangat daripada segenap pejuang-pejuang bangsa Indonesia yang telah memberikan pengorbanannya.

AMANAT PRESIDEN SOEKARNO
PADA SIDANG PERTAMA DEWAN PERANTJANG NASIONAL

28 Agustus 1959

PRABOWO SUBIANTO

PARADOKS INDONESIA

DAN SOLUSINYA

Versi Digital

Agustus 2023

Saudara-saudara sekalian,

Indonesia merdeka untuk jadi negara yang kuat dan terhormat. Menjadi negara yang disegani karena rakyatnya hidup sejahtera, dan berkontribusi positif pada kehidupan bangsa-bangsa. Menjadi Macan Asia.

Saat ini, kurang dari 25 tahun menuju 100 tahun kemerdekaan Indonesia, kita belum mencapai, bahkan masih jauh dari taraf kesejahteraan dan gambar-gambar pembangunan yang sesuai dengan cita-cita para Pendiri Bangsa.

Ketimpangan ekonomi masih mengkhawatirkan. Masih terlalu banyak warga negara Indonesia yang hidup dalam kemiskinan dan terancam jatuh miskin, bahkan sebelum kita harus menghadapi pandemi COVID 19.

Saya percaya, dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang kita miliki seharusnya negara kita tidak hidup dalam ketimpangan dan kemiskinan. Kuncinya adalah pemahaman dan kemampuan segenap lapisan pimpinan negara dalam mengelola sumber daya yang kita miliki agar

berjalan sesuai dengan pemahaman ekonomi para pendiri bangsa. Inilah tantangan sejarah bagi generasi kita.

Dengan buku ini, saya mengajak saudara untuk turut memahami kondisi negara kita, memahami dua tantangan terbesar kita dalam bernegara, dan turut ambil peran dalam perjuangan mewujudkan negara yang rakyatnya hidup sejahtera.

Jakarta, April 2022

Prabowo Subianto

Paradoks Indonesia dan Solusinya

Penulis	:	Prabowo Subianto
Pertimbangan	:	Burhanuddin Abdullah
Editor	:	Dirgayuza Setiawan
Fotografer	:	Angga R. Prabowo & Bachren Lukskardinul
Desain	:	Ainz Design
Penerbit	:	PT. Media Pandu Bangsa
Redaksi	:	PT. Media Pandu Bangsa Jalan Kemang V No. 11A Jakarta Selatan contact@mediapandubangsa.com

Cetakan pertama versi digital, Agustus 2023

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang mengubah sebagian atau seluruh isi buku dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Kecuali dikatakan lain, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS yang digunakan dalam buku ini adalah Rp. 14.000 per USUSD 1. Sebagian besar hitungan dibulatkan ke titik desimal terdekat, atau dibulatkan ke penyebutan genap terdekat.

Apabila Anda menemukan kesalahan cetak dan atau kekeliruan informasi pada buku ini, harap menghubungi e-mail contact@mediapandubangsa.com.

Daftar Isi

Membangun Kesadaran Nasional 11

Kesadaran Adalah Modal Utama Perjuangan 12

Setelah 75 Tahun Lebih Merdeka,
Kita Belum Sejahtera 27

Fondasi Pembangunan # 1:
Ekonomi Untuk Rakyat Indonesia 53

Menghentikan Kekayaan Kita Mengalir ke Luar 54

Hanya 1% Orang Indonesia
Menikmati Kemerdekaan 91

Fondasi Pembangunan # 2:
Demokrasi Oleh dan Untuk Rakyat Indonesia 105

Demokrasi Kita Bisa Dikuasai Pemodal 106

Partai, Survei, Pemilih, dan Media
Kadang Bisa Dibeli dan Dikuasai 121

Solusi Paradoks Indonesia:

Menuju 100 Tahun Indonesia Merdeka 129

Ini Potensi Negara Kita 132

Mewujudkan Ekonomi Konstitusi 139

Mewujudkan Demokrasi Rakyat 184

Menunaikan Janji Kemerdekaan 192



Tujuan Nasional

1. Melindungi Segenap Bangsa Indonesia dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia
2. Memajukan Kesejahteraan Umum
3. Mencerdaskan Kehidupan Bangsa
4. Melaksanakan Ketertiban Dunia yang Berdasarkan Kemerdekaan, Perdamaian Abadi dan Keadilan Sosial



Vegetius Renatus

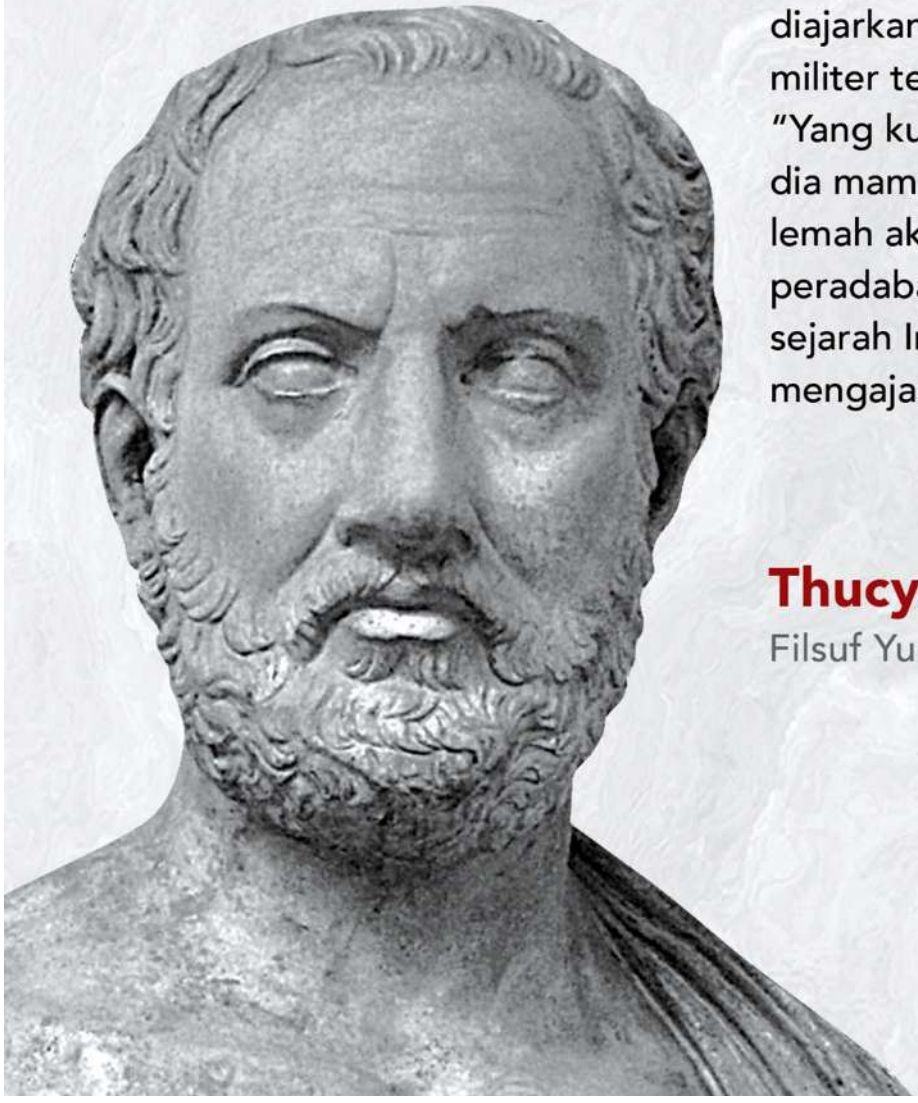
“Si Vis Pacem Para Bellum”

“Jika kau menghendaki perdamaian bersiaplah untuk perang”

Publius Flavius Vegetius Renatus

Filsuf Militer Yunani

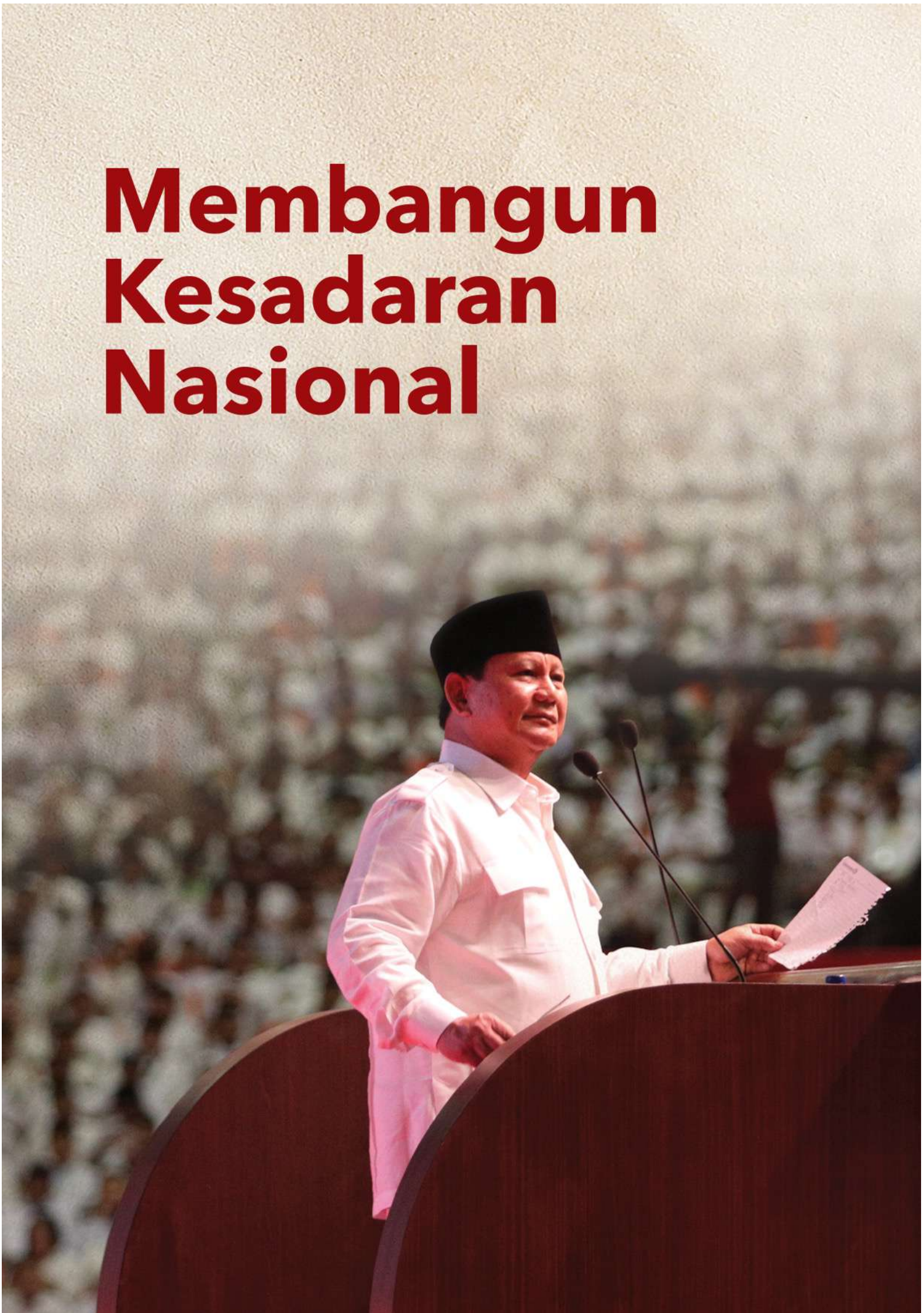
The strong do what they can and the weak suffer what they must.



Ajaran filsuf Yunani Thucydides ini diajarkan di semua sekolah strategi militer ternama di seluruh dunia. "Yang kuat akan berbuat apa yang dia mampu berbuat, dan yang lemah akan menderita." Sejarah peradaban manusia, termasuk sejarah Indonesia sendiri telah mengajarkan hal ini kepada kita.

Thucydides
Filsuf Yunani

Membangun Kesadaran Nasional



Kesadaran Adalah Modal Utama Perjuangan

Kita harus sadarkan sebanyak-banyaknya warga negara Indonesia, bahwa jika dikelola dengan tepat, kita punya modal sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cukup untuk jadi bangsa yang kuat dan terhormat. Bangsa yang rakyatnya hidup sejahtera.

Memilih Untuk Jadi Pejuang Politik

Keputusan saya untuk masuk ke dunia politik berangkat dari sebuah kesadaran. Sebuah kesadaran yang saya dapatkan dari mempelajari sejarah bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain. Dari diskusi saya dengan ratusan pakar ekonomi, pelaku usaha, dan negarawan dari Indonesia dan mancanegara. Juga dari pengalaman saya puluhan tahun mengabdi sebagai prajurit dan sebagai pengusaha.

Kesadaran yang saya maksud, pertama, adalah kesadaran bahwa sistem ekonomi dan politik yang dipilih oleh para Pendiri Bangsa kita, yaitu sistem ekonomi dan demokrasi

Pancasila, atau sistem ekonomi konstitusi, sebenarnya adalah pilihan yang terbaik untuk membangun Indonesia dan mencapai cita-cita kemerdekaan kita.

Kedua, bahwa sistem ekonomi yang sekarang dijalankan oleh negara kita tidak sesuai dari apa yang digariskan dalam UUD 1945 yang asli. UUD 1945 versi 18 Agustus 1945.

Ketiga, bahwa tidak mungkin saya bisa berhasil mengembalikan haluan ekonomi negara tanpa perjuangan politik. Oleh karena itu, pada tahun 2008 saya mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya. Partai GERINDRA.

Pada tahun 2012, saya mendapatkan mandat dari Partai GERINDRA untuk maju jadi Calon Presiden Republik Indonesia di Pemilu 2014. Walaupun tidak dinyatakan sebagai pemenang, saya dan saudara Hatta Rajasa mendapatkan dukungan dari setidaknya 62 juta rakyat Indonesia yang ikut memilih.

Pada tahun 2018, saya kembali mendapatkan mandat dari Partai GERINDRA untuk maju jadi Calon Presiden Republik Indonesia di Pemilu 2019. Walaupun tidak dinyatakan

sebagai pemenang, saya dan saudara Sandiaga Uno mendapatkan dukungan dari setidaknya 68 juta rakyat Indonesia yang ikut memilih.

Partai GERINDRA, walaupun baru berdiri tahun 2008, juga mendapatkan suara terbanyak kedua di Pemilu Legislatif 2019.

Karena itu saya menulis buku ini. Saya ingin ada lebih banyak warga negara Indonesia yang mengetahui, di mana Indonesia sebagai negara dan sebagai bangsa saat ini berada – dan bagaimana sepatutnya Haluan Negara kedepannya.

Saya percaya, dukungan yang pernah saya dan Partai GERINDRA terima dalam Pemilihan Umum yang saya ikuti adalah karena visi, misi dan program kerja yang saya tawarkan kepada segenap bangsa Indonesia. Karena gagasan yang saya sampaikan. Sebagai seorang pejuang politik, adalah sebuah kehormatan bagi saya untuk memperjuangkan Indonesia yang adil dan makmur. Indonesia yang seperti dicita-citakan oleh Para Pendiri Bangsa kita. Cita-cita yang mendorong Para Pendiri Bangsa untuk berjuang mewujudkan kemerdekaan Indonesia.

Deklarasi kemerdekaan Indonesia pada Agustus 1945 adalah jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Namun, seperti saudara dapat lihat dan rasakan sendiri, setelah 75 tahun lebih merdeka, keadilan dan kemakmuran untuk seluruh rakyat Indonesia belum tercapai. Malah, kita sekarang ada di persimpangan jalan. Jika kita salah melangkah, bukan tidak mungkin kita terperosok jadi negara gagal.

Saya mengatakan demikian karena saya selalu memperhatikan angka-angka yang berkaitan dengan kondisi ekonomi dan politik kita. Saat ini, anggaran negara kita jauh dari ideal. Pendapatan negara kita relatif terhadap kegiatan ekonomi atau rasio pajak kita sangat rendah, di bawah 10%.

Selain anggaran yang terlalu sedikit untuk menjalankan semua yang perlu kita lakukan, secara ekonomi kita sudah sulit berdiri di atas kaki kita sendiri. Jalannya aparatur negara kita sudah demikian tergantung pada utang. Bahkan, untuk membayar bunga utang, negara kita harus membuat utang baru[1].

[1] UU APBN 2012 s/d UU APBN 2021

Saat ini beban pembayaran utang di APBN sudah mengurangi kemampuan negara untuk membiayai program-program kesejahteraan rakyat. Padahal, pembangunan manusia haruslah menjadi prioritas utama bagi sebuah negara.

Negara harus menjamin setiap warga negara bisa memiliki pendidikan yang baik, bisa hidup di lingkungan yang baik, bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, juga bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Selain itu, negara juga harus hadir untuk memastikan tersedianya kesempatan bagi setiap warga untuk berwirausaha, baik secara kolektif atau berkoperasi ataupun secara sendiri-sendiri.

Adalah benar, kita perlu mengejar kemajuan infrastruktur negara lain. Kita juga perlu mengejar keberhasilan negara lain dalam menyejahterakan rakyat, dan dalam memperbaiki ketimpangan pendapatan. Kita harus bisa seperti Tiongkok yang menyelesaikan masalah kemiskinan akut sehingga tercapai *milestone* angka 0% kemiskinan di 100 tahun Partai Komunis Tiongkok, pada tahun 2021 ini.

Kalau negara harus menentukan prioritas pembangunan, mewujudkan kesejahteraan rakyat dan memperbaiki ketimpangan haruslah menjadi program kerja utama, yang diikuti dengan mengejar kemajuan infrastruktur.

Sebaik apapun niatnya, sebuah perjuangan politik tidak akan berhasil jika tidak dilakukan secara kolektif. Perjuangan kolektif yang dilakukan secara bersama dengan orang-orang yang sama-sama sadar dan memiliki tujuan yang sama jauh lebih baik dari berjuang sendiri-sendiri.
Karena itu saya memutuskan untuk bergabung di Kabinet Indonesia Maju bersama mantan pesaing saya di Pemilu 2019, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'aruf Amin. Setelah kami berproses sekian lama, Presiden Jokowi kini memiliki kesamaan pandangan dengan saya, dan atas dasar kesamaan itu kita sama-sama bertekad untuk berjuang secara kolektif mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa.

Apakah kita saat ini berada di jalan yang benar? Menurut saya kita sekarang sudah mengarah ke jalan yang benar, namun perjalanan kita masih panjang. Perjuangan ini juga tidak akan selesai hanya di masa pemerintahan ini, dan juga di masa pemerintahan berikutnya.

Karena perjuangan yang harus kita tempuh masih panjang, saya berusaha untuk menyadarkan sebanyak-banyaknya warga negara Indonesia akan tantangan bangsa dan negara kita. Itulah sebabnya diperlukan pendidikan politik. Hanya dengan pendidikan politik dapat terwujud suatu kesadaran bersama. Dengan kesadaran bersama, kita dapat turut serta dalam perjuangan besar dan perjuangan panjang mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia: Rakyat yang adil dan makmur.

Saudara-saudara sekalian. Perjuangan kita untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bukanlah suatu perjuangan yang mudah. Dalam perjalanan, kita harus melawan neo-kolonialisme, melawan sistim kapitalisme global dan para bonekanya.

Kita harus melawan mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu lemah, Indonesia yang selalu tergantung barang dan jasa yang mereka hasilkan. Kita harus melawan mereka-mereka yang melemahkan pertanian kita, dan juga industri pengolahan dan industri dasar kita.

Pentingnya Pendidikan Politik

Kalau kita pelajari sejarah bangsa-bangsa, kita dapat mengambil kesimpulan, bahwa tidak ada perubahan besar yang terjadi tanpa perjuangan politik. Sebuah perjuangan politik tidak akan bisa besar, berkelanjutan dan berhasil tanpa pendidikan politik yang dilakukan secara terus menerus.

Karena itulah, dalam perjalanan perjuangan politik saya, saya memutuskan untuk membangun Padepokan Garudayaksa di Hambalang. Padepokan ini adalah sebuah kawah Candradimuka yang terbuka untuk semua warga negara Indonesia kader Partai GERINDRA yang terpanggil untuk berjuang mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Sejak tahun 2011 sampai dengan akhir tahun 2021, sudah puluhan ribu kader bangsa yang mengikuti pelatihan bersama saya di Padepokan Garudayaksa.

Namun untuk membangun kesadaran bangsa, menjalankan pelatihan di Hambalang untuk kader Partai GERINDRA saja tidak cukup. Karena itu, melalui buku ini saya menuliskan pemahaman-pemahaman dan gagasan-gagasan saya, serta membagikan data-data yang ada soal negara kita.

Besar harapan saya buku ini dapat membangun kesadaran bersama untuk memperkuat perjuangan besar kita membangun Indonesia yang kuat, terhormat, adil dan makmur. Selamat membaca.

Ekonomi Bekerja Seperti Tubuh Manusia



Nutrisi

Intervensi Medis

Tubuh Manusia

Perekonomian

Pendapatan

Intervensi Kebijakan

ENERGI KELUAR

PENGELUARAN

Ranking Negara:

Aktivitas Ekonomi (Produk Domestik Bruto)

Peringkat	Negara	PDB
1	Amerika Serikat	USD 20,9 triliun
2	Tiongkok	USD 14,7 triliun
3	Jepang	USD 4,9 triliun
4	Jerman	USD 3,8 triliun
5	Inggris Raya	USD 2,7 triliun
6	Perancis	USD 2,6 triliun
7	India	USD 2,6 triliun
8	Italia	USD 1,9 triliun
9	Kanada	USD 1,6 triliun
10	Korea Selatan	USD 1,6 triliun
11	Russia	USD 1,5 triliun
12	Brazil	USD 1,4 triliun
13	Australia	USD 1,3 triliun
14	Spanyol	USD 1,3 triliun
15	Meksiko	USD 1 triliun
16	Indonesia	USD 1 triliun

Sumber: Bank Dunia, World Development Indicators 2020 (Current US$)

Perbandingan Negara:

Kenaikan Produk Domestik Bruto



TIONGKOK

Naik

46,3x

Angka PDB 1985: $ 309,4 miliar
PDB 2019: $ 14.342 miliar



SINGAPURA

Naik

19,5x

Angka PDB 1985: $ 19,1 miliar
PDB 2019: $ 372 miliar



INDONESIA

Naik

13,1x

Angka PDB 1985: $ 85,2 miliar
PDB 2019: $ 1.119 miliar



* Angka Produk Domestik Bruto (PDB) nonimal dari Bank Dunia, 2020. Perbandingan 1985 & 2019 dihitung editor

Ranking Negara:

Berdasarkan Kompleksitas Ekonomi

Dihitung berdasarkan keragaman dan nilai produk yang diekspor oleh sebuah negara ke negara lain. Angka ini mencerminkan ilmu pengetahuan kolektif yang dimiliki negara untuk menjadi negara yang berdaya saing secara ekonomi, dan kemampuan badan usaha di negara tersebut untuk menyediakan lapangan kerja berkualitas untuk warganya.

Peringkat	Negara	Indeks Kompleksitas Ekonomi
1	Jepang	2,49
2	Swiss	2,13
3	Jerman	2,07
4	Korea Selatan	2,05
5	Singapura	2,00
6	Ceko	1,80
7	Austria	1,77
8	Swedia	1,75
9	Slovenia	1,64
10	Hungaria	1,63
11	Amerika Serikat	1,57
12	Inggris Raya	1,55
13	Finlandia	1,48
14	Slovakia	1,45
15	Italia	1,37
16	Tiongkok	1,35
61	Indonesia	0,02
133	Nigeria	-1,77

Sumber: Harvard University, Atlas of Economic Complexity 2021, Angka 2019

Ranking Negara:

Kekayaan Sumber Daya Alam

Dihitung dengan menjumlahkan seluruh keuntungan (harga pasar dikurangi biaya ekstraksi) sumber daya alam yang dimiliki sebuah negara, termasuk minyak, gas, batu bara, kayu, mineral jarang, perikanan dan pertanian jika keseluruhan diambil pada waktu yang sama.

Peringkat	Negara	Kekayaan SDA
1	Tiongkok	USD 9,6 triliun
2	Amerika Serikat	USD 5,6 trilun
3	Saudi Arabia	USD 5 triliun
4	Russia	USD 4,7 triliun
5	India	USD 3,9 triliun
6	Brazil	USD 3,1 triliun
7	Iran	USD 2,5 triliun
8	Iraq	USD 2 triliun
9	Australia	USD 2 triliun
10	Uni Emirat Arab	USD 1,6 triliun
11	Indonesia	USD 1,5 triliun
12	Kuwait	USD 1,4 triliun
13	Kanada	USD 1,4 triliun
14	Meksiko	USD 0,9 triliun
15	Qatar	USD 0,8 triliun
16	Nigeria	USD 0,8 triliun

Sumber: Bank Dunia, Wealth of Nations Report 2021, Natural Capital (Constant 2018 US$)

Ranking Negara:

Kekayaan Sumber Daya Manusia

Dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan saat ini dan nilai masa depan (*net present value*) potensi pendapatan seumur hidup di masa depan setiap warga suatu negara.

Peringkat	Negara	Kekayaan SDA
1	Amerika Serikat	USD 203 triliun
2	Tiongkok	USD 178 triliun
3	Jepang	USD 38 triliun
4	Jerman	USD 32 triliun
5	Perancis	USD 23 triliun
6	Inggris Raya	USD 22 triliun
7	India	USD 21 triliun
8	Kanada	USD 20 triliun
9	Brazil	USD 15 triliun
10	Australia	USD 12 triliun
11	Italia	USD 12 triliun
12	Korea Selatan	USD 11 triliun
13	Spanyol	USD 9 triliun
14	Russia	USD 9 triliun
15	Belanda	USD 7 triliun
16	Indonesia	USD 7 triliun

Sumber: Bank Dunia, Wealth of Nations Report 2021, Human Capital (Constant 2018 US$)



Setelah 75 Tahun Lebih Merdeka, Kita Belum Sejahtera

Indonesia kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia, tetapi sebagian besar rakyat Indonesia saat ini masih hidup dalam kemiskinan. Kondisi ini saya sebut sebagai *Paradoks Indonesia*.

Ekonomi Kita Tidak Sehat

Kalau kita mau tahu apakah pencapaian ekonomi kita selama 30 tahun terakhir sudah baik atau belum, kita harus bandingkan dengan pencapaian ekonomi negara lain. Misalkan, kita bisa bandingkan pencapaian kita dengan Tiongkok, dan negara tetangga kita Singapura.

Perbedaan besar aktivitas ekonomi atau pendapatan domestik bruto (PDB) Tiongkok, pada periode 30 tahun sejak 1985 sampai 2019, adalah 46 kali lipat. Pada tahun 1985, PDB Tiongkok adalah USD 309 miliar – angka ini naik ke USD 14,3 triliun di tahun 2019. Sebagai perbandingkan, dalam periode yang sama, besar ekonomi Singapura

tumbuh 19,5 kali lipat. Besar aktivitas ekonomi Indonesia hanya tumbuh 13 kali lipat.

Bagaimanakah caranya, ekonomi Tiongkok yang pada tahun 1985 hanya 3,6 kali lebih besar dari ekonomi Indonesia, tumbuh begitu pesat sehingga 30 tahun kemudian ekonomi Tiongkok bisa 12,8 kali lebih besar dari ekonomi Indonesia?

Menurut kajian banyak ahli ekonomi, pertumbuhan ekonomi Tiongkok bisa begitu cepat karena Tiongkok secara sungguh-sungguh mengimplementasikan prinsip-prinsip *state capitalism*, atau kapitalisme negara. Artinya, seluruh cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan seluruh sumber daya alam dikuasai oleh negara.

Di Tiongkok, pengelolaan cabang-cabang produksi penting dan sumber daya alam dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tiongkok menjadikan BUMN sebagai ujung tombak pembangunan ekonomi negaranya. Saat ini ada lebih dari 150.000 BUMN di Tiongkok, yang dmiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tiongkok.

82 BUMN Tiongkok ada di daftar Fortune Global 500 perusahaan terbesar dunia – dari total 143 perusahaan Tiongkok di daftar Fortune Global 500. Sebagai contoh, pada tahun 1984 Tiongkok mendirikan Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). Sekarang ICBC adalah bank terbesar di dunia dan mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Tiongkok.

Sementara itu, kita, walaupun bunyi dari Pasal 33 UUD 1945 hampir sama dengan prinsip kapitalisme negara ala Tiongkok, dalam mengelola cabang-cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak dan sumber daya alam di Indonenesia, kita malah banyak menyerahkan pengelolaan ekonomi kita ke mekanisme pasar. Dengan kata lain, kita tidak secara sungguh-sungguh menjalankan Pasal 33 UUD 1945, sementara Tiongkok menjalankannya.

Inilah sebabnya saya mengatakan, haluan ekonomi kita saat ini belum tepat. Pengelolaan ekonomi Indonesia belum sesuai dengan amanat sistim ekonomi negara di Pasal 33. Malah, saat ini kita terperangkap dalam sistim ekonomi

oligarki – baik di tingkat nasional dan juga di tingkat daerah.

Dalam sistim oligarki, perekonomian negara dikuasai oleh segelintir orang-orang super kaya. Mereka sering juga disebut sebagai 'para oligark'. Dengan uang, mereka memiliki kekuasaaan yang berlebih. Kekuasaan mereka banyak menentukan kehidupan ekonomi dan politik dari bangsa kita.

Mereka bisa pesan kebijakan dan menentukan siapa-siapa saja yang boleh impor gula, daging, beras, jagung dan komoditas lainnya. Mereka juga bisa menentukan siapa-siapa saja yang jadi pemimpin karena mereka punya kemampuan untuk jadi penyandang dana utama dalam kampanye politik. Ekonomi diatur oleh beberapa orang super kaya, bukan oleh negara.

Hal ini mungkin karena 1% orang terkaya Indonesia menguasai 36% kekayaan Indonesia. 10% orang terkaya Indonesia menguasai 66% kekayaan Indonesia. Menurut riset Credit Suisse, total kekayaan orang Indonesia ditaksir USD 3,2 triliun – sekitar Rp. 44.800 triliun.

Artinya 1% populasi terkaya Indonesia sekitar 2,7 juta orang saja menguasai USD 1,2 triliun[2] - sekitar Rp. 16.800 triliun. Ini kekuatan uang yang besar.

Keputusan Politik Menentukan Rakyat Indonesia Kaya atau Miskin

Negara kita kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kita sebenarnya bisa menjadi negara kelas atas. Seluruh rakyat Indonesia bisa hidup sejahtera, bebas dari kemiskinan, kelaparan dan kebodohan. Sesungguhnya, inilah tujuan kita merdeka. Inilah tujuan kita bernegara. Untuk menjadi negara sejahtera.

Namun untuk mencapai tujuan itu, kita perlu mengelola kekayaan negara kita dengan baik.

Pengelolaan kekayaan negara adalah keputusan politik, baik itu di tingkat daerah atau di tingkat nasional. Keputusan-keputusan politik yang keliru akan membuat rakyat kita semakin miskin. Sebaliknya, keputusan-keputusan politik yang tepat akan membuat rakyat kita semakin sejahtera.

[2] Credit Suisse Global Wealth Databook, 2021 – Tabel 4.5 dan Tabel 4.6

Karena inilah saya berpolitik. Kalau saya anggap negara kita sudah tidak ada potensi lagi, sudah tidak ada harapan untuk menjadi sejahtera, mungkin saya tidak berpolitik.

Sejak pensiun dari Tentara Nasional Indonesia, saya semacam geregetan. Saya melihat Indonesia begitu kaya, Indonesia begitu banyak potensi. Indonesia hanya perlu punya dan melaksanakan dengan konsekuen strategi yang benar, manajemen yang baik, dan pemerintahan yang bersih. Dengan tiga hal ini negara kita bisa cepat bangkit dan mencapai cita-cita kemerdekaan.

Ranking Negara:

Berdasarkan Rasio PNBP

Dihitung berdasarkan total penerimaan negara selain pajak (PNBP) dibandingkan dengan total penerimaan sebuah negara.

Pada umumnya penerimaan ini didapatkan dari royalti atas ekstraksi sumber daya alam, tarif pelayanan Pemerintah, atau dari hasil investasi negara tersebut melalui lembaga dana abadi (*sovereign wealth fund*).

Peringkat	Negara	PNBP terhadap Penerimaan Negara
1	Kuwait	96%
2	Iraq	96%
3	Bahrain	80%
4	Kiribati	79%
5	Afghanistan	78%
6	Uni Emirat Arab	77%
7	Saudi Arabia	76%
8	Nauru	74%
9	Kepulauan Marshall	73%
10	Timor Leste	69%
11	Republik Kongo	67%
12	Azerbaijan	59%
13	Kepulauan Mikronesia	58%
14	Vanuatu	57%
15	Somalia	54%
16	Kepulauan Palau	54%
61	Indonesia	21%
154	Slovenia	2%

Sumber: Bank Dunia 2021, Angka 2019



Ranking Negara:

Berdasarkan Rasio Pajak

Dihitung berdasarkan total pendapatan pajak negara dibandingkan dengan total aktivitas ekonomi (produk domestik bruto) yang terjadi di negara tersebut.

Pada masa Pemerintahan Suharto, rasio pajak Indonesia pernah mencapai 16%. Jika rasio pajak tetap 16% dan ekonomi Indonesia sekarang Rp. 15.000 triliun, maka pendapatan pajak seharusnya Rp. 2.400 triliun, naik Rp. 1.000 triliun dari pendapatan sekarang.

Peringkat	Negara	Rasio Pajak terhadap PDB
1	Denmark	34,3%
2	Seychelles	34,1%
3	Lesotho	32,9%
4	Nauru	30,5%
5	Namibia	30,3%
6	Macau	29,7%
7	Selandia Baru	28,2%
8	Barbados	27,5%
9	Jamaika	27,5%
10	Swedia	27,3%
11	Mozambik	27,1%
12	Afrika Selatan	26,7%
13	Luxemburg	26,2%
14	Yunani	26,2%
15	Belize	26,0%
16	Austria	25,6%
138	Indonesia	9,8%
...	Qatar	0%

Sumber: Bank Dunia 2021, Angka 2019



Ranking Negara:

Berdasarkan Besaran Dana Abadi

Negara-negara yang memiliki surplus atau kelebihan anggaran dapat menempatkan lebihnya dalam sebuah dana abadi untuk dikelola dan menjadi cadangan anggaran negara tersebut jika dibutuhkan.

Indonesia baru memiliki lembaga dana abadi di tahun 2021 dengan nama Indonesia Investment Authority (INA).

Peringkat	Negara	Total Dana Abadi	Jumlah Pengelola Dana Abadi
1	Tiongkok	USD 3 triliun	6
2	Norwegia	USD 1,4 triliun	2
3	Uni Emirat Arab: Abu Dhabi	USD 1,3 triliun	4
4	Singapura	USD 1 triliun	2
5	Kuwait	USD 700 milyar	2
6	Saudi Arabia	USD 520 milyar	2
7	Australia	USD 380 milyar	5
8	Qatar	USD 370 milyar	1
9	Uni Emirat Arab: Dubai	USD 350 milyar	3
10	Amerika Serikat	USD 260 milyar	23
11	Korea Selatan	USD 200 milyar	1
12	Russia	USD 190 milyar	2
13	Kazakhstan	USD 140 milyar	4
14	Malaysia	USD 110 milyar	3
15	Perancis	USD 50 milyar	1
16	Oman	USD 30 milyar	1
...	Indonesia	USD 1 milyar	1

Sumber: Global SWF Data Platform, 2021



Ranking Negara:

Berdasarkan Besaran Utang

Negara pada umumnya berutang dengan cara mencetak surat utang atau secara bilateral/ multilateral untuk dapat segera membiayai melakukan investasi yang diperlukan untuk mempercepat kemajuan negara. Investasi tersebut bisa dalam bentuk infrastruktur (fisik) atau sumber daya manusia (non-fisik). Selain itu, negara juga dapat berutang untuk membiayai perang.

Peringkat	Negara	Besar Utang	Besar Pendapatan Negara dari Pajak per Tahun
1	Amerika Serikat	USD 28 triliun	USD 5,2 triliun
2	Jepang	USD 12 triliun	USD 1,6 triliun
3	Tiongkok	USD 8 triliun	USD 3 triliun
4	Perancis	USD 3 triliun	USD 1,2 triliun
5	Italia	USD 2,9 triliun	USD 850 milyar
6	Inggris Raya	USD 2,8 triliun	USD 930 milyar
7	Jerman	USD 2,6 triliun	USD 1,5 triliun
8	India	USD 2,3 triliun	USD 580 milyar
9	Kanada	USD 1,9 triliun	USD 580 milyar
10	Spanyol	USD 1,5 triliun	USD 480 milyar
11	Brazil	USD 1,4 triliun	USD 730 milyar
12	Korea Selatan	USD 700 milyar	USD 450 milyar
13	Meksiko	USD 650 milyar	USD 450 milyar
14	Australia	USD 650 milyar	USD 420 milyar
15	Belgia	USD 590 milyar	USD 230 milyar
16	Singapura	USD 530 milyar	USD 50 milyar
17	Belanda	USD 490 milyar	USD 350 milyar
18	Argentina	USD 400 milyar	USD 120 milyar
19	Yunani	USD 390 milyar	USD 80 milyar
20	Indonesia	USD 390 milyar	USD 90 milyar

Sumber: OECD Stat 2021, angka 2020; Kemenkeu masing-masing untuk negara non-OECD



Situasi Utang Negara



Total utang luar negeri Pemerintah di Agustus 2021 sebesar USD 207 milyar atau setara dengan Rp. 2.800 triliun lebih.

Jumlah utang luar negeri Pemerintah sekitar 40% dari total utang Pemerintah.

* Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) Bank Indonesia, Oktober 2021

Utang Luar Negeri Lebih Dari

USD 200 milyar

Sekitar Rp. 2.800 triliun

Total Utang Lebih Dari

Rp. 6.700 triliun

(41% dari PDB)





Sejak tahun 2012, Negara harus membuat utang baru untuk membayar bunga utang yang sudah jatuh tempo karena keseimbangan primer kita defisit.

Keseimbangan primer adalah selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang.

Keseimbangan Primer (Rp Triliun)

Tahun	Surplus/Defisit
2010	41,5
2011	8,9
2012	-52,8
2013	-98,6
2014	-93,3
2015	-142,5
2016	-125,6
2017	-124,4
2018	-11,5
2019	-73,1
2020	-642,2

Sumber : Kementerian Keuangan, 2020

Sekarang Waktunya Sadarkan Kader Bangsa

Bagi saya paradox yang dialami negara kita saat ini adalah masalah kepemimpinan, masalah kearifan, masalah kehendak untuk mengambil keputusan-keputusan politik yang tepat.

Saya sangat optimistis, jika elit Indonesia yang mendapatkan kepercayaan untuk memimpin melalui proses demokrasi punya jiwa kepemimpinan, kearifan, dan kehendak, maka tidak butuh waktu yang lama untuk menjadikan Paradoks Indonesia bagian sejarah bangsa kita.

Kita tidak boleh diam dan menerima dicap sebagai bangsa pengalah. Kita harus jadi bangsa pemenang. Kita tidak boleh hanya puas dikenal sebagai bangsa pembeli. Kita harus jadi bangsa pembuat. Bukan takdir bangsa Indonesia jadi bangsa yang lemah, tetapi bangsa yang kuat, bangsa yang terhormat.

Namun, dalam perjuangan memperkuat ekonomi negara dan rakyat Indonesia, kita harus hati-hati. Kita harus bijak, dan harus arif. Saya, dan saudara semua yang seperjuangan dengan saya, tidak boleh umbar janji ke rakyat dengan rumus-rumus yang terlalu sederhana.

Saya punya sikap dasar. Setiap masalah harus saya kaji dengan lengkap, saya teliti dengan baik, dan saya nilai dari segi kepentingan nasional bangsa Indonesia.

Lalu, saya punya prinsip, saya tidak mau mencari kesalahan orang lain.
Penting saya utarakan sekarang, sebelum saudara mulai membaca apa-apa saja yang menjadi pokok buku ini. Biarkanlah yang lalu, berlalu.

Buku ini utamanya adalah tentang masa depan kita. Masa depan bangsa Indonesia. Buku ini bukan tentang masa lalu. Tugas kita bukanlah untuk menyalahkan mereka yang sudah purnatugas.

Inilah yang saudara akan temukan di buku ini. Biarlah yang sudah lalu menjadi pelajaran untuk kita menentukan gagasan haluan negara kita ke depan. Banyak negara-negara lain yang sekarang menjadi negara maju juga pernah melakukan kesalahan-kesalahan di masa lalu.

Yang membedakan negara maju dengan negara yang tidak maju adalah kemampuan untuk mengakui kesalahan, dan belajar dari kesalahan.

Hal ini juga bisa kita lihat dalam sejarah Tiongkok. Mereka pernah punya kebijakan ekonomi yang keliru, kebijakan *Great Leap Forward* atau Lompatan Besar ke Depan oleh Mao Zedong yang justru menghasilkan kelaparan dan menyengsarakan banyak rakyatnya.

Kita bisa belajar dari kisah Den Xiaoping. Dia merupakan seorang pemimpin revolusi dalam Partai Komunis Tiongkok yang menjadi pemimpin tertinggi Republik Rakyat Tiongkok sejak tahun 1970-an sampai dengan awal tahun 1990-an.

Den Xiaoping merevisi kebijakan-kebijakan ekonomi Mao Zedong dan memimpin kebangkitan Tiongkok. Strateginya membuat Tiongkok menjadi *super power* dunia. Yang saya kagum dari beliau adalah semangat pantang menyerahnya. Terlepas dengan ideologi yang berbeda dari Indonesia, tetapi harus diakui bahwa pribadi Deng Xiaoping harus kita hargai. Dirinya berkali-kali difitnah dan dipenjara, namun

tetap bersemangat memajukan negaranya dan tidak menyalahkan pendahulunya.

Pertumbuhan Ekonomi Harus Dua Digit

Saudara, kalau saudara hanya bisa mengambil satu hal dari buku ini, berikut adalah hal tersebut.

Kita sebagai bangsa harus segera capai pertumbuhan ekonomi dua digit, atau pertumbuhan di atas angka 10% secara berkelanjutan.

Kenapa? Karena hanya dengan pertumbuhan dua digit selama 10 tahun berturut-turut, yang diawali dengan pertumbuhan rata-rata 7% selama 5 tahun, Indonesia bisa keluar dari suatu kondisi yang dinamakan *middle income trap*.

Middle income trap, atau perangkap negara menengah adalah kondisi dimana suatu negara menengah akan terus menjadi negara menengah. Ini dilihat dari angka produk domestik bruto dibagi dengan jumlah populasi, atau PDB

per kapita. Saat ini angka PDB per kapita kita adalah USD 3.869[3].

PDB per kapita di angka USD 3.869 artinya pendapatan per bulan hanya USD 322, sekitar Rp. 4,5 juta.

Untuk 'naik kelas' jadi negara berpenghasilan atas, PDB per kapita kita harus mencapai angka USD 13.000. Artinya, pendapatan per bulan rata-rata rakyat Indonesia harus naik ke USD 1.083 per bulan, sekitar Rp. 14 juta.

Jika pertumbuhan ekonomi kita hanya di kisaran 4% atau 5%, sulit bagi kita untuk berhasil naik kelas. Ibarat badan, jika pertumbuhan kita tidak di atas angka 10% artinya kita tidak berhasil tumbuh menjadi orang dewasa yang kuat dan dapat bersaing dengan negara-negara maju.

Ini adalah persoalan pokok yang harus kita sadari sebagai bangsa. Kita tidak boleh puas dengan pertumbuhan ekonomi 5% karena sama saja kita berjalan di tempat. Tidak bisa kita berbangga jika negara kita tidak keluar dari perangkap negara menengah, dari *middle income trap*.

[3] Bank Dunia, 2021 (Data 2020)

Negara lain yang sudah maju boleh saja tumbuh di bawah 5%. Indonesia tidak bisa. Kita masih punya pekerjaan besar: Kita harus segera lepas landas mengejar kemajuan. Kita tidak boleh berpuas diri berjalan di tempat.

Sebagai perbandingan PDB per kapita Malaysia sudah USD 10.401 – rakyat Malaysia rata-rata punya pendapatan USD 866 per bulan, sekitar Rp. 12 juta per bulan.

PDB per kapita Singapura sudah USD 59.797 – rakyat Singapura rata-rata punya pendapatan USD 4.983 per bulan, sekitar Rp. 69 juta per bulan.

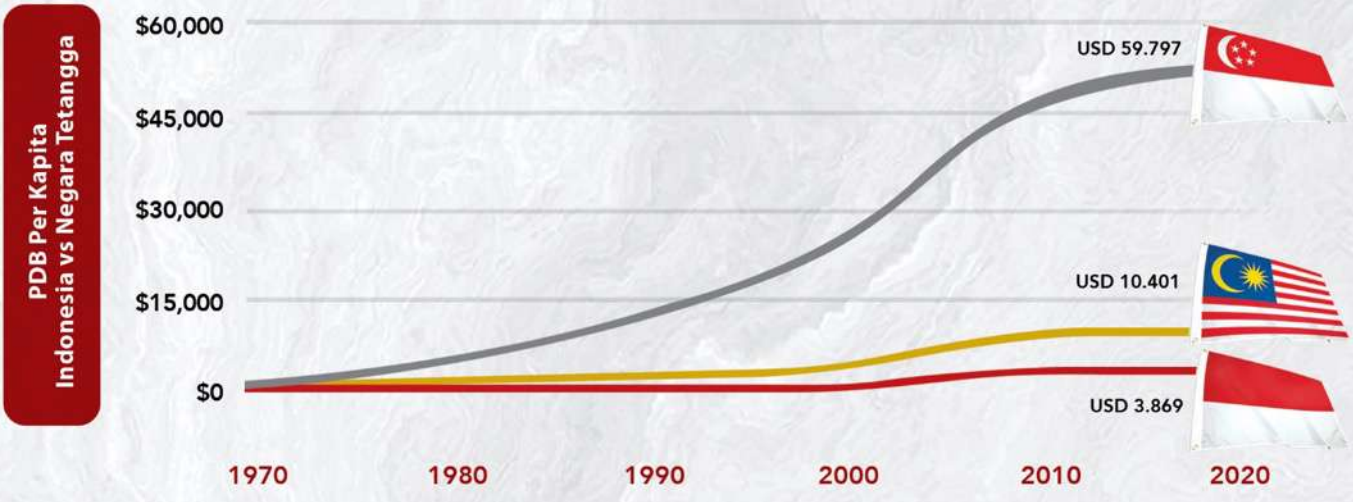
Harus Tumbuh 2X Lipat

Untuk Jadi Negara Berpenghasilan Atas



PDB per Kapita Kita 37% Malaysia

Pendapatan Domestik Bruto (PDB) per kapita kita saat ini ada di angka USD 3.869. Malaysia ada di angka USD 10.401, dan Singapura ada di angka USD 59.797. Artinya aktivitas ekonomi setiap warga Malaysia rata-rata 2,6x di atas kita, dan orang Singapura 15,4x di atas kita.



kita harus segera tumbuh rata-rata 7% dalam 5 tahun 'pertama'

PDB per Kapita Kita Harus Mencapai $13.000 Per Tahun

Untuk naik jelas jadi "negara berpenghasilan atas", PDB per kapita kita harus lebih tinggi dari $13.000.

Untuk mencapai ini, ekonomi kita harus segera tumbuh rata-rata 7% dalam 5 tahun, dan setelahnya tumbuh dua digit (minimal 10%) per tahun selama 10 tahun.*

* Hitungan Badan Kajian Kebijakan Strategis Partai Gerindra, 2017



setelahnya minimal ekonomi kita harus tumbuh 10%

Untuk Jadi Negara Maju Kita Harus Selesaikan Dua Tantangan Besar

Angka PDB per kapita kita saat ini kurang lebih 1/3 dari Malaysia, kurang dari 1/15 Singapura. Ya, saat ini orang Malaysia rata-rata 3 kali lebih sejahtera dari orang kita. Orang Singapura 15 kali lebih sejahtera dari orang Indonesia.

Tertinggal dari Malaysia dan Singapura bukan takdir negara kita. Kita harus mengejar kemajuan Malaysia. Kita harus mengejar kesejahteraan Singapura. Hanya dengan tumbuh di atas 10% setiap tahun selama beberapa tahun, negara kita bisa lepas landas menuju tujuan kita bernegara: Indonesia yang rakyatnya makmur.

Jika kita tidak bisa tumbuh di atas 10% dan melepaskan diri dari *middle income trap*, kita harus mengakui kenyataan pahit bahwa kita tidak berhasil wujudkan cita-cita Para Pendiri Bangsa dalam mewujudkan kemerdekaan negara kita.

Saudara mungkin bertanya, sebenarnya apakah bisa kita tumbuh dua kali lebih cepat dari apa yang kita alami sekarang, rata-rata pertumbuhan yang hanya 5%? Apakah

negara kita punya modal dasar untuk tumbuh di atas 10% selama 10 tahun berturut-turut?

Saya percaya jawabnya bisa.

Kuncinya, untuk bisa mencapai pertumbuhan dan kesejahteraan yang kita harapkan, pemerintah tidak boleh ragu-ragu untuk turun tangan dan membantu pertumbuhan ekonomi.
Jangan artikan ini ekonomi diserahkan ke negara, bukan. Kalau ada swasta yang sudah kuat, ya silakan. Tapi, ada beberapa hal di ekonomi kita yang tidak bisa diserahkan sepenuhnya ke swasta.

Sampai sekarang saja, di beberapa negara ada hal-hal yang tetap akan dikuasai oleh, atau minimal diatur ketat oleh pemerintah. Negara sebagai pelopor ekonomi. Pemerintah yang pelopor, pemerintah yang membuka jalan, pemerintah yang berpihak, pemerintah yang memberdayakan.

Hanya dengan demikian, kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 10% secara berkelanjutan. Hanya dengan

demikian, kita bisa wujudkan negara yang dicita-citakan oleh pendiri-pendiri bangsa kita.

Seperti apa cita-cita mereka?

Para Pendiri Bangsa kita membayangkan dan memiliki mimpi, Indonesia yang merdeka adalah Indonesia yang rakyatnya makmur. Yang rakyatnya, dari mana pun ia berasal, warna apa pun kulitnya, agama apa pun yang ia anut, suku mana pun asalnya, dan kondisi bagaimana pun yang ia harus menerima secara fisik, tidak hidup tertinggal, tidak hidup telantar, dan punya kesempatan untuk hidup dengan layak.

Namun, agar negara kita bisa menjadi pelopor ekonomi, agar ekonomi tumbuh *double digit*, agar kita bisa mewujudkan cita-cita bung Karno dan bung Hatta, kita harus menyelesaikan terlebih dahulu dua masalah besar.

Pertama, kita harus hentikan aliran kekayaan negara ke luar negeri karena kebijakan yang tidak tepat.

Jika kita terus biarkan hasil usaha kita mengalir ke luar negeri, maka negara kita tidak akan pernah punya modal

yang cukup untuk meningkatkan kompleksitas hasil usaha kita dan jadi pelopor ekonomi dunia.

Kedua, kita harus pastikan demokrasi kita tidak mudah dikuasai oleh pemodal besar.

Jika demokrasi dikuasai oleh pemodal besar, sangat kecil kemungkinan negara Indonesia memiliki lapis kepemimpinan yang dapat berdiri tegak dan mengambil keputusan-keputusan politik yang tepat.

Bukan Mau atau Tidak, Tapi Harus

Mengalirnya kekayaan kita ke luar negeri, dan demokrasi kita yang bisa dikuasai oleh pemodal besar adalah dua masalah besar, dua *grand challenges* yang harus bisa kita selesaikan. Kedua hal ini adalah tantangan terbesar generasi kita.

Niscaya, pada waktunya sejarah akan menilai generasi kita dari kemampuan kita, dari usaha kita dalam menyesaikan kedua tantangan ini.

Jika kita benar ingin mewujudkan Indonesia yang sejahtera, mau tidak mau kita harus hadapi dan selesaikan kedua *grand challenges* ini.

Untuk menghadapi kedua *grand challenges* ini, kita tidak boleh minder. *Minderwaardigheids*, kalau kata orang Belanda, atau lebih sering kita baca sebagai *inferiority complex*. Kita harus berani, harus percaya diri, harus memiliki mental tidak mudah menyerah.

Sebagai contoh, ingatlah, bagaimana bisa Malaysia punya perusahaan mobil nasional sejak tahun 1983, sedangkan kita belum punya perusahaan mobil nasional? Malaysia negara 30 juta orang, Indonesia 270 juta orang. Mereka berani bikin perusahaan mobil nasional, kok kita tidak?

Mungkin kita dididik untuk takut. Kita dididik untuk tidak berani. Ketika ada orang kita yang berani, elite kita malah mempertanyakan, yakin benar mampu atau tidak?

Menurut saya, kita harus mampu!

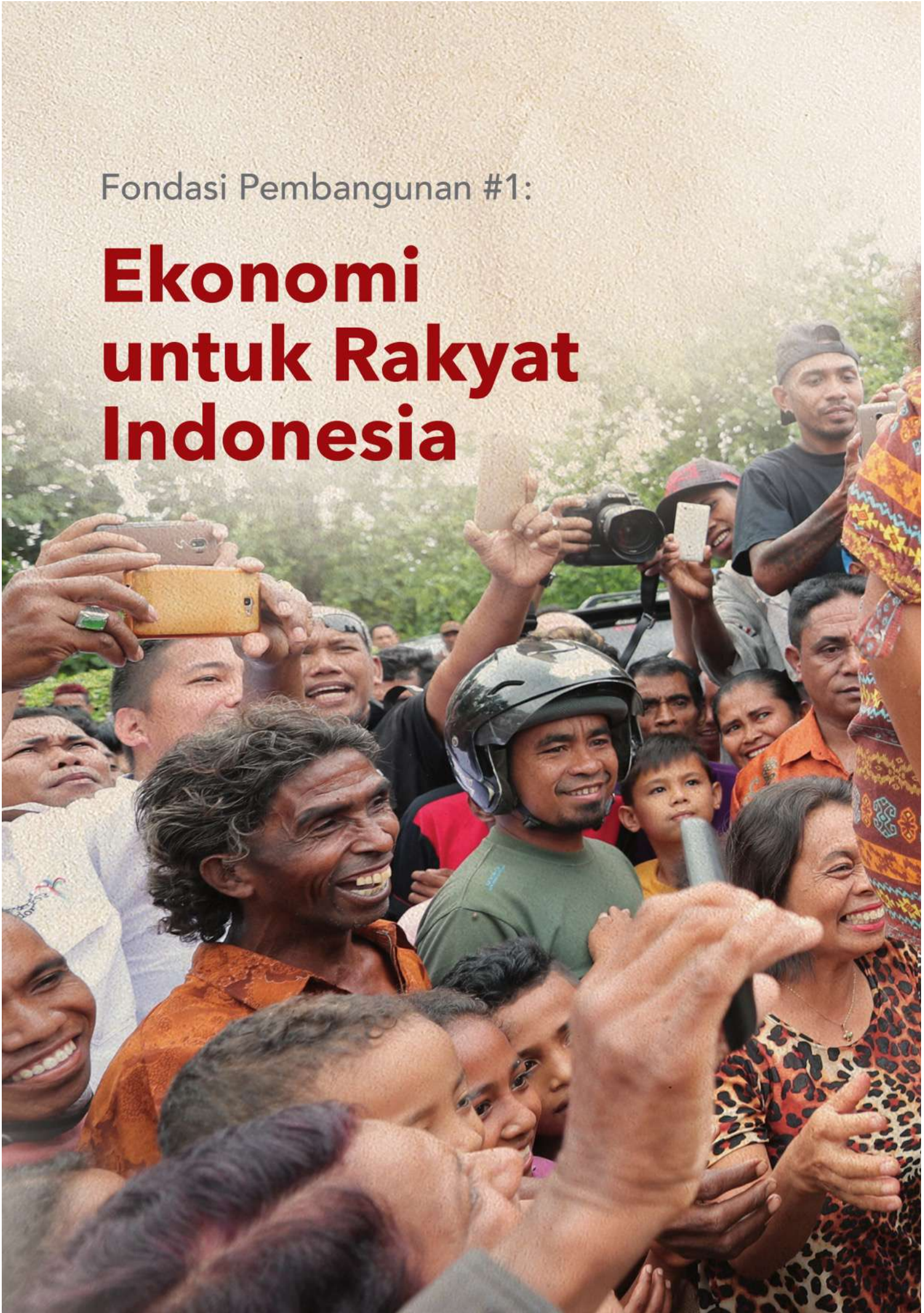
Ingat bagaimana kita dulu mampu bikin Borobudur? Bagaimana dulu kita mampu mengusir penjajah? Rakyat

Surabaya dengan senjata seadanya mampu mengusir Inggris yang baru menang Perang Dunia kedua. Pemenang Perang Dunia kedua dilawan oleh arek-arek Suroboyo, kalah mereka.

Janganlah kita bertanya-tanya, "Apa mampu? Bisa tidak dilaksanakan?" Lho, kok tanya bisa? Ini bukan masalah bisa atau tidak bisa, ini masalah harus kita laksanakan. Kita harus hadapi dan selesaikan dua masalah besar yang ada di hadapan kita dengan strategi yang tepat, dilandasi pemahaman yang utuh, dan dengan segera.

Fondasi Pembangunan #1:

Ekonomi untuk Rakyat Indonesia



Menghentikan Kekayaan Kita Mengalir ke Luar

Penyakit paling mendesak dari tubuh ekonomi Indonesia saat ini adalah mengalir keluarnya kekayaan nasional dari wilayah Indonesia. Terlalu besar hasil dari ekonomi Indonesia yang disimpan dan dimanfaatkan di luar negeri.

Uang bagi suatu negara, kekayaan bagi suatu bangsa, adalah sama dengan darah. Saat ini tubuh bangsa Indonesia berdarah, dan ternyata berdarahnya sudah puluhan tahun. Jika kita hitung sejak zaman penjajahan, maka sudah ratusan tahun ekonomi kita berdarah.

Saudara yang mengikuti pemikiran saya sejak lama tentu mengetahui bahwa sudah bertahun-tahun saya sampaikan, kekayaan Indonesia tiap tahun mengalir ke luar Indonesia. Kekayaan Indonesia tidak tinggal di Indonesia.

Ini artinya, kita semua, seluruh bangsa Indonesia, saat ini sedang kerja rodi. Kita sedang kerja bakti untuk orang lain. Kita bekerja keras, di Indonesia, untuk memperkaya bangsa lain. Kita seperti indekos di rumah sendiri.

Dulu saat VOC menguasai ekonomi Indonesia, mengalirnya kekayaan kita ke luar begitu nyata terlihat dan oleh karenanya dipersoalkan oleh Generasi ’45 yang mendahului kita. VOC menjadi perusahaan dengan nilai tertinggi dalam sejarah ekonomi dunia. Pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia pada waktu itu luar biasa tinggi, PDB wilayah Indonesia mungkin salah satu tertinggi di dunia, tapi keseluruhan hasilnya disimpan di bank-bank Belanda.

Kondisi yang sekarang memang lebih sulit terlihat, padahal hampir serupa. Karena itu banyak dari kita tidak menyadari hal ini. Bagi sedikit yang mengetahui, mereka diam atau menyerah pada keadaan. Sebagian lagi menjadi agen penyalur kekayaan kita yang mengalir ke luar.

Ada beberapa indikator ekonomi yang dapat kita jadikan acuan untuk melihat bagaimana kekayaan Indonesia mengalir ke luar negeri.

Yang pertama, adalah neraca perdagangan negara kita, terutama kepemilikan dari perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspor.

Yang kedua, adalah data simpanan di bank-bank luar negeri yang merupakan milik pengusaha dan perusahaan Indonesia, serta perusahaan asing yang mengambil untung di Indonesia dan menempatkan keuntungannya di luar negeri.

Banjir Harta Ke Luar Indonesia



Imperialism Tua vs Modern Kapitalisme

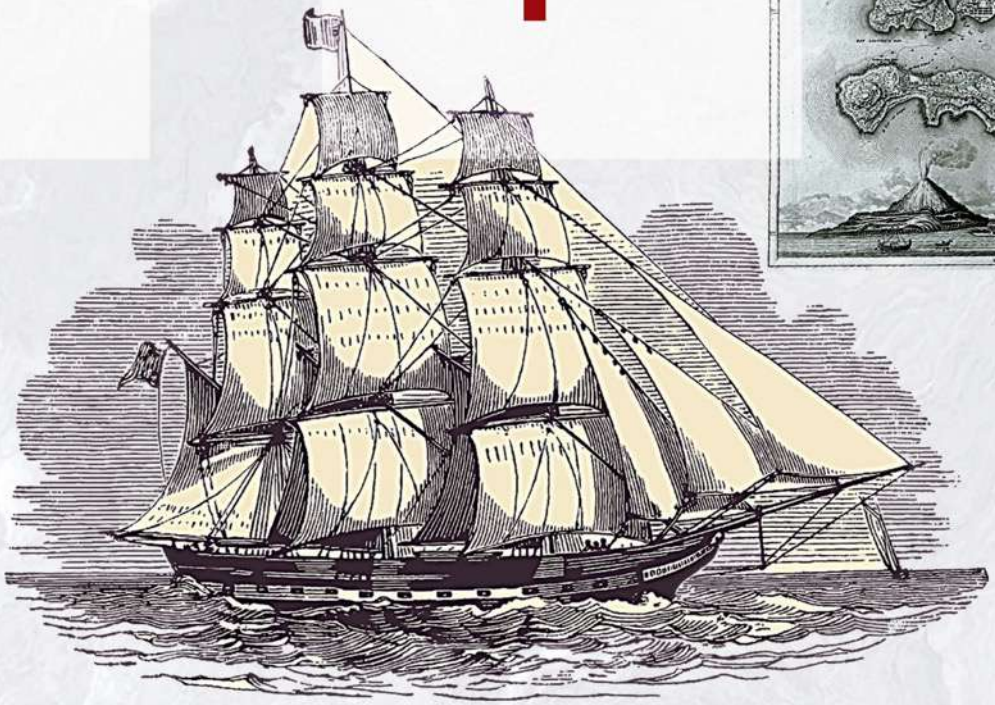
"Tatkala modern-kapitalisme ini sudah dewasa, maka modal kelebihannya alias surplus kapitalnya lalu ingin masukkan ke Indonesia - modern-imperlialisme lalu menjelma di muka ini, ingin menggantikan imperialism tua yang juga sudah tua bangka.

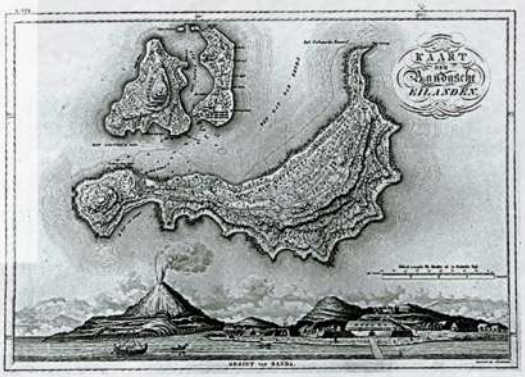
Cara pengambilan rezeki dengan jalan monopoli dan paksa makin lama makin diganti cara pengambilan rezeki dengan jalan persaingan merdeka dan buruh merdeka.

Cara pengambilan berubah, sistemnya berubah, wataknya berubah, tetapi banyakkah perubahan bagi rakyat Indonesia? Banjir harta yang keluar Indonesia bukan semakin surut, tetapi malahan makin besar, drainage Indonesia malahan makin makan.

"Mencapai Indonesia Merdeka"
Ir. Sukarno, Maret 1933

Kekayaan Kita Untuk Siapa?





Taksiran Keuntungan Belanda Dari Menjajah Indonesia Periode 1878-1941 (63 tahun):

54 Miliar Gulden, atau Rp. 5.174 triliun Sampai dengan Rp. 66.599 triliun

Ketika kita membuka buku sejarah Indonesia, kita sering membaca "kekayaan Indonesia diambil penjajah". Tetapi, jarang kita membaca ulasan berapa banyak kekayaan Indonesia yang diambil oleh bangsa penjajah.

Peneliti dari Chulalongkorn University menaksir, dengan membuka catatan resmi Pemerintah Belanda tahun 1878 sampai 1941 soal keuntungan ekspor dari Indonesia, tabungan orang Belanda di Indonesia serta anggaran Belanda untuk menjajah Indonesia, keuntungan Belanda pada periode 1878-1941 adalah 54 miliar Gulden. Pada waktu itu, jumlah ini setara dengan $ 22 miliar.

Tergantung cara konversi yang digunakan, $ 22 miliar pada waktu itu setara dengan $ 398 miliar atau Rp. 5.174 triliun sampai $ 5.123 miliar atau Rp. 66.599 triliun uang sekarang. Walau jumlah ini besar, angka sebenarnya pasti lebih tinggi karena banyak perdagangan yang tidak tercatat oleh Pemerintah Belanda. Angka ini juga belum menghitung mengalir keluarnya kekayaan Indonesia di periode penjajahan sebelum tahun 1878.



* Center for Southeast Asian Studies Chulalongkorn University, 2012

Perdagangan Indonesia

Saya mulai menyimak tabel neraca ekspor-impor Indonesia dari tahun 1997. Pada saat itu saya sedang berada di Yordania, dan saya ingin mengetahui bagaimana sebenarnya situasi ekonomi kita. Ternyata, sekarang, kalau kita lihat neraca ekspor-impor Indonesia[4] dari tahun 1997 ke tahun 2014, selama 17 tahun, total nilai ekspor kita mencapai angka USD 1,9 triliun dan mengalami *surplus* atau keuntungan perdagangan. Kurang lebih Rp. 26.600 triliun jika menggunakan kurs Rp. 14.000. Ini jumlah yang cukup besar.

Namun perlu kita ingat, ini adalah angka yang tercatat dalam dokumen ekspor. Belum tentu sama nilai ekspor yang sebenarnya. Berdasarkan pengalaman banyak pelaku ekspor yang berdiskusi dengan saya, dan hasil penelitian lembaga riset kredibel[5], angka ini bisa keliru 20%, bisa 30%, bahkan bisa 40%.

Lembaga riset Global Financial Integrity menaksir kebocoran ekspor akibat trade *misinvoicing*, atau "kesalahan" dalam pembukuan nilai dan volume ekspor,

[4] Badan Pusat Statistik, 2017
[5] Global Financial Integrity, 2015

mencapai USD 38,5 miliar di 2016, setara Rp. 540 triliun atau 13,7% dari total perdagangan.

Selama kurun waktu 2004 hingga 2013, total kebocoran akibat "kesalahan" ini mencapai USD 167,7 miliar – atau jika kita gunakan kurs USD 1 = Rp. 14.000, sama dengan Rp. 2.300 triliun.

Selain itu, setelah saya selidiki, banyak uang hasil keuntungan kita tidak tinggal di dalam negeri. Karena itu, saya tidak begitu kaget ketika Menteri Keuangan pada Agustus 2016 mengatakan bahwa ada Rp. 11.400 triliun uang milik pengusaha dan perusahaan Indonesia yang parkir di luar negeri[6]. Jumlah Rp. 11.400 triliun ini 5x lebih besar dari APBN kita saat ini, dan kurang lebih sama dengan pendapatan domestik bruto (PDB) kita.

Selain adanya ekspor yang tidak dilaporkan atau salah dilaporkan oleh pengusaha kita, sebagian besar keuntungan ekspor Indonesia masuk ke perusahaan-perusahaan asing dengan rekening di luar negeri. Ini terjadi karena sebagian besar dari nilai ekspor kita dikuasai oleh

[6] Kementerian Keuangan, 2016

perusahaan-perusahaan asing yang memiliki perusahaan di Indonesia[7].

Perusahaan-perusahaan ini menjual hasil alam Indonesia. Mereka menggunakan jalan, pelabuhan, dan keringat orang Indonesia. Tetapi ketika mereka mendapatkan untung, mereka tidak menyimpan keuntungan mereka di Indonesia. Selain itu, ada juga pengusaha-pengusaha Indonesia yang melakukan usaha ekspor, dan melakukan usaha di Indonesia, yang setelah untung, malah ikutan menyimpan dan memindahkan sebagian keuntungan mereka ke luar negeri.

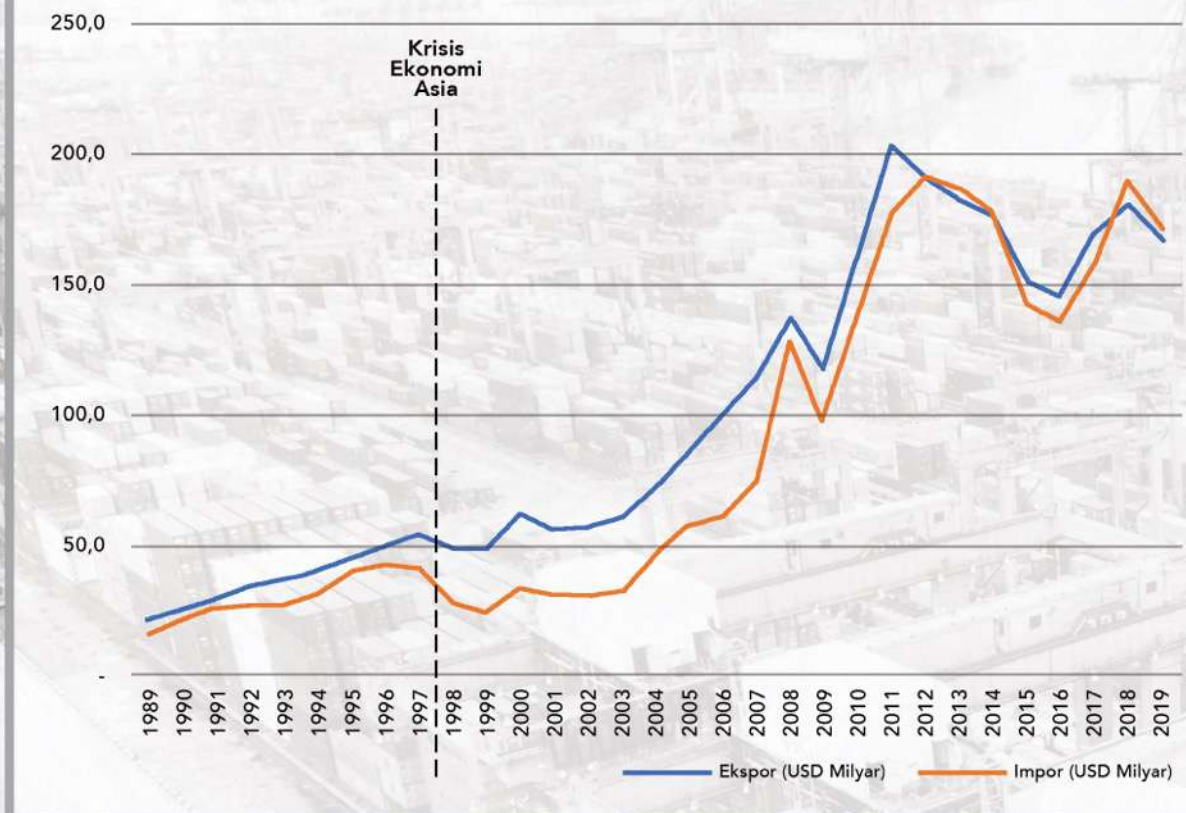
[7] Indonesia for Global Justice, 2013

Net Outflow of National Wealth



Cadangan devisa negara diperoleh dari kegiatan perdagangan antar negara atau kegiatan ekspor dan impor. Selama 30 tahun dari 1989 sampai 2019, rata-rata keuntungan Indonesia adalah USD 13,8 milyar per tahun. Namun di akhir tahun 2019, cadangan devisa Indonesia hanya USD 129,2 milyar.

Neraca Ekspor Impor Indonesia (USD Milyar)



	Ekspor (USD milyar)	Impor (USD milyar)	Neraca (USD milyar)	Cadangan devisa (USD milyar)
1989	22,0	16,4	5,7	6,7
1990	25,7	21,8	3,8	8,7
1991	29,1	25,9	3,3	10,4
1992	34,0	27,3	6,7	11,5
1993	36,8	28,3	8,5	12,5
1994	40,1	32,0	8,1	13,3
1995	45,4	40,6	4,8	14,9
1996	49,8	42,9	6,9	19,4
1997	53,4	41,7	11,8	17,5
1998	48,8	27,3	21,5	23,6
1999	48,7	24,0	24,7	27,3
2000	62,1	33,5	28,6	29,4
2001	56,3	31,0	25,4	28,1
2002	57,2	31,3	25,9	32,0
2003	61,1	32,6	28,5	36,3
2004	71,6	46,5	25,1	36,3
2005	85,7	57,7	28,0	34,7
2006	100,8	61,1	39,7	42,6
2007	114,1	74,5	39,6	56,9
2008	137,0	129,2	7,8	51,6
2009	116,5	96,8	19,7	66,1
2010	157,8	135,7	22,1	96,2
2011	203,5	177,4	26,1	110,1
2012	190,0	191,7	(1,7)	112,8
2013	182,6	186,6	(4,1)	99,4
2014	176,0	178,2	(2,1)	111,9
2015	150,4	142,7	7,7	105,9
2016	144,5	135,7	8,8	116,4
2017	168,8	157,4	11,4	130,2
2018	180,2	188,7	(8,5)	120,7
2019	167,7	171,3	(3,6)	129,2

Sumber: Bank Dunia, 2022

Ini masalah besar untuk bangsa kita. Jika uang ini tidak tinggal di Indonesia, maka uang ini tidak dapat digunakan untuk membangun Indonesia. Bank-bank di Indonesia tidak punya cukup uang untuk memberikan kredit yang bisa membangkitkan ekonomi kita. Tidak terjadi *multiplier effect* yang bisa membangkitkan gairah ekonomi Indonesia.

Apakah ini masalah yang baru? Jika kita lihat mundur ke belakang, ternyata mengalirnya kekayaan Indonesia ke luar negeri telah terjadi selama ratusan tahun. Ini adalah masalah sistemik yang perlu kita ketahui dan hadapi.

Kalau kita mundur ke belakang, tahun 1950, kecuali di tengah pergolakan-pergolakan, ekspor-impor Indonesia tetap untung. Tapi untungnya untuk siapa?

Kalau kita buka pidato Bung Karno, "Indonesia Menggugat", dan kita pelajari, beliau bicara persis sama. Hanya kalau saya pakai angka dolar AS dan Rupiah, beliau pakai angka Gulden. Intinya adalah mengalirnya kekayaaan kita ke luar negeri. Beliau menulis:

Bahwasanya, Indonesia bagi kaum imperialisme adalah suatu surga, suatu surga yang di seluruh dunia tidak ada lawannya, tidak ada bandingan kenikmatannya.

Kira-kira tahun 1870, dibukalah pintu gerbang itu! Sebagai angin yang makin lama makin keras bertiup, sebagai aliran sungai yang makin lama makin membanjir, sebagai gemuruh tentara menang yang masuk ke dalam kota yang kalah, maka sesudah Undang-undang Agraris dan Undang-undang Tanaman Tebu de Waal di dalam tahun 1870 diterima baik oleh *Staten-Generaal* di negeri Belanda, masuklah, modal partikelir itu di Indonesia, mengadakan pabrik-pabrik gula di mana-mana, kebun-kebun teh, *onderneming-onderneming* tembakau dan sebagainya ditambah lagi modal partikelir yang membuka macam-macam perusahaan tambang, macam-macam perusahaan kereta-api, trem, kapal, atau pebrik-pabrik yang lain.

Bagi rakyat Indonesia perubahan sejak tahun 1870 itu hanya perubahan cara pengedukan rezeki; bagi rakyat Indonesia, imperialisme-tua dan imperialisme-modern kedua-duanya tinggal imperialisme belaka, kedua-duanya tinggal pengangkutan rezeki Indonesia keluar, kedua-duanya tinggal *drainage*!

Kemarin saya baca sebuah penelitian yang membuka catatan resmi Pemerintah Belanda tahun 1878 sampai 1941 soal keuntungan ekspor Indonesia, tabungan orang Belanda di Indonesia serta anggaran Belanda untuk menjajah Indonesia. Penelitian ini menemukan keuntungan Belanda selama 63 tahun adalah 54 miliar Gulden. Jumlah ini, pada waktu itu sama dengan USD 22 miliar. USD 22 miliar waktu itu, jika disetarakan dengan uang sekarang, kira-kirasama dengan USD 398 miliar, atau sampai USD 5.123 miliar. USD 5.123 miliar itu artinya Rp. 66.599 triliun[8].

Mengalirnya kekayaan kita ke luar negeri atau capital outflow inilah yang dipermasalahkan oleh Bung Karno. Saya, Prabowo Subianto, yang bukan sarjana ekonomi, menyebut fenomena ini "*net outflow of national wealth*". Mengalir ke luarnya kekayaan nasional dalam jumlah yang keterlaluan.

[8] Chulalongkorn University, 2012

Illicit Outflow of National Wealth

Mengalir Keluarnya Kekayaan Negara Secara Gelap

Penggelapan Uang ke Luar Indonesia 2004-2013 Estimasi Sangat Konservatif dari Global Financial Integrity

Hot Money Outflows	Trade Misinvoicing Outflows	Total Outflows
Rp. 17.000 triliun	Rp. 2.100 triliun	Rp. 19.100 triliun



Dengan menganalisa kejanggalan dari angka-angka perdagangan resmi yang diterbitkan oleh IMF, Bank Dunia, PBB, Kemendag AS, dan Uni Eropa, lembaga riset pergerakan uang dunia Global Financial Integrity (GFI) yang bermarkas di Washington DC menyimpulkan setidaknya US$ 180,71 miliar atau setara Rp. 2.349 triliun telah mengalir keluar dari Indonesia secara gelap pada kurun waktu 2004-2013.

Perlu dicatat:
GFI menekankan bahwa jumlah ini hanya sebagian kecil dari total kekayaan Indonesia yang keluar secara gelap karena hitungan di atas tidak mencakup: 1. Uang yang mengalir keluar secara tunai (cash) dalam mata uang Rupiah ataupun mata uang asing | 2. Angka-angka perdagangan jasa, lisensi, royalti dan non-barang lainnya yang mencakup ~25% nilai perdagangan dunia | 3. Manipulasi angka ekspor-impor yang dilakukan secara bersama oleh eksportir dan importir.

3 Modus Penggelapan Uang Keluar Indonesia

1. **Korupsi**
   Penggelapan hasil korupsi oleh pejabat
2. **Kriminal**
   Penggelapan hasil jual-beli narkoba, manusia, dan perdagangan terlarang lainnya
3. **Komersial**
   Pemalsuan dokumen ekspor dan impor untuk menghindari pajak

Tantangan Pemerintahan Terbesar Kita

Adalah Mengalirnya Kekayaan Kita Ke Luar Negeri

Jumlah uang WNI di bank-bank dalam negeri:

Rp. 7.000 triliun

Data Lembaga Penjamin Simpanan, 2020

Jumlah uang WNI di bank-bank luar negeri:

Rp. 11.000 triliun

Data Kementerian Keuangan, 2016



Jumlah uang yang dikembalikan (repatriasi) ke Indonesia karena tax amnesty 2016:

Rp. 140 triliun

Banyak Uang Kita Ada di Bank-Bank Asing

Indikator lain yang menunjukkan mengalirnya kekayaan kita ke luar negeri adalah jumlah simpanan di bank-bank luar negeri yang milik orang Indonesia.

Jumlahnya dalam persentase memang relatif sedikit, hanya sekian persen dari uang yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Namun jumlahnya dalam angka riil cukup besar, dan data ini telah kita ketahui karena telah diungkap oleh Pemerintah.

Menurut Kementerian Keuangan, pada akhir 2016 ada Rp. 11.000 triliun kekayaan orang Indonesia yang disimpan di bank-bank di luar negeri.

Mengingat APBN atau anggaran belanja negara kita saat ini hanya Rp. 2.000 triliun, jumlah ini lebih dari 5 kali APBN kita.

Padahal, jumlah yang lebih dari 5 kali lipat anggaran negara kita ada di luar negeri ini, jika ada di dalam negeri, bisa disalurkan oleh bank-bank Indonesia untuk membiayai usaha-usaha Indonesia. Bisa disalurkan untuk membangun

infrastruktur, dan menjadikan BUMN-BUMN Indonesia perusahaan-perusahaan kelas dunia.

Indikator lain yang cukup miris bagi saya, adalah besarnya aset bank-bank di negeri tetangga, sebagai contoh di Singapura, dibandingkan dengan bank-bank terbesar Indonesia.
Jumlah penduduk Singapura 50 kali lebih sedikit dari kita. Besar ekonomi Singapura yang USD 372 miliar di tahun 2019 juga 3 kali lebih kecil dari ekonomi kita yang mencapai USD 1.119 miliar di tahun yang sama.

Namun bank terbesar mereka bisa 5 kali lebih besar dari bank terbesar di Indonesia, Bank Rakyat Indonesia (BRI). Pada tahun 2020[9], jumlah *asset under management* BRI hanya USD 101 miliar. Sedangkan angka yang sama untuk DBS adalah USD 451 miliar, untuk OCBC USD 365 miliar dan untuk UOB USD 300 miliar.

Total jumlah aset di tiga bank terbesar Singapura mencapai USD 1.116 miliar. Sedangkan total aset tiga bank terbesar Indonesia: BRI, Mandiri dan BCA hanya USD 263 miliar atau hanya 23% dari yang dikuasai oleh tiga bank terbesar

[9] Data Forbes Global 2000, data 2020

Indonesia. Padahal ekonomi kita 3 kali lebih besar dari Singapura.

Siapa sajakah sebenarnya pemilik terbesar dari uang yang disimpan di bank-bank Singapura? Apakah benar, orang Singapura sedemikian jauh lebih kaya dari orang Indonesia? Ternyata, berdasarkan riset yang dilakukan oleh Reuters, setidaknya USD 200 miliar adalah milik orang Indonesia. Dengan kurs USD 1 = Rp. 14,000, ini artinya ada Rp. 2.800 triliun uang hasil ekonomi Indonesia yang parkir di Singapura.

Indikator ini, ditambah indikator neraca ekspor-impor kita dan cadangan devisa kita, mengindikasikan kekayaan kita tidak tinggal di Republik Indonesia.

Hakikat Ancaman untuk Negara

UNTUK MENILAI SEBUAH ANCAMAN,

JANGAN BERTANYA SIAPA AKAN BERBUAT APA?

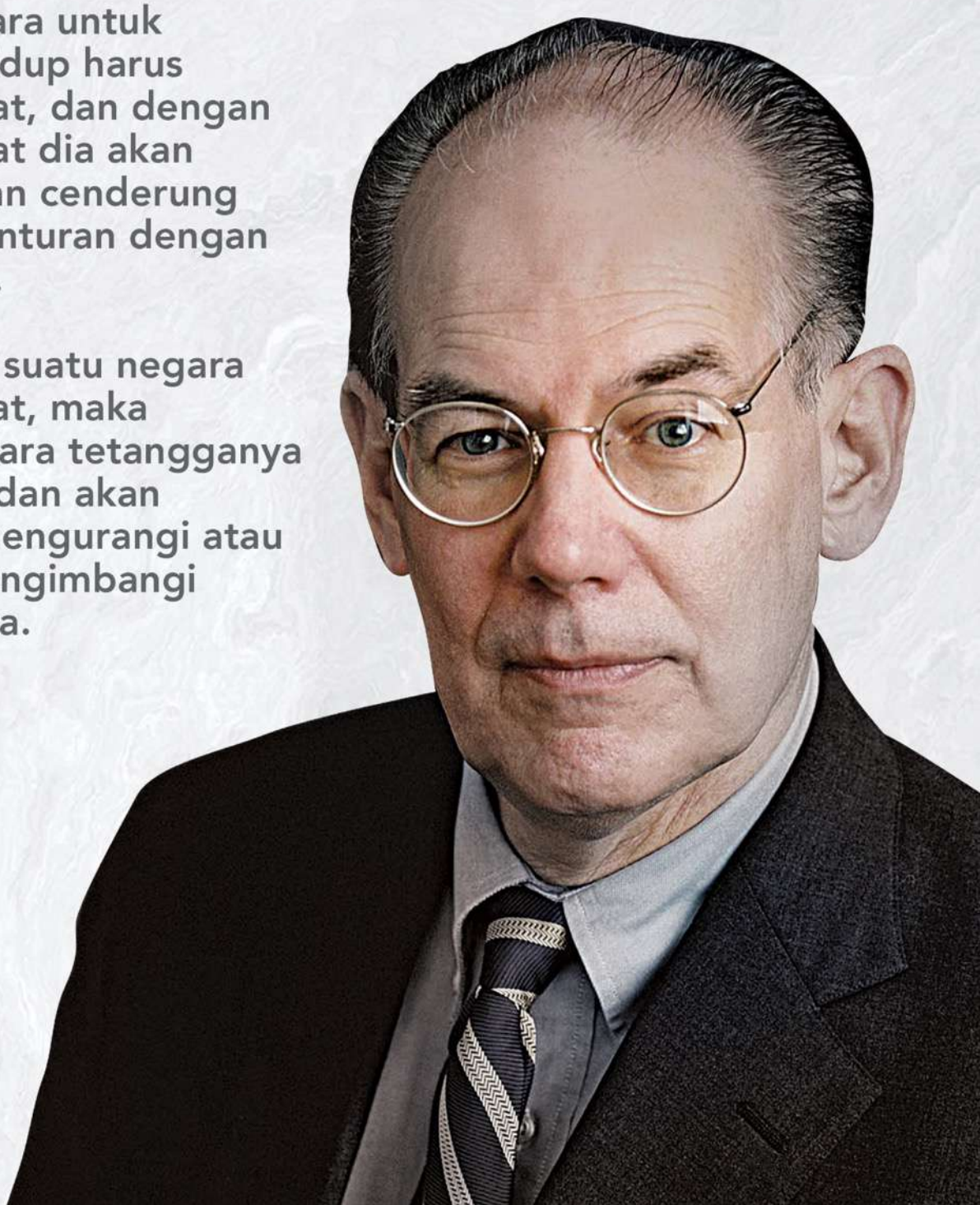
TAPI TANYA SIAPA BISA BERBUAT APA?



Teori John J. Mearsheimer

Setiap negara untuk bertahan hidup harus menjadi kuat, dan dengan menjadi kuat dia akan bersaing dan cenderung akan berbenturan dengan negara lain.

Karena jika suatu negara menjadi kuat, maka negara-negara tetangganya akan takut dan akan berusaha mengurangi atau minimal mengimbangi kekuatannya.



Singapura, Investor Terbesar



"Kita investor asing terbesar di Indonesia. Mereka 50 kali lebih besar daripada kita. Tapi, untuk investasi dan menolong ekonomi mereka, mereka bilang negara kecil Singapura ini bisa membantu Indonesia."

Lee Hsien Loong
PM Singapura
Mei 2015

"Sampai saat ini penanaman modal asing (PMA) di Indonesia masih terbesar dari Singapura. Tidak menutup kemungkinan, uang yang masuk itu pun, uang dari teman-teman pengusaha di Indonesia."

Bahlil Lahadalia
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)



Rp. 2.800 Triliun di Singapura



Cadangan Devisa Kita Kurang dari 1/3 Singapura

Perbandingan cadangan devisa:

Indonesia	Malaysia	Singapura
USD 140 milyar	USD 110 milyar	USD 370 milyar

* Bank Dunia, 2021



Bank Terbesar Kita 1/5 DBS Singapura

Menurut investigasi Reuters pasca terbitnya kebijakan tax amnesty di 2016, ada $ 200 miliar atau setara Rp. 2.800 triliun uang milik orang atau perusahaan Indonesia di bank-bank Singapura. Adapun total jumlah dana yang dideklarasikan di Singapura secara resmi saat tax amnesty mencapai Rp. 766 triliun.



Elite Indonesia Tidak Jujur

Saya pernah ditanya, bagaimana dengan mata uang Republik Indonesia yang lemah? Bagaimana harga-harga bahan pokok yang tidak menentu? Jawabannya sebetulnya sangat sederhana, tapi mungkin banyak elite Indonesia dan banyak pakar ekonomi Indonesia tidak mau sampaikan kepada rakyat.

Saya sudah katakan berkali-kali bahwa kekayaan Indonesia tidak tinggal di Indonesia. Inilah masalah utama kita.

Kita mengizinkan kekayaan kita mengalir ke luar negara kita. Kalau begini, bagaimana bisa ekonomi kita kuat? Bagaimana bisa harga-harga cukup memadai untuk rakyat kita, kalau kekayaan kita mengalir ke luar?

Maaf kalau Prabowo Subianto bicara agak seperti ini. Ada yang bilang pada Prabowo, "Pak Prabowo, mbok bicara yang baik-baik saja." Ada yang mengatakan, "Pak Prabowo, jangan bicara terlalu keras. Bicara yang halus-halus saja."

Selama 15 tahun terakhir, setiap saya ada kesempatan untuk memaparkan data-data, saya tanyakan kepada

mereka yang menyimak. “Kalian mau saya bicara baik-baik, atau saya bicara apa adanya? Kalian mau saya bicara halus, baik-baik, tapi kenyataannya tidak baik, atau saya bicara apa adanya, saudara-saudara sekalian?”

Mereka menjawab, “bicara apa adanya saja, pak Prabowo”.

Menurut saya, sudah terlalu lama elite Indonesia tidak menyampaikan apa yang terjadi. Tidak terbuka kepada rakyat, tidak terbuka kepada bangsa.

Kenapa orang kecil semakin terjepit? Kenapa di Indonesia, yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin? Kenapa petani tidak senyum kalau panen? Bagaimana bisa di negara yang sudah lebih dari 75 tahun merdeka, masih ada guru honorer yang hanya terima Rp. 200.000 sebulan [10] ? Walaupun sekarang sudah ada bantuan langsung dari Pemerintah Pusat dan sebagian Pemerintah Daerah, kesejahteraan guru masih jauh dari layak.

Bagaimana bisa?

[10] Kementerian Pendidikan, 2020

Bagaimana bisa, sebagian besar hasil keuntungan kita sebagai bangsa mengalir ke luar negeri, tetapi elit diam saja? Belasan ribu triliun Rupiah uang yang seharusnya ada di Indonesia, parkir di luar negeri, dan elit Indonesia tidak berjuang keras untuk mengembalikannya ke dalam negeri?

Pahit memang, apa yang saya katakan. Tetapi kalau setiap tahun terus ada *net outflow* kekayaan nasional kita ke luar, saya kira kita sebagai negara tidak perlu punya rencana pembangunan jangka panjang. Kita tidak perlu rencana pembangunan karena rakyat kita tidak akan menikmati.

Uang ini adalah sangat-sangat vital bagi pembangunan masa depan bangsa kita. Bangsa kita tidak bisa lagi kehilangan kekayaan yang seharusnya bisa berputar di dalam negeri tiap tahun.

Jika kita biarkan kekayaan kita terus mengalir ke luar negeri, artinya kita menerima bahwa kita sebagai bangsa dipelihara sebagai pasar dan sebagai buruh oleh sistem kapitalisme global.

Bumi kita dipakai, air kita dipakai, rakyat kita dipakai sebagai buruh demi memperkaya bangsa lain. Kita diatur

menjadi pasar, menjadi konsumen dari produk dan jasa yang dibuat oleh bangsa lain.

Kita penuh retorika. Rakyat kita, pemimpin kita bernyanyi "Indonesia Raya", "Maju Tak Gentar", tapi kesejahteraan kita jalan di tempat. Kita terus miskin. Kita terjerumus dalam *middle income trap*, perangkap negara menengah.

Kita hidup di tengah kekayaan sumber alam, tetapi kita miskin. Negara dengan tiga perempat laut tetapi mengimpor ikan, mengimpor garam, mengimpor singkong, dan mengimpor daging.

Yang saya heran, kenapa kalau kita bicara "mengimpor daging, mengimpor singkong", banyak orang yang tertawa? Saya tidak mengerti. Seharusnya kita menangis.

Tapi, kata orang, ambang penderitaan bangsa Indonesia tinggi sekali. Jadi, kalau kaki kita diinjak, orang Indonesia tidak teriak-teriak karena sifat bangsa Indonesia memang baik, nrimo. "Monggo, silakan injak kaki saya. Silakan perdaya saya dan ambil kekayaan saya."

Karena inilah, menurut saya negara kita saat ini berada di persimpangan jalan yang sangat-sangat penting.

Darah kita sudah diambil puluhan tahun. Tubuh bangsa Indonesia ini sudah selayaknya masuk IGD.

'Bocornya' uang yang seharusnya dapat digunakan untuk membangun bangsa Indonesia, dari: kebocoran tabungan nasional dari keuntungan perdagangan kita, kebocoran pendapatan pajak nasional dari *tax ratio* kita yang begitu rendah, dan kebocoran dari korupsi penerimaan dan belanja anggaran belanja nasional yang jika dijumlah bisa mencapai angka Rp. 2.800 triliun setiap tahun menurut kajian Litbang KPK, dan banyak hitungan kredibel lainnya, harus segera kita hentikan.

Kita Dididik Menyerah Sebelum Berjuang?

Saat ini, kita juga kehilangan uang ke luar negeri dari membeli barang-barang produksi luar negeri, yang sebenarnya bisa diproduksi sendiri oleh putera puteri Indonesia. Bahkan, ada yang mengatakan kita sudah kecanduan barang impor.

Hal ini bisa kita lihat dari apa yang kita gunakan sehari-hari, dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi.

Dari mana kah bahan baku mi instan yang kita konsumsi? Hampir 100% bahan baku mi instan kita dari gandum yang diproduksi negara-negara barat, yang kita impor dengan jumlah 10 juta ton setiap tahun.

Dari mana kah nasi yang kita santap? Mobil yang kita kendarai? Handphone yang kita bawa? Baja yang digunakan untuk membangun rumah kita?

Produksi asing atau Indonesia? Jika produksinya di Indonesia, perusahaannya milik asing atau milik nasional? Coba renungkan.

Sebagai contoh, pada tahun 2019 lalu, kita sebagai bangsa membeli kurang lebih 6,4 juta motor[11]. Kemudian, pada tahun yang sama kita membeli kurang lebih 1 juta mobil[12]. Dari semua mobil yang dibeli oleh bangsa Indonesia, tidak ada satupun milik perusahaan nasional Indonesia. Ini artinya, kita "mengirim" uang ke negara lain setiap kali kita membeli mobil atau motor.

[11] Asosiasi Industri Sepeda motor Indonesia (AISI), 2020
[12] Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), 2020

Benar, sebagian dari merek mobil dan motor yang kita beli di Indonesia memiliki pabrik di Indonesia. Benar, ongkos produksinya mungkin masih dinikmati oleh orang Indonesia yang menjadi buruh pabrik, tetapi keuntungannya tidak tinggal di Indonesia. Setelah membayar buruh pabrik kita, sales dan teknisi di ribuan toko yang juga orang kita, listrik kita, dan membayar pajak, sebagian besar keuntungan bersih penjualannya tetap mengalir ke luar negeri.

Situasi ini tercermin dari neraca pendapatan primer kita. Neraca pendapatan primer merekam besarnya aliran uang ke luar negeri hasil investasi asing, berupa pendapatan ekuitas, pendapatan bunga, dan pendapatan investasi lain.

Saat ini neraca pendapatan primer kita defisit, dan sudah defisit lebih dari 10 tahun. Defisitnya cukup besar – pada tahun 2019 lalu mencapai USD 73 miliar atau sekitar Rp. 1.022 triliun[13]. Rata-rata 2012-2019 berkisar antara defisit USD 11 miliar hingga USD 142 miliar.

Pada tahun 2020, neraca pendapatan primer kita mendapat tekanan begitu berat karena pandemi COVID 19. Melonjak

[13] Bank Indonesia, 2020

tajam ke angka minus USD 640 miliar – setara dengan minus Rp. 9.300 triliun.

Malaysia, yang jumlah penduduknya sepersepuluh jumlah penduduk Indonesia, belasan tahun lalu sudah berani membikin mobil nasional. Sekarang kita sudah buka pasar kita. Kita telah menjadi bagian dari ASEAN Economic Community, masyarakat ekonomi ASEAN. Kita harus buka pelabuhan kita untuk kapal-kapal yang membawa produksi negara tetangga kita. Barang mereka telah dan akan terus masuk.

Saya bukan mengatakan kita harus pada investasi anti asing, tidak.

Tapi kalau semua produksi di Indonesia bergantung pada investasi asing, kita akan celaka. Rupiah kita akan terus lemah. Seorang ekonom Indonesia baru-baru ini menemukan, setiap USD 1 miliar investasi asing yang tertanam di Indonesia dalam satu tahun (2010 – 2014) mengakibatkan USD 12 miliar dalam keuntungan mengalir ke luar negeri[14].

[14] Analisa Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, 2015

Saya sering mendengar dan menyaksikan, kita selalu di-*brainwash*, dicuci otak. "Oh, produksi sendiri dengan merek sendiri tidak efisien."

Tapi kok, Korea Selatan yang jumlah penduduknya jauh lebih sedikit dari kita, bisa efisien, sedangkan kita tidak bisa efisien? Berarti apa? Saya menyimpulkan, berarti kita dididik oleh banyak pemimpin kita untuk menyerah sebelum berjuang.

Kita diprogram, otak kita di-*brainwash*, bahwa kita ini memang kalah dari bangsa lain. Kita semuanya, termasuk anak-anak kita, walaupun kita sering tidak mengakui, kita di bawah sadar merasa rendah diri. *Minderwaardigheids kompleks*. Begitu lihat orang asing, kita hormat dan kagum. Begitu berhadapan dengan merek asing, menyerah.

Ini masalah Indonesia. Ini masalah kita. Menteri-Menteri kita, dan banyak pemimpin kita dari dulu mengatakan, "oh, jangan, Indonesia tidak perlu bikin mobil sendiri." Padahal, per satu mobil kalau kita hitung, untungnya bisa lebih dari 2.000 dolar per mobil[15]. Katakanlah untung 1.000 dolar per

[15] Analisa keuangan Toyota

mobil. Berarti kalau satu juta mobil setahun, kita kirim uang ke luar negeri USD 1 miliar setahun.

Kalau motor, keuntungannya bisa 10% dari ongkos produksi per unit[16]. Katakanlah, untung 100 dollar per unit. 100 dollar dikalikan 6 juta unit, artinya USD 600 juta. Artinya kita kirim setiap tahun USD 1,6 miliar ke luar negeri. Bisa lebih dari Rp. 20 triliun kita kirim tiap tahun karena seluruhnya mobil dan motor yang kita beli di Indonesia adalah merek asing, dan milik asing.

Sekarang dunia sudah mulai beralih ke mobil, motor dan bus listrik. Indonesia memiliki cadangan nikel yang cukup banyak. Nikel dibutuhkan untuk membuat salah satu komponen utama dari mobil, motor dan bus listrik: Baterai. Sebagai negara penghasil nikel, kita harus mengolah nikel kita menjadi barang jadi. Jangan kita ekspor nikel kita secara mentah begitu saja untuk dinikmati negara-negara lain.

Sekali lagi saya tidak mengatakan kita perlu boikot barang asing, tidak.

[16] Analisa keuangan Yamaha

Tetapi, yang saya harapkan adalah, kalau ada satu juta mobil yang dibeli oleh rakyat Indonesia setiap tahun, masa kita tidak mampu membuat dan merebut 10% saja dari pasar kita sendiri? Seratus ribu mobil. Masa tidak ada sih, pemimpin bangsa Indonesia, jika didukung pemerintah, yang berani mengatakan, “kita buat 100.000 mobil listrik nasional milik negara?”

Ekonomi Milik Siapa?



1% Menguasai 36% Kekayaan

Angka rasio gini Indonesia menurut Credit Suisse adalah 0,366. Artinya 1% orang terkaya (hanya 2,7 juta orang) menguasai 36% kekayaan Indonesia yaitu sekitar Rp. 16.800 triliun dari total kekayaan orang Indonesia Rp. 44.800 triliun.

* Credit Suisse Global Wealth Databook, 2021

27,5 Juta Hidup Miskin

27,5 juta orang Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan Pemerintah yaitu Rp. 472.000 per orang per bulan atau Rp. 15.700 per orang per hari. Angka ini adalah 10,2% dari seluruh penduduk Indonesia.

* Badan Pusat Statistik, Maret 2021







67% dikuasai 1% (2,6 juta orang)

33% dikuasai 99%



“115 Juta Orang Indonesia Terancam Miskin”

Walau tingkat kemiskinan berkisar di 10%, sebanyak 45% atau 115 juta penduduk Indonesia masuk ke kategori rentan miskin.

* Bank Dunia, 2021

1% Menguasai 67% Tanah Kita

Rasio ketimpangan kepemilikan dan penguasaan tanah saat ini: 0,67 artinya 67% tanah dikuasai sekitar 2,6 juta orang saja.

* Sumber: Kementerian ATR / BPN, 2020

Ranking Negara:

Kekayaan Pribadi Warga Negara

Peringkat	Warga Negara	Total Kekayaan Pribadi
1	Amerika Serikat	USD 126 triliun
2	Tiongkok	USD 74 triliun
3	Jepang	USD 26 triliun
4	Jerman	USD 18 triliun
5	Inggris Raya	USD 15 triliun
6	Perancis	USD 14 triliun
7	India	USD 12 triliun
8	Italia	USD 11 triliun
9	Kanada	USD 9 triliun
10	Australia	USD 9 triliun
11	Korea Selatan	USD 8 triliun
12	Spanyol	USD 8 triliun
13	Belanda	USD 5 triliun
14	Taiwan	USD 4 triliun
15	Swiss	USD 4 triliun
16	Meksiko	USD 3 triliun
17	Indonesia	USD 3 triliun

Sumber: Credit Suisse Global Wealth Databook, 2021 – Tabel 4-1



Distribusi Kekayaan Pribadi Rakyat Indonesia

Menurut Credit Suisse, total kekayaan pribadi yang dimiliki warga Indonesia berjumlah sekitar USD 3,1 triliun - sekitar Rp. 44.800 triliun.

Dalam tabel ini kita dapat melihat bagaimana kekayaan tersebut terdistribusikan ke 270 juta penduduk Indonesia, dari kelompok termiskin hingga terkaya.

Terlihat bagaimana 10% warga terkaya Indonesia memiliki 66% dari total kekayaan pribadi, dan 10% warga termiskin tidak memiliki apa apa. 10% warga termiskin malah memiliki utang.

Kelompok Warga	Porsi Kekayaan
Kelompok 1 (10% termiskin)	-0,1%
Kelompok 2	0,3%
Kelompok 3	0,6%
Kelompok 4	1,3%
Kelompok 5	2,2%
Kelompok 6	3,3%
Kelompok 7	5,1%
Kelompok 8	8,3%
Kelompok 9	12,8%
Kelompok 10 (10% terkaya)	66,2%

Sumber: Credit Suisse Global Wealth Report 2021



Hanya 1% Orang Indonesia Menikmati Kemerdekaan

Berhubungan erat dengan tantangan besar utama yang dialami oleh ekonomi kita, yaitu mengalir keluarnya kekayaan Indonesia ke luar negeri, adalah satu keadaan yang kita dapat sebut sebagai ketidakadilan ekonomi. Ketidakadilan ekonomi inilah yang menyebabkan rakyat kita terlalu banyak yang masih hidup dalam keadaan miskin, dan keadaan susah.

Menurut data BPS, *gini ratio* pendapatan warga Indonesia di tahun 2020 adalah 0,38. 1% orang terkaya mendapatkan 38% pendapatan di Republik Indonesia. Menurut riset lembaga keuangan Credit Suisse[17], di tahun 2021 angka *gini ratio* kekayaan warga Indonesia mencapai 0,36. 1% orang terkaya menguasai 36% kekayaan.

0,36 adalah ketimpangan kekayaan yang besar. Ketimpangan yang berbahaya. Ketidakadilan ekonomi ini jika dipantik dengan tepat dapat memicu konflik sosial, huru hara dan perang saudara yang berkepanjangan.

[17] Credit Suisse Global Wealth Databook, 2021

Ketidakadilan Ekonomi Sudah Terlalu Parah

Gini ratio, atau rasio gini adalah indikator utama kesenjangan kekayaan di suatu negara. Angka gini ratio kekayaan 0,36 artinya adalah 1% dari populasi terkaya di Indonesia memiliki 36% kekayaan Indonesia.

Jika populasi Indonesia ada 270 juta jiwa, artinya 36% kekayaan Indonesia dimiliki oleh 2,7 juta orang saja. 64% sisanya dibagi antara 267,3 juta jiwa.

Bahkan, baru-baru ada yang menghitung, harta kekayaan dari empat orang terkaya di Indonesia ternyata lebih besar dari harta 100 juta orang termiskin di Indonesia[18].

Angka gini ratio untuk kepemilikan tanah lebih mengkhawatirkan lagi. Lebih mengkhawatirkan, karena bagi saya kekayaan yang hakiki adalah kepemilikan tanah.

Data yang diungkapkan oleh Menteri ATR/BPN di 2020, gini ratio kepemilikan tanah kita di tahun 2020 mencapai 0,67. Artinya, 1% populasi terkaya di Indonesia, 2,6 juta orang, memiliki 67% tanah Indonesia. Harus diakui angka

[18] OXFAM dan INFID, 2017

ini sudah lebih baik dari sebelumnya karena akhir-akhir ini Pemerintah gencar membagikan sertifikat tanah,

Coba tanyakan ke keluarga dan kerabat saudara. Siapa diantara mereka yang memiliki tanah? Apakah saudara sendiri memiliki tanah? Ataukah saudara menyewa tanah tempat saudara saat ini tinggal? Apakah petani-petani kita masih memiliki tanah sendiri? Kalau iya, berapa rata-rata luas tanah yang mereka miliki? Apakah meningkat, atau menurun dibandingkan dengan 10, 20, 30 tahun yang lalu?

Data tahun 2020 dari Kementan, ada 35 juta orang Indonesia yang berprofesi sebagai petani[19].

Namun lebih dari 75% petani, atau lebih dari 28 juta petani tidak punya lahan sendiri[20]. Yang memiliki lahan sendiri hanya 9 juta petani, itupun luas lahannya kecil-kecil.

Ekonomi Indonesia Jakarta Sentris

Selain rasio gini, salah satu indikator kesenjangan ekonomi di Indonesia adalah data lokasi kegiatan ekonomi atau perputaran uang di dalam negeri.

[19] Pusat data dan sisten informasi pertanian, Kemtan 2020
[20] Konsorsium Pembaruan Agraria, 2016

Besar ekonomi Indonesia atau PDB pada tahun 2020 lalu adalah USD 1.058 miliar, atau sekitar Rp. 15.300 triliun jika menggunakan kurs satu dollar setara Rp. 14.500.

Sekitar 70% dari perputaran ekonomi sebesar Rp. 15.300 triliun berputar di Jakarta [21] . Sebagian besar sisanya berputar di kota-kota besar lainnya seperti Surabaya, Medan, dan Semarang. Hanya segelintir saja yang beredar di desa-desa di seluruh Indonesia. Itupun banyak terkonsentrasi di pulau Jawa.

Konsentrasi ekonomi di Jakarta dan pulau Jawa ini berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Infrastruktur seperti jalan raya, kereta dan listrik tidak tersedia dengan baik pedesaan dan di luar Jawa.

Bahkan, di kampung halaman saya, di Sulawesi Utara, mati listrik selama 6-12 jam masih menjadi hal yang lumrah di tahun 2019.

Yang patut menjadi perhatian kita semua, dan harus kita selesaikan dalam tempo cepat adalah soal gizi. Di NTT, dua

[21] INDEF, 2020

dari tiga anak mengalami stunting atau gagal tumbuh akibat malnutrisi[22]. Malnutrisi adalah bahasa halus dari kelaparan.

Di Jakarta, angka malnutrisi mencapai 1 dari 3 anak. Ini adalah fakta yang menyesakkan di tengah banyaknya gedung pencakar langit dan hotel-hotel mewah.

Ini berbahaya, karena artinya 1 dari 3 orang Indonesia tidak memiliki kesempatan bersaing yang sama. Anak yang kurang nutrisi akan sulit berprestasi di sekolah, dan setelah dewasa akan sulit mendapatkan pekerjaan yang berpenghasilan tinggi.

[22] Kementerian Kesehatan, 2020

Sejarah Mengajarkan,
Ketimpangan Bisa Picu Konflik Sosial

Saat ini sudah lebih dari 76% populasi Indonesia memiliki akses ke Internet[23]. Karena banyak dari 1% populasi kaya Indonesia yang mengumbar kekayaan di media sosial, ini artinya lebih dari 3/4 populasi kita bisa melihat secara gamblang ketimpangan kekayaan yang terjadi di Indonesia.

Ketika masih banyak rakyat yang susah makan, susah hidup layak, bahkan digusur dari rumahnya sendiri, rakyat bisa dengan mudah melihat ada kelompok kecil di Indonesia yang hidup mewah dan berlebih.

Berbicara tentang ketimpangan, saya ingin mengutip buku tulisan Niall Ferguson, judulnya *The Great Degeneration*.

Dalam buku ini, yang ditulis sebelum pandemic COVID 19, Niall mewawancara seribu pelaku ekonomi, CEO dari perusahaan-perusahaan besar di dunia. Kepada mereka, dia tanyakan, "menurut Anda, apa ancaman terhadap

[23] Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII), 2021

ekonomi dunia, terutama *emerging market* / negara berkembang?"

Mereka, seribu pelaku ekonomi, menjawab:

1. Inflasi
2. Pecahnya investasi aset
3. Korupsi
4. Radikalisasi
5. Bencana alam
6. dan pandemi penyakit seperti SARS

Sebagai contoh, kita bisa lihat sekarang, dengan instabilitas politik, pertumbuhan ekonomi Myanmar dan Afghanistan tersendat. Jika ada ketidakjelasan politik, sistem ekonomi tidak berjalan dengan baik.

Niall Ferguson ini seorang ahli sejarah. Selain menanyakan pandangan para pelaku ekonomi, dia juga menanyakan pandangan para ahli sejarah.

Para ahli sejarah yang ia wawancara mengatakan:

"Kalau semua yang dikatakan tadi ada, ditambah lagi kalau jumlah penduduk sebagian besar suatu negara adalah

orang muda antara 18 sampai 30 tahun, dan jika harga pangan naik, ancamannya adalah revolusi, huru-hara, perang saudara."

Niall mencatat, "ini sedang terjadi di Timur Tengah." Menurutnya apa yang disebut sebagai *Arab Spring* itu terjadi karena ada hal-hal ini. Instabilitas terjadi di Timur Tengah adalah akibat daripada ada faktor-faktor itu semua.

Menurut saya, kita harus bertanya kepada diri kita: Faktor-faktor ini, elemen-elemen ini ada tidak di Republik Indonesia saat ini?

Sekarang, kalau saja di setiap desa ada 10 anak putus sekolah, yang usianya antara 15 sampai 22 tahun. Kalau ada 10 anak di satu desa, dan kita punya 80.000 desa. Sepuluh kali 80.000, artinya ada 800.000 pemuda yang tidak mengerti dia harus bikin apa. Dia kasihan melihat ibunya, bapaknya. Di beberapa tempat dia mencari kayu untuk hidup. Dia mungkin juga ngarit rumput untuk bantu ternak ibunya. Tetapi, penghasilannya sangat minim. Pada usia yang sangat produktif, mereka harus punya cita-cita, punya harapan. Kalau mereka hidup tanpa harapan, ini kan

sesuatu yang rawan. Mereka bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang punya maksud-maksud yang tidak baik.

Inilah sebabnya, mengapa saya katakan kita harus waspada. Sejarah mengajarkan kepada kita bahwa huru hara, revolusi dan perang saudara dapat dipicu oleh tujuh hal:

1. Inflasi
2. Harga pangan naik
3. Ledakan penduduk
4. Pengangguran meningkat
5. Disparitas penghasilan
6. Radikalisme ideologi, dan
7. Korupsi.

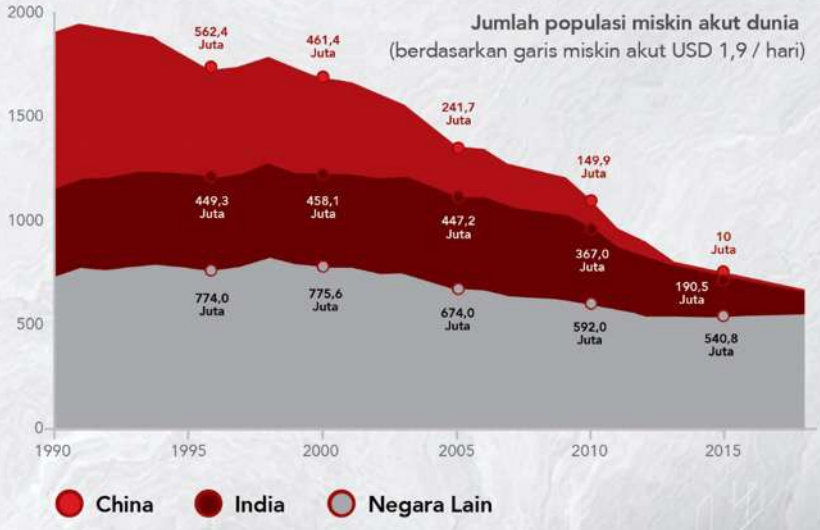
Hampir semuanya sekarang ada di Republik Indonesia. Karena gini ratio kita sekarang 0,36, jika ada pemantik yang tepat, Indonesia dapat terjerumus dalam huru hara, revolusi dan perang saudara yang berkepanjangan.

Kita harus waspada.

Belajar dari Negeri Tiongkok

Tahun 2021, bertepatan dengan 100 tahun Partai Komunis Tiongkok, mereka merayakan pengentasan kemiskinan akut atau *extreme poverty* di Tiongkok.

Keberhasilan ini dicapai dengan fokus negara menghadirkan pendidikan, infrastruktur dan intervensi ekonomi berkualitas untuk setiap warga miskin akut, miskin dan terancam miskin di Tiongkok. Termasuk juga mewajibkan lapis kepemimpinan tertinggi Tiongkok untuk tinggal dan bekerja di daerah-daerah termiskin negara tersebut sampai kemiskinan teratasi.



Sumber: CSIS China Project 2021, Angka dari Bank Dunia



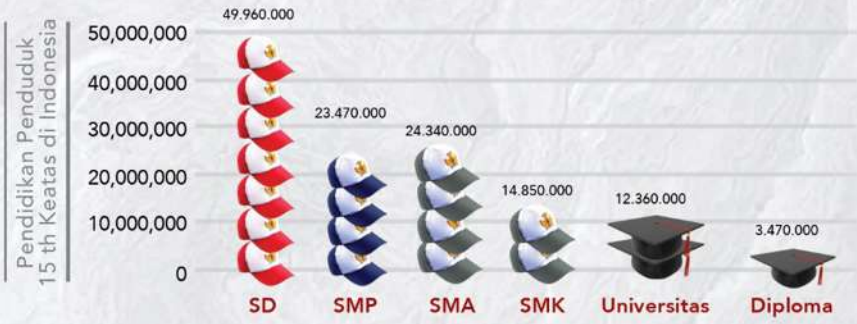
Kualitas SDM Indonesia



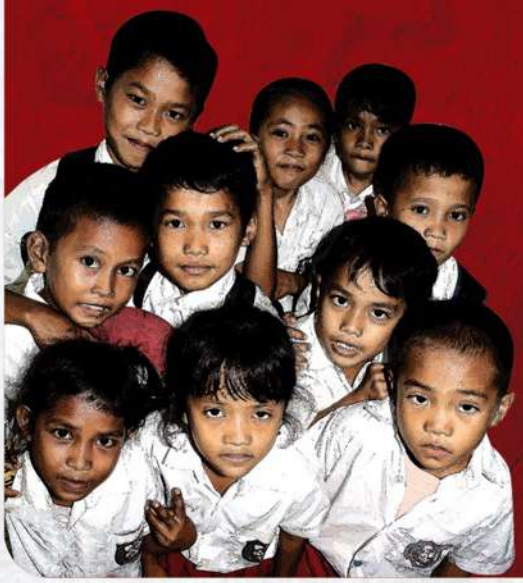
40% Angkatan Kerja Lulusan SD

50 juta orang atau hampir 40% angkatan kerja Indonesia (di atas 15 tahun) hanya menamatkan SD. 23 juta menamatkan SMP. Hanya 12 juta dari 128 juta angkatan kerja di Indonesia telah menyelesaikan kuliah.

*Badan Pusat Statistik, 2020



Bank Dunia: 55% *"Functionally Illiterate"*



Pelajar dengan hasil di bawah 2 dalam skor PISA (2015) dapat dikategorikan functionally illiterate / buta huruf fungsional - bisa baca tetapi tidak menguasai materai yang dibaca.

- 55% orang Indonesia *functionally illiterate*
- 14% orang Vietnam *functionally illiterate*, walau PDB per kapita mereka lebih rendah dari Indonesia

Perbandingan Jumlah *'functionally illiterate'*



Kualitas Pendidikan Indonesia



Kualitas Pendidikan No.74 dari 79

Kemampuan membaca, matematika dan sains anak Indonesia ranking 74 dari 79 negara di survei PISA* tahun 2018.

Survei PISA adalah indikator kualitas pendidikan di negara maju. Saat ini pelajar Indonesia 'underperform' di kemampuan berbahasa, matematika dan sains.

'Underperform' dalam berbahasa artinya pelajar tidak mampu menemukan gagasan utama dalam teks. Dalam sains, artinya pelajar tidak menguasai teori-teori dasar dan tidak mampu menjelaskan hasil kalkulasinya. Dalam sains, artinya pemahaman ilmu pengetahuan yang dimiliki pelajar terbatas sehingga hanya dapat diaplikasikan di situasi yang familiar atau telah diketahui.

* Programme for International Student Assessment, 2019

Survei PISA adalah indikator kualitas pendidikan di negara maju. Saat ini pelajar Indonesia 'underperform' di kemampuan berbahasa, matematika dan sains.

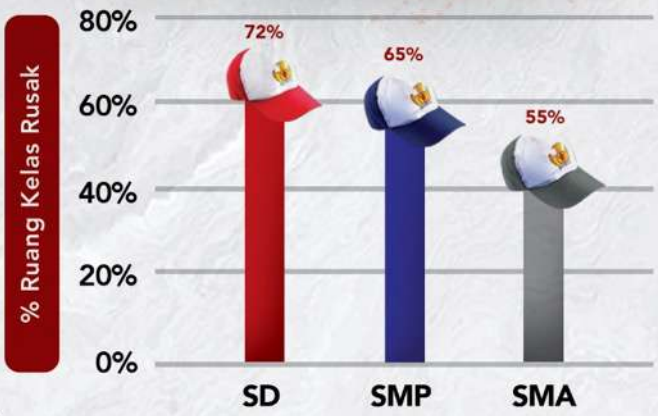
Kualitas Infrastruktur Pendidikan



2 dari 3 Ruang Kelas Rusak

72% ruang kelas SD, 65% ruang kelas SMP, dan 55% ruang kelas SMA dalam kondisi rusak*. Kondisi rusak menghambat kegiatan belajar mengajar dan prestasi pelajar kita.

* Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019





Gizi SDM Indonesia

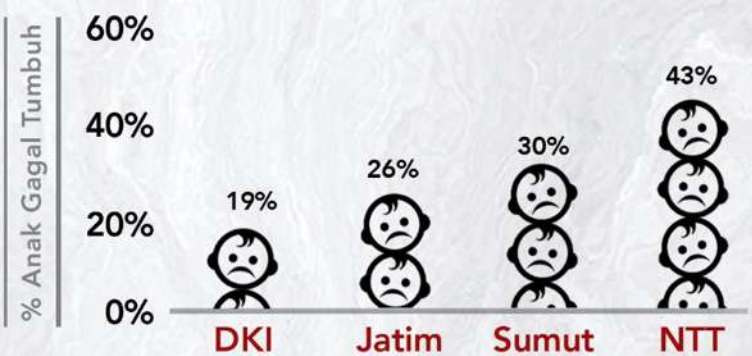


27% Anak Gagal Tumbuh

27% anak Indonesia mengalami gagal tumbuh (stunting) karena gizi buruk. Angka di NTT lebih parah: 43% anak NTT mengalami stunting.

Alhasil, nilai Indonesia di Indeks Kelaparan Global (GHI) adalah 21,9 atau salah satu yang tertinggi di dunia, setara dengan Kamerun dan Namibia yang jauh lebih miskin dari kita.

* Kementerian Kesehatan, 2020; Global Hunger Index, 2020



Konsumsi Buah & Sayuran 43% Standar WHO

Konsumsi buah dan sayuran orang Indonesia baru 180 gram per hari, jauh di bawah standar WHO 400 gram per hari.

* SEAFAST Center IPB, 2018



Fondasi Pembangunan #2:

Demokrasi oleh dan untuk Rakyat Indonesia



Demokrasi Kita Bisa Dikuasai Pemodal

Sekarang Indonesia berada dalam keadaan yang sangat rawan. Banyak pemimpin kita yang bisa disogok, bisa dibeli. Akhirnya banyak pemimpin terpilih tidak menjaga kepentingan rakyat, tidak mengamankan kepentingan rakyat, tetapi malah menjual negara kepada pemodal besar – bahkan kadang kepada bangsa lain.

Sepanjang hidup saya, saya sudah keliling ke semua kabupaten di Indonesia. Di tahun 2014 dan 2019 saja, saya berkesempatan berkeliling ke ratusan kota dan kabupaten.

Di mana-mana, rakyat mengaku sudah tidak tahan lagi. Terlalu banyak korupsi di Republik Indonesia ini. Banyak proyek dikorupsi, banyak orang disogok. Banyak pemimpin kita mau dibeli dan mau disogok. Akhirnya tidak ada keadilan ekonomi bagi rakyat Indonesia. Tidak ada keadilan politik bagi bangsa Indonesia.

Indonesia, menurut pendapat saya, sekarang ini ada di persimpangan jalan. Apakah cita-cita demokrasi ini akan di-*hijack*, akan disandera oleh para Kurawa?

Inilah pertaruhan kita saat ini. Perebutan antara Kurawa dan Pandawa. Mereka, para Kurawa, hidupnya didorong oleh keserakahan. Mereka sudah punya kekuasaan, sudah punya harta banyak, tetapi selalu ingin lebih.

"Persetan itu, jutaan orang yang tidak punya pekerjaan. Persetan itu, para pedagang kecil. Persetan mereka semua. Saya maunya hanya perjuangkan kepentingan saya. Kelompok saya, keluarga saya, dinasti saya." Demikian cara berpikir para Kurawa.

Dalam setiap perjuangan, ada Kurawa, ada Pandawa. Pandawa, *the good guys*, orang-orang yang baik, ada di mana-mana di Indonesia. Tetapi, saat ini jumlahnya saat ini belum banyak.

Saya disini menghimbau agar kekuatan rakyatlah yang bicara. Para Pandawa di Republik Indonesia tidak didukung oleh uang modal besar. Para Kurawa tidak suka dengan program para Pandawa. Kurawa tidak suka bahwa Pandawa

ingin memberdayakan orang yang lemah, orang yang miskin.

Mereka, para pemodal besar, ada yang dari bangsa kita sendiri dan bangsa asing. Mereka tidak suka pada keinginan mereka-mereka yang hendak mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara. Mereka suka Indonesia yang lemah. Mereka suka Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang lemah. Mereka ingin suatu pemerintahan boneka. Mereka ingin mengendalikan bangsa ini. Mereka ingin Indonesia dipimpin oleh pemerintah yang korup, oleh pemimpin-pemimpin dan pejabat-pejabat yang korup. Pemimpin-pemimpin yang bisa diatur oleh para Kurawa.

Peringatan Sukarno

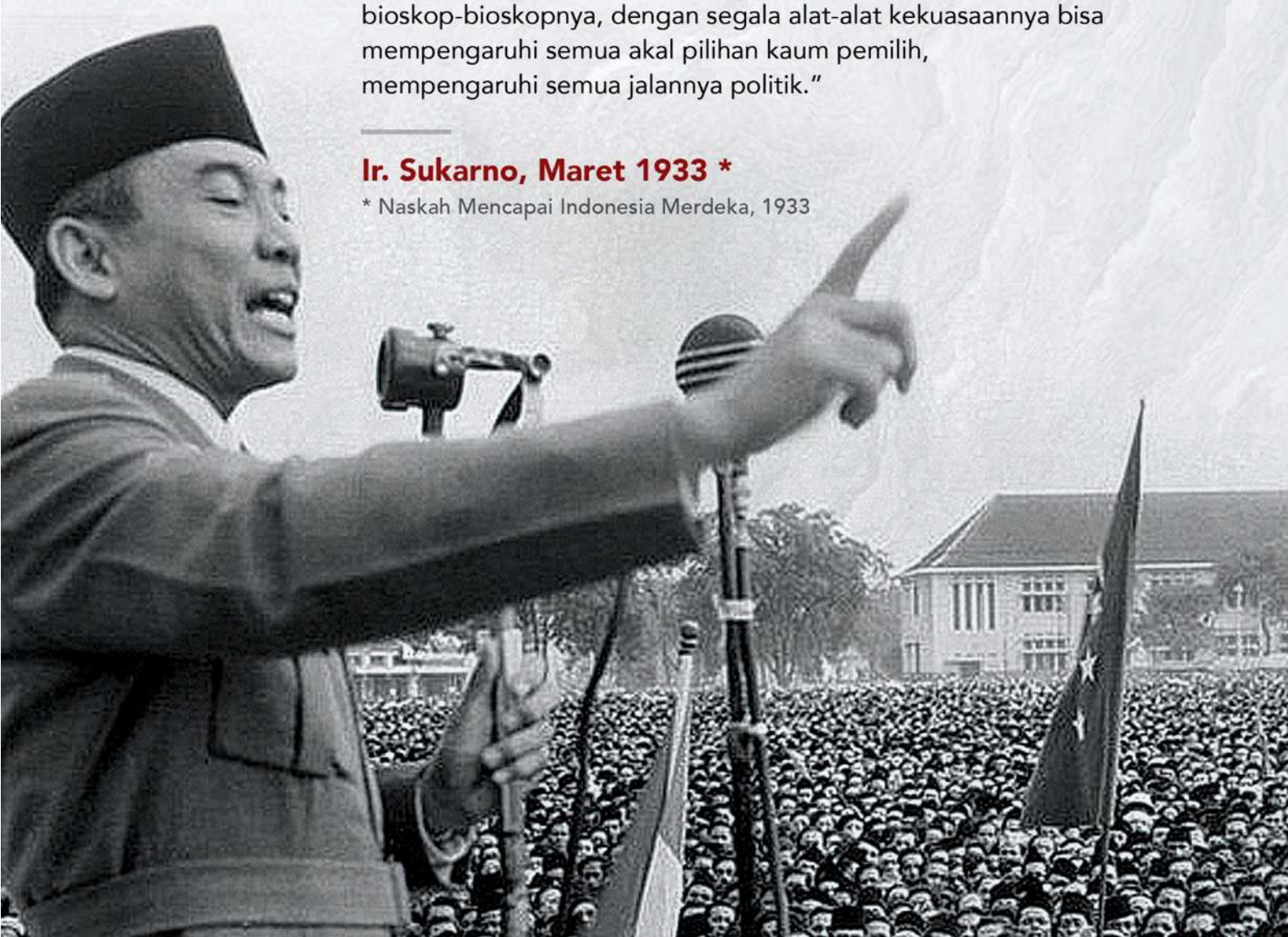
"Semua 'negeri sopan' kini mempunyai parlemen, semua 'negeri sopan' kini bersistem 'demokrasi'. Tetapi, di semua negeri-negeri sopan itu kini rakyat jelata tertindas hidupnya.

Demokrasi mereka bukanlah demokrasi kerakyatan yang sejati, melainkan suatu demokrasi burjuis belaka – suatu *burgerlijke democratie* yang untuk kaum burjuis dan menguntungkan kaum burjuis belaka.

Benar rakyat 'boleh ikut memerintah', tetapi kaum burjuis lebih kaya dari rakyat jelata, mereka dengan harta kekayaannya, dengan surat-surat kabarnya, dengan buku-bukunya, dengan bioskop-bioskopnya, dengan segala alat-alat kekuasaannya bisa mempengaruhi semua akal pilihan kaum pemilih, mempengaruhi semua jalannya politik."

Ir. Sukarno, Maret 1933 *

* Naskah Mencapai Indonesia Merdeka, 1933



Ada Suara Ada Harga



Rp. 11,8 Triliun untuk Beli Pengaruh di Seluruh Indonesia?

Jabatan	Tingkatan	Jumlah Jabatan	Biaya Kampanye
Kades	Desa	81.000	Rp.300 juta
Bupati	Kabupaten/Kota	416	Rp.20 miliar
Walikota	Kabupaten/Kota	98	Rp.20 miliar
Gubernur	Provinsi	34	Rp.200 miliar
Presiden	Nasional	1	Rp.5 triliun

Andaikata ada pengusaha yang ingin beli pengaruh dengan memodali biaya kampanye seluruh gubernur dan presiden, ia cukup mengeluarkan Rp. 11,8 triliun 'saja'.

* Angka di atas adalah taksiran penulis

Plesetan NPWP:

Nomor Piro Wani Piro

NPWP, atau 'nomor piro wani piro' marak utamanya karena tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah. Karena itu, saat ada kesempatan penulis selalu mengingatkan calon pemilih, 'ambil uangnya, jangan pilih orangnya'.



Kadang Pemimpin Bisa Dibeli Karena Uang Berkuasa di Pemilihan

Sesungguhnya, taruhan kita sangat besar. Sekarang kita merasakan bahwa masyarakat kita, bangsa kita sedang mengalami suatu penyakit yang mendalam. Setiap unsur masyarakat kita sudah rusak. Rusak moral, rusak mental.

Ya, setiap unsur di masyarakat kita, setiap tingkatan kepemimpinan sudah sarat dengan sogok-menyogok. Orang yang punya banyak uang atau dimodali banyak uang bisa membeli suara, membeli loyalitas, membeli ketaatan.

Sekarang banyak pemimpin kita, banyak pejabat kita bukan taat kepada Undang-Undang Dasar, bukan taat kepada kepentingan bangsa, tetapi taat kepada yang memberi uang.

Ini semua karena demokrasi yang kita laksanakan, demokrasi liberal yang kita laksanakan sekarang ini, membutuhkan biaya yang sangat besar.

Setelah 70 tahun lebih kita bernegara, setelah pendahulu-pendahulu kita dengan gagah berani menolak dijajah

kembali oleh kekuatan asing, sekarang bangsa Indonesia tetap dalam ancaman akan dijajah kembali.

Tetapi, sekarang mereka menjajahnya lebih lihai, lebih bagus, lebih halus, lebih licik. Mereka tidak kirim tentara, mereka cukup 'membeli' dan menyogok sebagian pemimpin-pemimpin kita.

Kita sadar dan mengerti, demokrasi adalah sistem yang terbaik dari sistem-sistem pemerintahan yang ada. Namun, demokrasi kita sekarang terancam. Demokrasi kita bisa disandera. Demokrasi kita bisa diperkosa. Demokrasi kita bisa dirusak dengan politik uang. Saat ini, uang yang mahakuasa.

Ya, dengan uang, bangsa kita bisa dijajah kembali. Pemimpin-pemimpin bisa dibeli. Hakim-hakim, politisi-politisi, anggota-anggota DPR, ketua-ketua partai kita banyak yang lemah dan bisa dibeli. Hampir semua lembaga bisa dirusak uang. Termasuk pemimpin-pemimpin agama kita, ada yang sudah mulai bisa dirusak uang.

Demokrasi sekarang adalah demokrasi yang punya uang.

Ini membahayakan demokrasi Indonesia. Ini berarti, mereka yang punya atau kuasai uang, mereka yang menguasai kedaulatan politik Indonesia.

Sekarang ini, setiap menjelang pilkada, saat pemimpin partai-partai di Indonesia menjaring calon pemimpin, inilah yang ditanyakan kepada para calon yang mendaftar di partai-partai. Termasuk di partai saya, Partai GERINDRA.

Yang ditanyakan bukan "kamu sekolahnya di mana?", bukan "ijazahmu apa?", bukan "pengabdianmu kepada negara bagaimana?".

Tetapi, yang ditanyakan adalah "kamu punya uang, tidak?"

Ada tokoh yang hebat, jujur, bersih, bijak, dan sudah mengabdi sekian puluh tahun, sebagai guru atau pegawai negeri, atau sebagai tentara atau polisi. Namun dia tidak bisa mengabdi lebih lanjut, karena pertanyaannya selalu, "kamu punya uang atau tidak?"

Akhirnya, bahayanya bagi bangsa Indonesia adalah nantinya semua akan ditentukan oleh mereka yang punya uang.

Ya, kalau yang punya uang warga negara kita yang setia kepada Pancasila. Tetapi kalau uang itu berasal dari uang haram, kalau uang itu berasal dari luar negeri, berarti kita dijajah dengan uang.

Karena itu, saya sering mengatakan, kita adalah bangsa yang ramah. Kita ingin bersahabat. Saya selalu katakan kepada teman-teman saya dari negara lain, "*I want to be your friend. I want to be your partner, but I can not be your peon.*"

Saya ingin jadi sahabatmu. Saya ingin jadi mitramu. Tetapi kalau kamu ingin saya jadi kacungmu, saya katakan, tidak!

Prabowo tidak bisa jadi kacung kamu. Indonesia tidak mau jadi kacung kamu. Kita mau jadi sahabatmu. Kita mau jadi kawanmu. Kita mau jadi mitramu, tapi kita tidak mau jadi kacung siapa pun di dunia. Saya tidak mau, ketika ada orang kaya melihat Indonesia di peta dunia, mereka melihat ada *price tag*, ada label harga yang menempel di peta negara kita karena sistem demokrasi liberal yang kita anut.

Pemilihan Kepala Desa: Sampai Rp. 1 miliar

Saya membaca, ada desa di Jawa Tengah, di desa itu calon kepala desanya keluar Rp. 1 miliar hanya untuk menjamu pemilih di rumahnya[24]. Tingkat kepala desa, habis Rp. 1 miliar untuk kampanye. Minimal, di daerah yang sama, perlu Rp. 700 juta untuk modal kampanye.

Jika saudara turun ke desa, setelah pemilihan kepala desa, coba saudara tanya, "Bapak pilih siapa?". Sekarang banyak yang menjawab, "saya pilih yang kasih 400 ribu, pak." Namanya pun dia tidak hafal. Pokoknya yang kasih 400 ribu.

Pemilihan kepala desa sekarang, satu suara bisa 400 ribu. Bahkan saya dengar, di banyak tempat bisa lebih. Apalagi untuk Pilkada tingkat Provinsi, dan Pilkada tingkat Kabupaten/Kota.

Di Pemilu serentak yang lalu, saya ingat, ada beberapa kader saya yang dengan semangatnya, "Pak, saya mau maju bupati. Saya mau maju gubernur."

[24] Riset Forum Komunikasi Mahasiswa dan Rakyat Demak (FKMRD), 2015

Saya tanya, “Anda ini punya kekuatan ekonomi, tidak?”, dijawab, “Pak, saya mau gadaikan rumah saya.”

Untuk politik, saya larang kader saya gadaikan milik mereka. Saya bilang, “Itu rumah urusan sama istri anakmu. Bisa saja kau kalah. Kalau kau kalah, rumah sudah tergadai, tanggung jawabmu kepada anak istrimu bagaimana?”.

Saya ingat, waktu itu saya bilang, “Anda mau maju di politik? Anda harus tahu, politik liberal ini membutukan biaya.”

Basisnya Partai GERINDRA adalah petani, nelayan. Orang-orang di kecamatan, di desa. Karena itu GERINDRA cepat berkembang, karena jaringan HKTI, KTNA dan sebagainya. Pemimpin-pemimpin GERINDRA banyak adalah pemimpin koperasi, mantan kepala desa. Penghasilannya sebulan dua juta. Dengan penghasilan sebulan dua juta, kalau dia harus bayar ojek sekali keluar desa, bayar ojek saja berapa? Untuk keluar desa dia saja, keliling saja dia mungkin sudah tidak sanggup secara ekonomi.

Ketika Ada Yang Tidak Bisa Dibeli: Divide Et Impera

Dalam sejarah politik di Indonesia, selalu ada politisi-politisi yang tidak arif. Politisi-politisi yang bisa dibeli, yang manut kepada pemodal, dan mengira politik adalah soal menang-menangan saja.

Namun ada juga, politisi-politisi yang memandang politik bukan sebagai ajang rebut-merebut demi memenangkan kepentingan golongan sendiri. Mereka adalah para pejuang politik yang memandang politik sebagai usaha bersama untuk memperbaiki kehidupan bangsa dan rakyat yang kita cintai.

Akhir akhir ini, kita sebagai bangsa dapat menyaksikan dengan mata kepala kita, ketika ada pejuang-pejuang politik yang seperti ini, kekuatan politik mereka diusrek-usrek. Organisasi mereka diganggu-ganggu, diobok-obok oleh pemodal besar dan para pionnya yang bermental kolonial, bermental imperialis.

Akhirnya, banyak dari mereka pun tumbang dan tersingkirkan dari gelanggang politik nasional.

Kita harus ingat, jangan kita lupa sejarah kalau dulu tokoh-tokoh bangsa kita sering selalu diadu domba. *Divide et impera.* Kalau dulu sultan lawan sultan, pangeran lawan pangeran, sekarang seringkali ketua umum partai lawan anak buah yang dibesarkan oleh dia sendiri namun dimodali oleh pemodal besar.

Karena itu sekarang saya ingatkan, bagi setiap kader bangsa, di partai manapun yang nasionalis, yang cinta tanah air, agar selalu waspada.

Jangan sampai tersingkir karena cara-cara licik seperti ini. Pastikan AD/ART organisasi aman dari upaya-upaya *hostile takeover*, pengambilalihan secara kasar karena uang.

KPK: Potensi Kebocoran APBN Sampai Rp. 2.800 Triliun Per Tahun



Sumber: Litbang KPK, April 2019

Darurat Korupsi



22
Gubernur di Dalam Penjara

Ada 22 gubernur, 122 bupati dan walikota yang dipenjara karena korupsi sepanjang tahun 2004-2021.

*** Komisi Pemberantasan Korupsi, 2021**

JUMLAH PEJABAT DI BUI KARENA KORUPSI

22 Gubernur

122 Bupati & Walikota

Pemda Minim Pengawasan

Minimnya pengawasan media dan masyarakat pada pemerintah daerah memungkinkan korupsi berjamaah dan oligarki menjamur di daerah.



Partai, Survei, Pemilih, dan Media Kadang Bisa Dibeli dan Dikuasai

Demokrasi kita dalam bahaya. Pertama, karena banyak pemimpin kita yang bisa dibeli. Kedua, karena banyak kelompok oligarki yang memiliki cukup banyak uang untuk membeli para pemimpin kita.

Ya, komprador-komprador dan kelompok oligarki yang ingin mengeruk keuntungan di Indonesia inilah yang mau, yang berkepentingan meng-*hijack* atau membajak proses demokrasi ini.

Jika saudara sudah lama jadi orang Indonesia, saudara tentu tahu ada uang ngarit, ada uang cendol, ada serangan fajar. Dengan kekuasaan dan uang mereka, mereka mau atur segalanya.

Kemudian yang lebih berbahaya, yang ingin saya ungkapkan adalah, manipulasi proses kotak suara yang adalah inti demokrasi kita. Ini yang bisa, dan pernah diselewengkan.

Kadang Survei Bisa Dipesan

Negara Indonesia sangat kaya. Kita bukan negara miskin. Kita punya semua sumber alam yang dibutuhkan untuk menjadi negara sejahtera.

Tetapi, masalahnya, sistem kita dirusak oleh suatu elite, suatu oligarki yang serakah. Oligarki yang serakah ini mau menguasai semua sumber ekonomi Indonesia, dan tega membiarkan sebagian besar rakyat Indonesia hidup dengan tidak layak. Mereka menguasai politik kita, pemerintahan kita, dengan banyak cara.

Sekarang yang banyak terjadi adalah manipulasi dan rekayasa. Hasil dari banyak polling, banyak survei yang bisa mempengaruhi pandangan masyarakat bisa dibeli dan dimanipulasi. Saudara pun bisa pesan survei, "bikin saya nomor satu." Kita tahu itu semua.

Yang cilaka adalah, adalah ketika ada lembaga survei bekerja untuk tiga orang. Ke si A, dia dapat duit, dia kasih nilai bagus. Si B, dikasih nilai bagus. Si C, juga dikasih nilai bagus. Kerja sekali, dapat tiga pemasukan. Sekarang banyak kreativitas. Kita bangsa yang kreatif.

Alhamdulillah, sekarang dengan media sosial, keberpihakan pada "konglomerat survei" kepada calon-calon tertentu dapat terlihat. Di Pemilu 2014 dan kembali lagi di Pemilu 2019 lalu, ada pelaku-pelaku survei yang secara terang-terangan di media sosial berkampanye untuk calon pasangan yang berhadapan dengan saya.

Namun kesadaran masyarakat akan praktek-praktek seperti ini masih rendah. Masih ada 24% masyarakat kita yang tidak punya akses ke Internet. Adalah tugas kita bersama untuk menyadarkan masyarakat agar jangan mudah percaya survei.

Di negara maju pun, survei bisa jadi alat penguasa. Misalkan, hampir semua lembaga survei di Amerika salah memprediksi siapa pemenang pemilu Presiden Amerika 2016. Hampir semua lembaga survei di Inggris Raya salah memprediksi Brexit di 2016. Menurut saya ini bukan kebetulan.

Kadang Daftar Pemilih Bisa Dipesan

Wujud utama demokrasi kita adalah pemilihan, adalah kotak suara. Mereka yang dapat memberikan suara ke kotak suara adalah warga negara Indonesia yang sudah

memiliki KTP. Setiap warga negara Indonesia memiliki satu suara di setiap pemilihan. Satu suara untuk Pemilu Legislatif tingkat Nasional dan tingkat Daerah. Satu suara untuk Pemilu Presiden. Satu suara untuk Pemilu Kepala Daerah.

Namun, di banyak pemilihan, pengalaman Partai GERINDRA yang ikut Pemilu sejak 2009, kita seringkali menemukan daftar pemilih tidak akurat. Kita menemukan banyak 'hantu' dalam daftar pemilih itu. Ada nama-nama yang berkali-kali disebut, di TPS yang berbeda-beda. Mereka bisa saja memilih beberapa kali, apalagi tinta yang digunakan untuk mencegah hal ini kadang bisa dihapus.

Ada juga nama-nama orang meninggal masih dalam DPT. Ini kita tahu semua. Di Pemilukada DKI 2012, jumlahnya belasan ribu. Di Pemilu 2014, jumlahnya jauh lebih besar. Bahkan ada lembaga riset yang mengatakan, potensinya sampai 20% jumlah pemilih[25]. Di Pemilu 2019 dan Pilkada 2020, masalah ini juga masih ada[26].

[25] Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), 2014
[26] Bawaslu, 2020; Perludem, 2020

Kadang Ada Kotak Suara Ajaib

Saya tahu, Prabowo Subianto tidak disukai oleh banyak elite Indonesia, karena dia rodo rodo bonek yang sampaikan masalah ini. Namun, saya ingat, saya tidak tahu kapan akan dipanggil Tuhan. Karena itu, sekalian saja, saya merasa harus singkap kepada rakyat apa yang menjadi kegelisahan saya.

Saya rasa tidak perlu saya paparkan secara detail di sini. Saudara bisa cek sendiri, bagaimana di Pemilihan Umum lalu, pernah ada pihak-pihak yang bisa membuka kotak suara tanpa mengikuti proses. Jika masih bisa berlangsung lagi, ini sangat berbahaya bagi kelangsungan demokrasi kita.

Kadang Media Juga Bisa Dipesan

Kita lihat sekarang, banyak sendi-sendi kehidupan bangsa kita, lembaga-lembaga negara kita, institusi-institusi yang penting untuk demokrasi kita, satu per satu tergoyahkan.

Ada hal-hal yang sudah jelas di depan mata tidak benar dan tidak adil, tetapi sebagian elite kita pura-pura tidak tahu. Media kita sekarang banyak dikuasai pemodal besar,

sehingga banyak masalah-masalah bangsa yang disebabkan oleh ulah pada pemodal besar yang tidak diliput, atau diliput dengan narasi yang jauh berbeda dengan apa yang sesungguhnya terjadi.

Ini berbahaya karena banyak masyarakat kita berharap kepada media untuk mendapatkan pencerahan, mendapatkan pengetahuan soal demokrasi kita. Masyarakat kita berharap media netral, tidak berpihak selain ke kepentingan bangsa, tidak menjadi propagandis kepentingan tertentu.

Saya angkat topi kepada media-media yang secara eksplisit menyatakan keberpihakan kepada partai politik, atau kandidat tertentu dalam sebuah pemilihan, atau isu politik tertentu. Apalagi jika pernyataan keberpihakannya diulang terus-menerus, sehingga masyarakat dapat mengetahui berita yang diterbitkan berat sebelah.
Jangan seolah tidak berpihak, seolah netral dan tidak bisa dibeli, tetapi menjerumuskan.

Kita harus ingat, *knowledge is power*. Pengetahuan adalah kekuatan. Karena itu, media kerap kali dijadikan senjata.

Sekarang kita sudah bisa buka dan baca, sebagian arsip rahasia negara-negara adidaya dari tahun 60an. Kita bisa baca sendiri, bagaimana mereka, dengan media yang mereka kuasai, pernah mempengaruhi pandangan masyarakat kita terhadap politik dalam negeri kita.

Bukan tidak mungkin, apa yang pernah dilakukan di masa lalu, terus berlanjut hingga sekarang. Amerika Serikat-pun mengalami 'gangguan' serupa di Pemilu mereka tahun 2016 dan 2020 lalu.

Kita Perlu Waspada Konsentrasi Kepemilikan Media



Nama Media	Milik	Media
RCTI, MNC TV, Global TV, iNews	MNC Group	TV
Trans TV, Trans7, CNN Indonesia	Trans Corp	TV
SCTV, Indosiar	Surya Citra Media	TV
TV One, ANTV	Viva Group	TV
Metro TV	Metro TV Group	TV
Koran Tempo, Majalah Tempo	Tempo Group	Cetak
Jawa Pos	Jawa Pos Group	Cetak
Kompas, Jakarta Post	Gramedia Group	Cetak

93% Masyarakat Menonton Televisi

Jauh berbeda dengan tahun 2015 di mana baru 41% rumah tangga Indonesia terhubung Internet, sekarang penyebaran informasi melalui Internet terutama melalui aplikasi pesan sudah naik ke angka 73%. Walau ini baik dari sisi melawan oligarki media, namun masyarakat harus waspada upaya disinformasi dari pihak-pihak yang tidak terlihat.

* Badan Pusat Statistik, 2020

Solusi Paradoks Indonesia

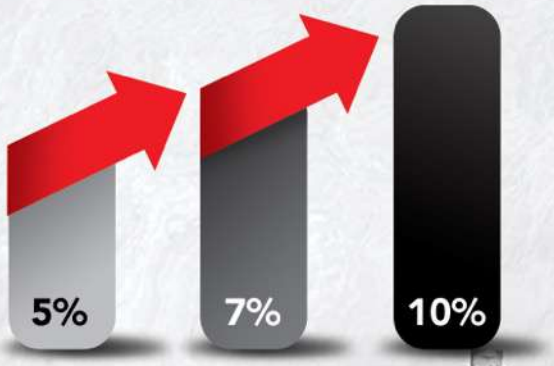
Menuju 100 Tahun Indonesia Merdeka



Investasi untuk Pertumbuhan 10%

Untuk meningkatkan aktivitas ekonomi sebuah negara dibutuhkan investasi utamanya untuk: Meningkatkan kapasitas produksi, dan menyediakan infrastruktur pendukung investasi.





Untuk mencapai pertumbuhan PDB 5,4 - 6% / tahun, butuh investasi Rp. 5.800 s/d Rp. 5.900 triliun / tahun

Menteri Bappenas dan Menteri Investasi, 2021

Artinya, rata-rata dibutuhkan investasi:

Target Pertumbuhan	Kebutuhan investasi / tahun
1%	~ Rp. 1.000 triliun
5%	~ Rp. 5.000 triliun
7%	~ Rp. 7.000 triliun
10%	~ Rp. 10.000 triliun

Sumber: Hitungan pendekatan

Sumber Investasi

- Pemerintah (APBN)
- BUMN
- BUMD
- Swasta Domestik
- Swasta Asing

Sektor Investasi Pertumbuhan 10%

Mengingat jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar, dan tingkat PDB per kapita yang masih rendah (USD 3.800 per warga per tahun - 1/3 dari Malaysia), kita perlu fokuskan investasi pada bidang-bidang yang dapat menyerap tenaga kerja atau bidang-bidang padat karya.

Sektor ekonomi	Jumlah pekerja saat ini
 ▶ Pertanian, Kehutanan, Perikanan	40 juta orang 30% pekerja Indonesia
 ▶ Perdagangan	25 juta orang 20% pekerja Indonesia
 ▶ Pengolahan	18 juta orang 14% pekerja Indonesia

Sumber: BPS, 2021 – Angka dibulatkan

Ini Potensi Negara Kita

Saya mengikuti proses politik, karena hanya melalui politik kita bisa mengubah keadaan. Politik bagi saya adalah keinginan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Itu arti yang baik dari politik. Keinginan memperbaiki kehidupan rakyat.

Walaupun kita menghadapi banyak kesulitan, saya melihat Indonesia masih ada harapan. Kekayaan alam kita begitu luar biasa. Dengan manajemen yang tepat, kita bisa cepat bangkit.

Potensi Kita: Pangan dan Agro Industri

Pangan adalah masalah hidup-mati suatu bangsa. Kita bisa hidup tanpa gedung-gedung pencakar langit. Kita bisa hidup tanpa mobil-mobil. Namun kita tidak bisa hidup tanpa pangan, tanpa beras, tanpa jagung, tanpa singkong, dan sebagainya.

Jadi, kita sebagai bangsa harus memandang pangan ini strategis. Siapa pun yang mau memimpin negara ini, harus

memandang pangan ini sangat strategis. Dari dulu saya anjurkan ke pemerintah, ke penguasa, ke partai-partai yang sedang berkuasa, untuk fokus kembangkan sektor pertanian. Jangan kita tergantung pada impor pangan, supaya bangsa kita tidak tergantung pada siapa pun. Kalau kita tergantung impor, begitu mata uang kita melemah, akan sangat mahal beli barang impor dan rakyat bisa tidak makan.

Kita punya lahan cukup banyak, kita punya ekosistem dan iklim yang sangat cocok untuk pertanian. Yang jelas kita ini negara tropis. Indonesia menempati sepertiga dari zona tropis dunia. Kita negara yang zona tropisnya paling luas kedua setelah Brasil. Brasil lebih luas dari kita sedikit.

Di zona tropis, kita bisa tiga kali panen setahun. Kalau negara-negara *temperate*, negara-negara yang non-tropis, hanya bisa satu kali. Karena ada enam bulan musim dingin, jadi hanya bisa satu kali panen. Kita bisa tiga kali. Ini keunggulan kita.

Sebagai contoh, sebuah pohon yang tumbuh di negara *temperate* butuh 25 tahun untuk besar. Baru bisa ditebang setelah 25 tahun. Bahkan ada yang baru bisa ditebang

setelah 27, 30 tahun. Di negara kita, 5 tahun bisa ditebang. Jadi, keunggulan kita, 5 kali dari negara di luar zona tropis.

Dari dulu, bangsa-bangsa lain datang ke kita, dan mengambil kekayaan kita. Apa yang diambil? Mereka ambil produk-produk pertanian. Rempah, karet, teh, kopi kita. Kan begitu?

Kita memiliki keunggulan yang tidak dimiliki bangsa-bangsa lain. Kita harus manfaatkan keunggulan ini. Ketahanan dan kekuatan ekonomi kita berada di sektor pertanian dalam arti luas. Pertanian, perikanan, kehutanan. Inilah yang seharusnya kita fokus kelola dengan telaten, dengan teliti, dengan komprehensif. Tidak kita serahkan semua ke pasar.

Situasi Pertanian Indonesia Saat Ini



1 dari 5 di Sektor Agrikultur

1 dari 5 orang Indonesia bekerja di sektor agrikultur. 20% dari seluruh angkatan kerja Indonesia bekerja di sektor ini.

* Kementan, 2020

Situasi Sekarang vs Seharusnya

Tahapan	Dikerjakan Oleh	Nilai Tambah Untuk	Dikerjakan Oleh	Nilai Tambah Untuk
Pertanian	Petani	Petani	Petani	Petani dan Rakyat Kecil
Pengolahan	Perusahaan Swasta	Pengusaha Bermodal Besar	Koperasi, BUMDES & BUMN	
Pengepakan				
Pendistribusian				
Penjualan	Supermarket		"Gerai Tani"	

14 Juta Hektar Menganggur

Menurut KLHK, ada 34 juta hektar kawasan hutan tak berhutan. Dari 34 juta hektar, 14 juta hektar adalah lahan tidak produktif (belukar) dan tidak bertuan.

* Kementerian LHK, 2017

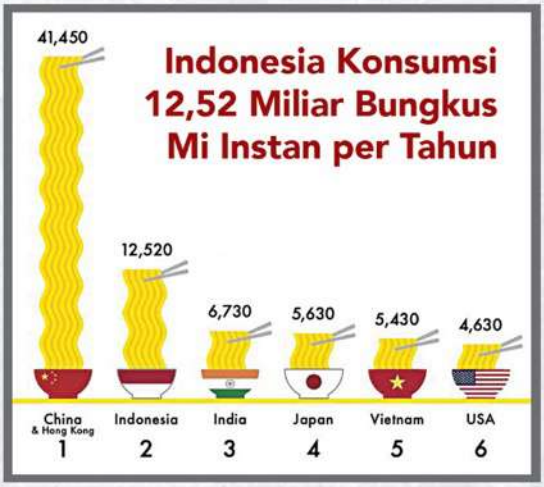


Singkong dan Tepung Singkong

Sudah waktunya Indonesia memiliki produk agro industri unggulan



Namun bahan baku mi kita impor dari luar negeri, rata-rata jumlah impor USD 2,5 miliar atau Rp. 35 triliun per tahun. Indonesia saat ini adalah pemakan mi terbesar kedua di dunia.





Bangsa kita memiliki keunggulan dalam budidaya singkong, dan memiliki paten Modified Cassava Flour (MOCAF) yang dapat menggantikan tepung terigu sebagai bahan baku mi setidaknya hingga 40%.

Potensi Kita: Pasar Domestik Yang Besar

Dengan populasi 270 juta orang, dan jumlah 'kelas menengah' 20% populasi atau sekitar 50 juta orang[27], Indonesia adalah pasar yang sangat besar dan menarik.

Dengan jumlah yang demikian besar, sebenarnya hampir semua industri bisa berkembang pesat walau hanya menjual produk dan jasanya untuk pasar Indonesia. Misalkan, setiap orang Indonesia butuh pakaian. Jika 50 juta orang membeli satu saja celana setiap tahun, dan jika harga celana Rp. 100.000 saja, ini sudah bisnis Rp. 5 triliun. Jika bisa untung 10%, ada keuntungan Rp. 500 miliar. Ini baru celana saja. Belum bicara pakaian lain.

Saking besarnya pasar domestik Indonesia, kita bisa melihat bagaimana saat ini banyak perusahaan asing berlomba-lomba untuk masuk dan jual produk mereka di pasar kita.

Saya tidak anti asing. Mereka boleh menjual produk dan jasa di Indonesia. Tetapi kita harus bisa bersaing dengan mereka. Jika jual celana, Pemerintah harus pastikan orang

[27] Bank Dunia, 2020

Indonesia juga bersaing jual celana Jangan sampai pasar dimonopoli oleh kekuatan ekonomi besar.

Saya percaya, kualitas produk-produk Indonesia tidak kalah jika dibandingkan dengan produk asing. Saat ini kita sudah punya sepeda buatan Indonesia. Kapal laut buatan Indonesia. Senjata buatan Indonesia. Bahkan senjata buatan PINDAD kerap unggul di kompetisi internasional. Ini bukti konkrit kemampuan industri kita.

Mewujudkan Ekonomi Konstitusi

Jika saudara pernah belajar ilmu ekonomi, saudara tentu tahu kalau ada banyak mazhab ekonomi di dunia ini. Ada mazhab ekonomi yang disebut neoklasikal, pasar bebas, dan neoliberal. Ketiga ini sering dikelompokkan sebagai mazhab ekonomi Adam Smith. Kemudian ada mazhab sosialis, atau mazhab ekonomi Karl Marx.

Dalam perjalanan sejarah, ada yang mengatakan, "Indonesia harus memilih A". Ada juga yang bilang, "sebaiknya kita pakai B". Pertentangan ini ada sampai sekarang.

Kalau saya berpendapat, "Lho, kenapa kita harus memilih?". Kita mau ambil yang terbaik dari kapitalisme, dan yang terbaik dari sosialisme.

Gabungan yang terbaik dari keduanya inilah yang disebut oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, oleh bapak saya Prof. Sumitro, sebagai ekonomi kerakyatan, atau ekonomi Pancasila, yang bentuknya tertulis di Undang-undang Dasar '45, khususnya di pasal 33. Boleh juga kita sebut 'ekonomi konstitusi'.

Setelah 1998, Kita Keliru

Saya ingin menggugah sekarang, bahwa setelah ’98 saya kira kita keliru. Setelah ’98, sebagai bangsa, kita melupakan jati diri kita. Kita tinggalkan pasal 33 Undang-undang Dasar ’45, kita tinggalkan ekonomi Pancasila.

Di situlah perjuangan saya selama belasan tahun ini. Menggugah, membangkitkan lagi kesadaran, mengingatkan ajaran-ajaran Bung Karno: berdiri di atas kaki kita sendiri.

Ini yang saya kira fundamental, dan banyak kita lupakan. Kita percaya globalisasi, kita percaya katanya sekarang sudah tidak ada perbatasan, *borderless world*.

Namun coba Anda mau ke Amerika. Anda tidak bisa masuk tanpa visa. Kadang orang Indonesia tidak dikasih visa. Berarti ada border. Akhir-akhir ini banyak orang mau ke Australia lewat laut kita, namun kapal-kapal perang Australia menahan. Jadi, walau sekarang kita banyak berdagang, *border* tetap ada. Karena itu kita harus punya kekuatan sendiri.

Ingatlah, nasionalisme bukan hal yang jelek. Nasionalisme adalah cinta bangsa sendiri. Kalau bukan kita yang mencintai bangsa kita, siapa? Apa kita harus minta dikasihani bangsa lain?

Nasionalisme juga bukan sesuatu yang hina. Semua bangsa membela kepentingan nasional bangsa mereka. Kenapa bangsa Indonesia tidak boleh membela kepentingan kita? Kenapa petani kita tidak boleh dibantu negara?

Contoh, dalam bidang pertanian, petani Amerika dibantu negaranya. Petani Australia dibantu negaranya. Petani Vietnam dibantu negaranya. Petani Thailand dibantu negaranya.

Kalau kita bilang, "kita mau dong, kepentingan nasional kita harus dijaga." Kadang kita dibilang, "wah, kamu anti asing." Tidak. Saya katakan, kita tidak boleh anti asing. Dunia sudah semakin sempit, dan tradisi bangsa Indonesia adalah bangsa yang terbuka. Kita bersahabat, tetapi kita harus kuat dan bisa mandiri.

Kemandirian dan kemampuan suatu negara dalam memproduksi berbagai barang di dalam negeri sekarang

dapat dinilai dalam sebuah indeks yang dinamakan *index of economic complexity* – indeks kompleksitas ekonomi.

Adalah Professor Ricardo Hausmann dari Harvard University yang juga mantan Menteri Perencanaan Venezuela yang menemukan korelasi sangat kuat antara kesejahteraan sebuah negara dengan kemandirian dan kemampuan suatu negara dalam memproduksi berbagai barang di dalam negeri.

Artinya resep IMF di tahun 1998 yang mematikan banyak industri kita sangat keliru dan harus kita tinggalkan jauh-jauh. Kita harus segera membuat apa-apa yang bisa kita buat di dalam negeri sendiri. Kita harus punya industri kapal, industri mobil, industri pangan, industri sandang, industri senjata, industri segala kebutuhan pokok dan industri-industri pengolahan barang-barang *intermediate*. Dengan ini, kompleksitas ekonomi kita akan meningkat dan Rupiah bisa menguat.

Resep Keliru IMF Tahun 1998



Tidak Boleh Punya Industri

Dukungan pemerintah kepada industri-industri strategis seperti industri agro, dan pengembangan industri penerbangan (IPTN) harus dihentikan.

Serahkan Rupiah ke Pasar

Nilai tukar rupiah harus seluruhnya diserahkan ke pergerakan pasar, BUMN harus dijual dan lajur perdagangan luar negeri harus dibuka lebar.

Sumber: MoU / Kesepakatan Indonesia & IMF, 1998

Nilai Rupiah Kita

Pelemahan VS Dollar AS

3.684.000%





Di tahun 1949, 1 Rupiah sama dengan 1 Gulden Belanda, yang harganya sama dengan 3,8 Dollar AS. Nilai tukar Rupiah sekarang, Rp. 14.000 per $ 1 sama dengan 14.000.000 Rupiah lama (redenominasi 1965). Dari 3,8 ke 14.000.000 adalah pelemahan 3,6 juta persen

*** Cato Institute, 2015; Bank Indonesia, 2020**



Mata uang itu cermin dari produktivitasa suatu bangsa. Kalau produktivitas kita kuat, mata uang kita akan mapan. Selama kita tidak produktif, selama itu mata uang kita tidak akan kuat, dan selama itu ekonomi kita akan menjadi bancakan bangsa lain.

Tujuan Kita:
Ekonomi Konstitusi, Bukan Sosialisme

Sosialisme murni, walaupun bagus dalam tulisan, sebenarnya tidak bisa dijalankan. Karena, dalam sosialisme murni, ada asas sama rasa sama rata yang tidak mungkin dijalankan. Jika dijalankan, nanti orang tidak ada yang mau kerja keras.

Ya, dalam sosialisme murni, orang kerja keras dan tidak kerja keras bergaji sama. Orang pintar dan orang tidak pintar bergaji sama. Orang mau belajar dan tidak mau belajar bergaji sama.

Bahkan dalam utopia sosialis, di ujungnya tidak ada uang. Tidak boleh ada uang. Bagaimana? Ini kan utopia. Impian. Susah dilaksanakan, dan terbukti negara-negara yang coba jalankan sistem sosialis murni gagal di mana-mana.

Artinya, bapak-bapak kita, Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir benar. Yang tepat adalah ekonomi campuran.

Bapak saya di meja makan selalu bercerita. Istilah Prof. Sumitro adalah ekonomi campuran, *mixed economy*. Yang

terbaik dari kapitalis, dan yang terbaik dari sosialis, ini yang kita pakai.

Kalau kita baca sejarah Indonesia, dulu pernah ada keputusan untuk menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Ekonomi kita harus berasaskan kekeluargaan. Intinya, yang kuat monggo, tetapi yang lemah harus ditarik. Nanti akan ada suatu *equilibrium*, ada keseimbangan.
Tidak benar, ekonomi yang berasaskan "yang kuat harus selalu menang, yang lemah, ya terserah". Paham kapitalisme murni seperti itu. *Greed is good*, keserakahan bagus. Hasilnya, yang lemah akan mati.

Kalau dalam paham kapitalisme murni, nanti yang sejahtera, yang hidupnya bagus, mapan, dan aman, hanya 1% dari penduduk. Bahkan mungkin 1% dari yang 1%. Hanya beberapa keluarga saja yang benar-benar kaya.

Ini yang terjadi sekarang di Indonesia, yang juga terjadi di Barat. Di Barat pun sudah banyak yang mempertanyakan. Dulu banyak yang percaya *trickle down effect*. Ekonomi menetes ke bawah. Kenyataannya, yang terjadi adalah *trickle up effect*. Mereka yang kaya, semakin kaya – sementara mereka yang miskin semakin miskin saja.

Kalau kita, yang harus kita jalankan adalah mazhab ekonomi jalan tengah. Mazhab ekonomi campuran, atau kata mantan PM Inggris Tony Blair "ekonomi jalan ketiga", "*the third way*". Atau, istilah tahun '45, kembali ke Bung Karno, Bung Hatta, mazhab "ekonomi kerakyatan".

Sekarang kalau kita ke Vietnam, sering terlihat ada mural di pinggir jalan bertuliskan "*economy for the people, not people for the economy*". Ekonomi harus untuk rakyat, bukan rakyat untuk ekonomi. Orientasi kita harus seperti itu.

Kalau sekarang kita ternyata keliru, kita harus berani banting haluan. Kita sekarang harus kembali ke cetak biru yang dibuat oleh Founding Fathers, Para Pendiri Bangsa kita, yaitu Undang-undang Dasar '45.

Saya katakan demikian, karena di Undang-undang Dasar '45 pasal 33 yang asli sudah sangat gamblang: Bahwa ekonomi kita tidak menggunakan mazhab pasar bebas, tetapi berasaskan kekeluargaan.

Kemudian, ayat 2 dari pasal 33 sangat gamblang lagi. Bahwa semua "cabang-cabang produksi yang penting harus dikuasai negara". "Menguasai hajat hidup orang" dikuasai oleh negara.

Selanjutnya, "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Inilah rancang bangun ekonomi kita. Inilah sistem yang seharusnya kita jalankan – ekonomi konstitusi. Kalau kita konsekuen menjalankan, seperti sekarang Tiongkok konsekuen menjalankan konstitusi mereka, saya kira mengalirnya kekayaan alam kita ke luar, mengalirnya kekayaan nasional kita ke luar yang saat ini terjadi, akan bisa kita hentikan.

Paham Ekonomi Konstitusi:
Bebas Boleh, Tetapi Harus Waspada

Seperti tadi saya sampaikan, ekonomi kita harus ekonomi tengah, ekonomi campuran, ekonomi konstitusi. Jangan full kapitalis, jangan full sosialis.

Kita harus ambil yang terbaik dari kapitalisme. Kapitalisme mendorong inovasi. Kapitalisme mendorong *entrepreneurship* / kewirausahaan, dan mendorong investasi.

Kapitalisme harus diimbangi dengan pengamanan rakyat banyak. Kalau kapitalisme murni, yaitu melepaskan semua hal ke pasar, akibatnya adalah apa yang sekarang kita alami. Di ekonomi bebas, tidak ada perlindungan, tidak ada harapan untuk orang miskin.

Sosialisme menjamin adanya jaring pengamanan untuk orang paling miskin. Pemerintah, pada saat-saat yang kritis memang harus intervensi. Pemerintah negara mana pun yang ingin mengurangi kemiskinan harus menjadi pemerintah yang aktivis, yang berani turun membantu mereka yang di bawah garis kemiskinan, karena mereka

tidak berdaya. Jika tidak ada keberpihakan, mereka akan terus tidak punya kemampuan, pendidikan, keterampilan, bahkan gizi saja kurang.

Namun, kita tidak bisa membagi-bagi uang tanpa ada pendidikan, tanpa ada pelatihan, tanpa ada manajemen, tanpa ada pendampingan. Harus ada strategi. Inilah yang dimaksud *nation building*, pembangunan negara. Kalau kita masih di taraf *nation building*, pemerintah harus aktif mengarahkan rakyat.

Mazhab Ekonomi Menetes ke Bawah?



Paus Francis

Joe Biden

Christine Lagarde

"Beberapa orang masih saja membela teori 'menetes ke bawah'. Mereka lugu dan tidak waspada. Seperti perintah "kita tidak boleh membunuh", sekarang kita harus mengatakan "kita tidak boleh menjalankan" kebijakan ekonomi yang eksklusif dan tidak adil."

Paus Francis, 23 November 2013

"Sistem ekonomi 'menetes ke bawah' meningkatkan kesenjangan pendapatan, menciptakan ketidakadilan di hampir semua negara. Ketika yang kaya semakin kaya, kekayaan tidak menetes ke bawah."

Direktur IMF Christine Lagarde, 23 Juni 2015

"Paham ekonomi menetes ke bawah tidak pernah bekerja. Orang kaya semakin kaya. Sekarang waktunya membangun ekonomi dari bawah."

Joe Biden, 29 April 2021

4 Alasan Kenapa Sebuah Negara Dapat Gagal



1

Tidak memiliki rekam sejarah

↓

Tidak tahu apa tantangan yang harus dihadapi

2

Belajar dari sejarah

↓

Tahu tantangan yang harus dihadapi

↓

Tapi memilih untuk mengabaikan

3

Belajar dari sejarah

↓

Tahu tantangan yang harus dihadapi

↓

Tapi tantangan yang dihadapi ternyata berbeda / lebih besar

4

Belajar dari sejarah

↓

Tahu tantangan yang harus dihadapi

↓

Tapi tidak punya kemampuan menghadapi tantangan

Sumber data : Collapse: How societies choose to fail or succeed oleh Jared Diamond

Paham Ekonomi Konstitusi: Pemerintah Harus Jadi Pelopor

Kalau pakai paham ekonomi konstitusi, maka soal pembangunan, soal pertanian, soal pembangunan prasarana, soal menciptakan lapangan kerja, dan soal mengurangi kemiskinan, pemerintah harus proaktif. Pemerintah harus jadi pelopor.

Dalam membangun ekonomi, menyelamatkan negara, membangun kemakmuran, dan mengurangi kemiskinan, pemerintah harus jadi pelopor. Pemerintah tidak boleh hanya menjadi wasit.

Ini bedanya paham neoliberal dan paham ekonomi konstitusi.

Paham neoliberal, paham neoklasikal, mungkin bagus untuk Barat sekarang. Tetapi, kita harus sadar, banyak negara Barat sudah "500 tahun" di depan kita.

Pendapatan per kapita di negara-negara Barat yang maju sudah di atas USD 30.000, USD 40.000, bahkan USD 50.000. Kita baru di kisaran USD 4.000.

Bagi para pengikut paham neoliberal, seperti Milton Friedman, Von Hayek, Thatcher, mereka berpendapat, "*the least government is the best government.*" Semakin sedikit peran pemerintah, semakin bagus. Pemerintah harus di belakang. Pemerintah wasit saja. Pemerintah tidak boleh ikut dalam proses ekonomi.

Kalau kita ikuti paham ini, siapa yang mau bikin waduk? Apakah swasta mau bikin waduk? Siapa mau bikin terminal, siapa mau bikin pelabuhan, terutama di tempat-tempat yang terisolasi?

Swasta tidak akan mau. Jangka waktu balik modal pembangunan infrastruktur terlalu lama untuk swasta. Karena itu sekarang lihat di Indonesia, sebagian besar pembangunan di sekitar Jakarta. Pabrik-pabrik besar adanya di sekitar Jakarta. Siapa swasta yang mau bangun pabrik di Halmahera atau di Gunung Mas? Karena dari itu, pemerintah harus jadi pelopor ekonomi.

Kita negara besar. Jika ada yang sudah kuat, silakan. Saya kira pemerintah tidak perlu terlibat dalam industri bioskop, umpamanya, atau industri ayam goreng, atau buka kedai

kopi. Tapi pemerintah harus mendidik pemuda-pemuda Indonesia yang putus sekolah dan tidak memiliki pekerjaan. Untuk mereka, pemerintah harus intervensi dengan berani. Kalau perlu hulu sampai hilir. Anak-anak itu dilatih, diberi keterampilan, dan didampingi sampai mereka bisa produktif.

Ini bukan pekerjaan yang ringan. Untuk petani kita, kalau perlu pemerintah bantu dari benih. "Ini benihnya, ini caranya menanam, ini caranya mengairi, jumlah air segini, jangan terlalu banyak. Ini pupuknya. Nanti panennya begini. Nanti setelah kamu panen, saya beli dari kamu. Saya yang pasarkan, sampai masuk ke supermarket yang paling hebat kualitasnya."

Kalau perlu, Pemerintah yang ambil alih resiko pertanian dari petani, dan jalankan pertanian secara korporasi agar petani dapat sejahtera, dan Pemerintah mendapatkan *economies of scale* dari usaha pertanian skala besar. Skala industri.

Kalau pemerintah tidak bantu, mereka selamanya tidak bisa bersaing karena posisi petani kita saat ini terlalu lemah. Ini argumen saya. Sebetulnya ini bukan argumen yang baru.

Banyak negara sudah melaksanakan. Tiongkok, Malaysia, Thailand, Taiwan, dan India sudah melakukan ini.

Tidak ada cara lain untuk membuat rakyat yang lemah dapat bersaing dan punya harapan. Pemerintah harus membantu. Apalagi untuk pangan, karena pangan adalah *strategic commodity*. Pangan bukan sekadar *economic commodity*. Pangan adalah *strategic commodity*, komoditas strategis untuk kepentingan bangsa dan negara.

Sejarah dunia, yang saya pelajari, sejarah antarbangsa, itu kejam. Pimpinan negara asing tidak ada urusan, dia hanya memikirkan kepentingan nasional negara dia.

Tidak ada negara yang akan mengutamakan kepentingan bangsa lain. Ucapannya mungkin beda, mungkin manis, tetapi dia pada akhirnya akan selalu mengutamakan kepentingan dia, kepentingan negaranya.

Karena itu, salah satunya saya selalu katakan bahaya kalau soal makan tergantung impor. Makan tidak boleh tergantung impor. Kita tidak boleh menganggap bahwa negara-negara asing sayang pada Indonesia. Kita tidak bisa menggantungkan urusan perut bangsa kita ke bangsa lain.

“Oh, gampang, kalau kita kurang makan, nanti kita impor dari Vietnam, atau dari Thailand.”

Beberapa tahun yang lalu Thailand sudah bikin kontrak dengan kita, untuk sekian juta ton beras. Namun, Thailand kena musibah kebanjiran. Sawah-sawahnya banjir. Terpaksa tidak bisa memenuhi komitmen dia.

Akhir-akhir ini pun, banyak negara menghentikan ekspor pangan karena pandemi COVID 19. Mereka mementingkan pemenuhan pangan di dalam negeri dulu, baru ekspor ke luar.

Semua negara bisa kena bencana alam, bisa perang, bisa pandemi. Thailand pernah kebanjiran, 70% sawahnya banjir, puso. Rusia pernah kebakaran sampai ladang-ladang gandumnya terbakar, tidak bisa ekspor gandum. Harga gandum naik, harga jagung naik, harga beras naik. Dibandingkan dengan angka tahun 2002, indeks harga bahan makanan dunia di bulan November 2020 sudah naik 97%[28].

[28] Food Price Index, tahun 2002: 53,1. November 2020: 105,0. FAO, 2020

Bayangkan. Ini sudah fenomena, gejala yang sudah kita ingatkan berkali-kali. Perdagangan bebas boleh, tetapi harus dikendalikan Pemerintah, dan harus selalu waspada.

Tugas Kita:
Hentikan Kebocoran dan Dorong Produksi Bangsa

Nasib bangsa kita harus kita raih sendiri. Kalau kita tidak berani memperbaiki keadaan kita, kondisi negara kita akan semakin parah. Karena itu, di buku ini saya sampaikan kepada saudara, apa-apa saja yang menjadi tugas kita bersama.

Pertama, kita harus menyelamatkan kekayaan negara. Kita harus hentikan mengalirnya kekayaan negara ke luar negeri supaya kita punya uang untuk membangun pabrik-pabrik dan mendorong produksi nasional. Kalau kita terus biarkan kekayaan kita mengalir ke luar, suatu saat kita akan kehilangan sumber daya untuk memperbaiki semuanya.

Kita perlu punya pabrik mobil buatan Indonesia. Karena kita punya cadangan nikel terbesar di dunia, sekalian kita buat pabrik mobil listrik. Orang Indonesia beli satu juta mobil tiap tahun. Masa satu pun tidak ada mobil milik Indonesia?

Kita juga perlu punya pabrik motor milik Indonesia. Kita perlu punya pabrik pesawat terbang Indonesia. Kita sudah punya PTDI, dan kita harus perkuat. Kita perlu perkuat pabrik kereta api buatan Indonesia. Kita perlu perkuat pabrik kapal-kapal buatan Indonesia.

Dengan mendorong produksi bangsa, anak-anak Indonesia akan punya punya pekerjaan yang baik, yang layak, yang terhormat. Kita tidak mau anak-anak kita jadi kuli-kuli seterusnya.

Inilah inti dari strategi ekonomi yang saya sampaikan dalam buku ini: Mendorong produksi bangsa. Mendorong produktivitas bangsa. Produksi bangsa berarti barang untuk keperluan pasar Indonesia dihasilkan oleh rakyat Indonesia, di Indonesia, dengan bahan-bahan Indonesia.

Kalau pasar lain mau beli, Alhamdulillah. Saya juga ingin kita ekspor barang-barang produksi Indonesia ke luar negeri.

Kalau produksi kita kuat, kalau kita tidak banyak impor, kalau kita menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomis, terutama pangan, pakaian, kebutuhan-kebutuhan pokok, energi, ini kan *value*? Berarti mata uang kita dengan

sendirinya akan menguat. Orang akan mencari, orang akan membeli rupiah.

Mata uang itu cermin dari produktivitas suatu bangsa. Kalau produktivitas kita kuat, mata uang kita akan mapan.

Kalau kita lihat periode tahun 2003-2013, nilau tukar mata uang kita cukup stabil, selama sepuluh tahun. Kenapa? Karena ekspor kita kuat. Tapi, ekspor kita pada tahun-tahun itu mengandalkan bahan baku, mengandarkan komoditas.

Namun sayang, sepuluh tahun itu ketika kita ada *profit*, ada keuntungan, tidak dimanfaatkan untuk banting setir memperkuat produksi. *Value add, processing*.

Tetapi, saya masih sangat optimistis. Kita punya kekuatan fundamental, kita punya kekuatan inheren. Hanya manajemennya harus cepat dan cerdas. Bangsa Indonesia sudah terlalu banyak menghambur-hamburkan kesempatan.

Dengan strategi nasional yang tepat, saya yakin Indonesia bisa punya kekuatan industri yang dihormati. Kita akan

punya produk-produk industri yang dihormati. Dan pada ujungnya, Rupiah kita bisa kuat.

Tugas Kita:
Jadikan BUMN Ujung Tombak Ekonomi

Menurut saya, untuk hal-hal yang strategis, pemerintah harus pakai BUMN sebagai ujung tombak. BUMN sebagai implementer. Banyak negara bisa. Singapura bisa. Tiongkok dengan 150.000 BUMN-nya bisa bisa. Kita juga harus bisa.

Untuk itulah, BUMN-BUMN kita perlu merekrut manajer-manajer, insinyur-insinyur, direksi-direksi yang kapabel.

Tidak mungkin tidak ada orang-orang handal di Indonesia. Apakah kita tidak percaya kepada bangsa kita sendiri? Yang banyak orang-orang yang tidak diberikan kesempatan.

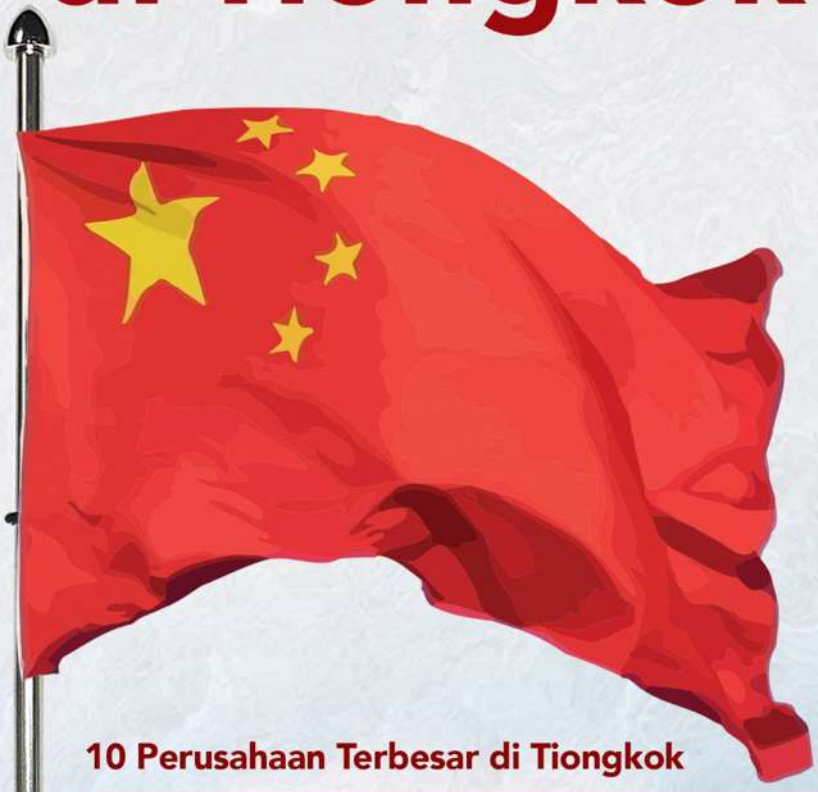
Saya kembali, pengalaman saya di tentara. Ada sebuah adagium, sebuah ajaran klasik, di semua tentara di seluruh dunia. Ajarannya adalah *"there are no bad soldiers, only bad commanders"*.

Tidak ada prajurit yang jelek, yang ada hanya komandan-komandan yang jelek. Yang ada hanya pemimpin-pemimpin yang jelek. Kalau dipimpin dengan baik, saya yakin anak-anak muda, profesional-profesional kita bisa. Saya yakin, dan saya sudah buktikan berkali-kali.

Sebagai contoh, bangsa Indonesia bukan bangsa yang punya salju. Ada salju di puncak Gunung Jayawijaya, tapi rakyat kita rata-rata belum pernah bertemu salju. Tapi, waktu saya bikin tim untuk masuk ke Himalaya, anak-anak kita yakin bisa sampai ke puncak, dan mereka tidak kalah dari bangsa-bangsa yang sudah punya salju dan punya gunung seperti di Eropa.

Kita berlatih hanya tiga bulan. Banyak pendaki negara lain yang berlatih tiga, empat tahun tetapi gagal mencapai puncak Everest. Tiga bulan berlatih, putera-putera Indonesia bisa sampai di puncak dunia, dan jadikan Indonesia bangsa Asia Tenggara pertama yang berhasil.

Peran BUMN di Tiongkok



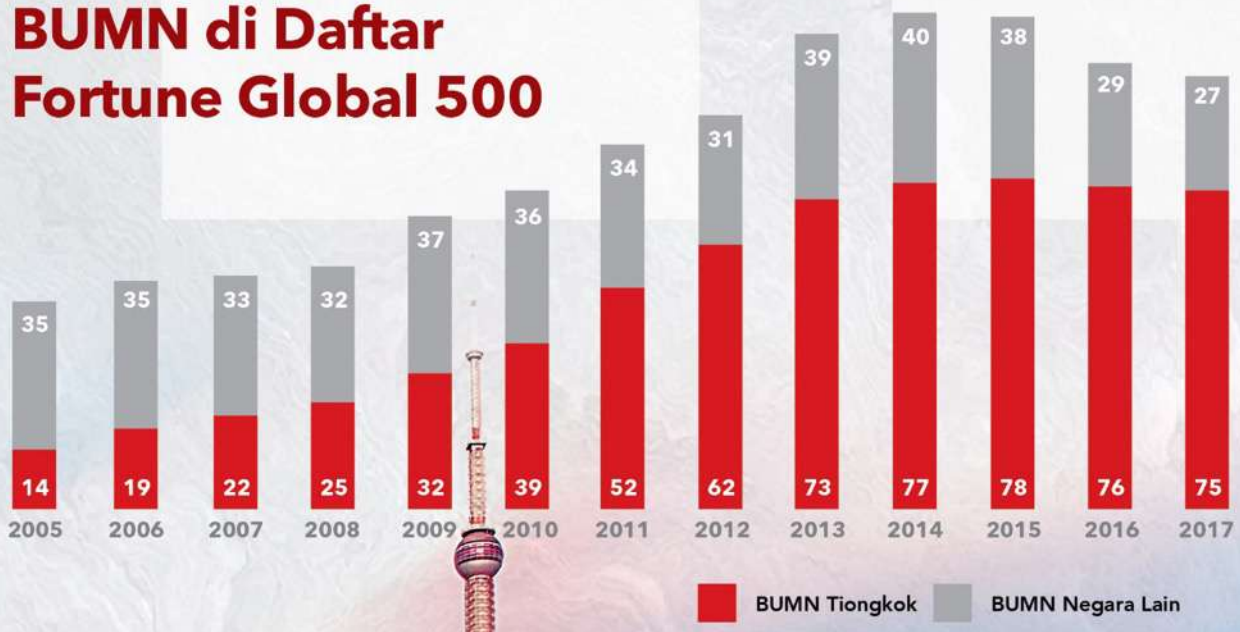
Jumlah Perusahaan Tiongkok di daftar Fortune Global 500 perusahaan terbesar di dunia: 143 perusahaan, dari jumlah ini 82 perusahaan adalah BUMN. Total ada 150.000 BUMN di Tiongkok.

Sebagai perbandingan, jumlah perusahaan Indonesia di daftar Fortune Global 500 perusahaan terbesar di dunia: 1 Perusahaan, yaitu Pertamina.

10 Perusahaan Terbesar di Tiongkok

BUMN Tiongkok	Ranking di Fortune Global 500	Pendapatan per tahun	Status Perusahaan
State Grid	2	USD 390 milyar	BUMN
China National Petroleum	4	USD 280 milyar	BUMN
Sinopec Group	5	USD 280 milyar	BUMN
China State Construction Engineering	13	USD 230 milyar	BUMN
Ping An Insurance	16	USD 230 milyar	Swasta
Industrial & Commercial Bank of China	20	USD 180 milyar	BUMN
China Construction Bank	25	USD 170 milyar	BUMN
Agricultural Bank of China	29	USD 150 milyar	BUMN
China Life Insurance	32	USD 140 milyar	Swasta
China Railway Engineering Group	35	USD 140 milyar	BUMN

BUMN di Daftar Fortune Global 500





Tugas Kita: Kekayaan Alam Indonesia Harus Diolah di Indonesia

Kekayaan alam Indonesia harus diolah di Indonesia. Kenapa? Karena kita bisa tambah pendapatan negara dari mengolah kekayaan alam kita yang sekarang banyak kita jual mentah. Karena mentah, karena belum diolah, kita jual murah. Kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan nilai tambah dari bahan alam kita.

Bahkan, saya mendapat laporan, jika dihitung selama 30 tahun, kehilangan nilai tambah karena ekspor konsentrat tembaga bisa mencapai USD 108 miliar. Untuk gas alam, karena jual mentah selama 30 tahun, kita kehilangan kesempatan nilai tambah USD 225 miliar. Dua komoditas ini saja, sudah USD 333 miliar atau Rp. 4.329 triliun yang tidak kita olah[29].

Sebagai contoh, konsentrat tembaga. Pada tahun 2015 lalu kita ekspor konsentrat sekitar 3 juta ton dengan harga USD 1.499 per ton[30]. Dari ekspor ini kita dapat USD 4,5 miliar. Padahal jika kita olah di dalam negeri jadi tembaga, emas, perak, asal sulfat dan slag, kita bisa dapat USD 8,1 miliar[31].

[29] Dewan Pakar Partai Gerindra – Rauf Purnama, 2017
[30] Kementerian Perdagangan, 2016
[31] Dewan Pakar Partai Gerindra – Rauf Purnama, 2016

Kita hilang kesempatan dapat nilai tambah USD 3,6 miliar, sekitar Rp. 46,8 triliun setiap tahun.

Contoh, lain gas alam. Pada tahun 2015 lalu, kita ekspor gas alam sejumlah 3.100 MMSCD atau 20 juta ton. Kita jual USD 7 per MMBtu[32]. Total kita dapat USD 7,2 miliar. Padahal kalau kita olah terlebih dahulu jadi methanol, olefin dan ammonia, kita bisa dapat USD 14,7 miliar. Lebih dari dua ratus persen pendapatan kita naik, jika kita lakukan pengolahan.

Ini masalah besar, tapi juga kesempatan besar. Sudah kita biarkan keuntungan ekspor kita hilang, kita juga tidak mau olah sumber daya alam kita. Kalau kita olah di dalam negeri, kita bisa menjadi negara sangat kaya. Kita akan menjadi negara mungkin keenam terkaya di dunia.

Saat ini Presiden Joko Widodo sudah menerapkan larangan ekspor untuk nikel – salah satu komoditas unggulan kita. Walaupun digugat oleh World Trade Organization, Presiden bersikukuh bahwa larangan ekspor nikel adalah kebijakan yang benar. Ini adalah kegigihan yang harus kita pertahankan. Lebih baik kita ekspor baterai mobil listrik,

[32] MMBtu = *one million British Thermal Units*, satuan yang umum digunakan untuk menghitung kuantitas gas alam.

atau mobil listrik, jangan ekspor nikel mentah untuk diolah negara lain.

Selain nikel, Presiden Joko Widodo juga mendorong hilirisasi untuk bauksit, tembaga, rotan, CPO dan berbagai produk unggulan Indonesia lainnya. Kekayaan alam Indonesia memang harus diolah di Indonesia.

Potensi Ekonomi

Hilirisasi Nikel

Indonesia adalah negara dengan cadangan nikel yang sangat besar. Saat ini dunia membutuhkan nikel dengan jumlah yang banyak untuk memproduksi baterai, utamanya untuk baterai mobil listrik.

Sudah sepantasnya Indonesia tidak mengekspor biji nikel, tetapi memproses biji nikel di dalam negeri menjadi baterai dan mobil listrik.



Kemenkomarves, 2021



Potensi Ekonomi

Hilirisasi Tembaga

Selain nikel, Indonesia juga memiliki cadangan tembaga yang sangat besar. Cadangan tembaga ini sebaiknya diolah di dalam negeri.

Sebagai contoh:

Jika diolah jadi berbagai produk, 3 juta ton konsentrat tembaga yang kita ekspor tiap tahun dapat berikan pendapatan Rp. 105,3 triliun. Tapi, karena kita jual tanpa diolah, kita hanya dapat Rp. 57,2 triliun. Artinya kita berikan lebih dari Rp. 46 triliun nilai tambah untuk orang lain*. Tambahan Rp. 97,5 triliun juga kita bisa dapatkan dari penjualan 20 juta ton gas alam kita, jika kita olah dulu jadi methanol, olefin dan ammonia sebelum kita jual ke luar negeri.

* Kajian Dewan Pakar Partai Gerindra, Rauf Purnama 2017



Tugas Kita: Jadikan Koperasi Alat Pemerataan & Motor Swasembada

Koperasi adalah alat pemerataan. Koperasi adalah alat untuk memperkuat yang lemah. Karena itu, peran koperasi dalam ekonomi kita harus kita digalakkan lagi.

Namun, ini tidak berarti koperasi kita besarkan dan swasta kita lemahkan. Tidak. Paham ekonomi konstitusi adalah, swasta silakan. Go, swasta, BUMN, koperasi, berlomba kamu, maju!

Namun, pihak yang lemah dibantu atau diberdayakan melalui koperasi. Inilah sebetulnya mazhab itu. Jadi, bukan saling bertentangan. Malah kita harus bergerak sejajar.

Jadi, swasta, BUMN, koperasi, bisa menarik ekonomi bangsa ke depan. Masing-masing dengan kekuatannya. Sebetulnya itu yang kita lihat dilaksanakan di Korea, dilaksanakan di Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Tiongkok.

Koperasi di Indonesia kita pernah jadi sorotan kekaguman bagi bangsa-bangsa lain. Mereka belajar ke kita, belajar tentang BIMAS, belajar tentang BULOG, belajar tentang swasembada dari kita.

Kalau dipimpin dengan baik, saya percaya, saya optimistis koperasi di Indonesia bisa benar-benar besar dan bisa menjadi alat pemerataan.

Benar, akan ada tantangan, dan akan ada kegagalan.

Sebagai contoh, saya mau bicara soal produksi dan distribusi pupuk. Pupuk kan dibuat oleh pabrik pupuk milik negara, milik rakyat? Yang bikin pabrik pupuk itu uang rakyat. Modal kerjanya uang rakyat. Tapi, begitu pupuk dihasilkan, dan didistribusi, distributornya perusahaan swasta. Kalau zaman Pak Harto, zaman Orde Baru, tidak. Yang distribusi pupuk adalah koperasi, koperasi unit desa (KUD).

Karena koperasi dianggap tidak sesuai dengan asas pasar bebas oleh beberapa orang, diganti jadi swasta. Dengan swasta, PT-PT yang dikasih, akhirnya, ya kita tahulah di Indonesia, kan? Nepotisme.

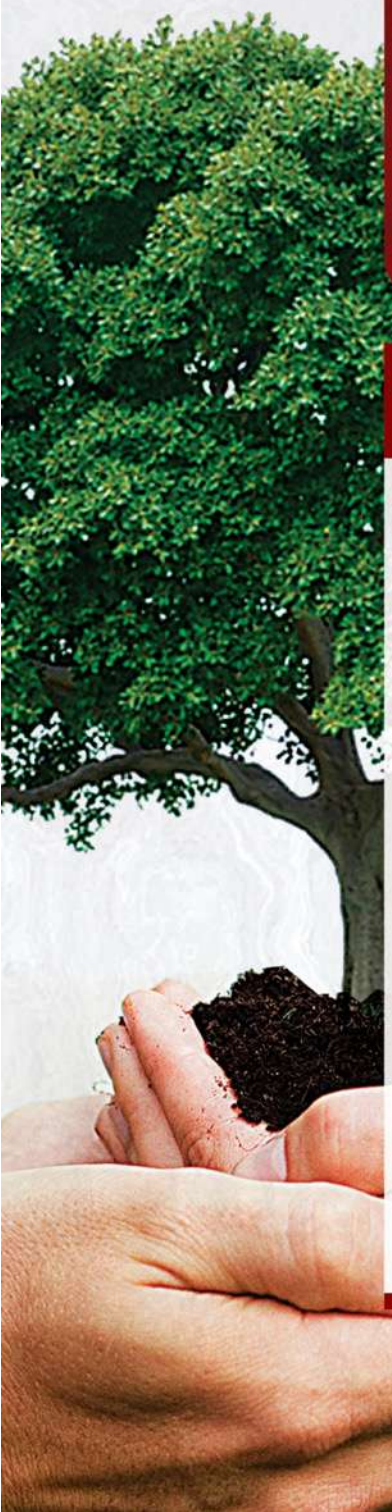
Yang ditunjuk sebagai distributor rata-rata keluarga pejabat. Keluarganya direktur perusahaan, atau keluarganya direktur BUMN, atau keluarganya gubernur,

bupati, atau keluarganya pemimpin partai yang berkuasa, atau yang berpengaruh.

Jadi, kita harus kembali ke fundamental, ke asas-asas yang benar. Ini barang rakyat, pabrik rakyat, dibangun dengan uang rakyat, modal kerja dari APBN, uang rakyat, distribusinya harus juga oleh rakyat. Yaitu, melalui koperasi, dan melalui pemerintah kalau perlu.

Selain jadi alat pemerataan, koperasi juga bisa jadi motor swasembada kita. Namun untuk itu harus ada pengerahan tenaga, pikiran, usaha yang sangat sungguh-sungguh. Kita tidak bisa anggap ini adalah pekerjaan biasa. Ini bukan pekerjaan biasa. Kita harus anggap ini sebagai suatu usaha nasional.

Koperasi Kita Saat Ini



200 Ribu Koperasi Skala Kecil

Saat ini Indonesia memiliki lebih dari 200.000 koperasi*, namun hampir seluruhnya skala kecil dan hanya 1 koperasi yang masuk ke daftar 300 koperasi terbaik International Cooperative Alliance.

Koperasi	Aset (Rp.)	Volume Usaha (Rp.)
Kospin Jasa Pekalongan	7,03 triliun	4,60 triliun
Kopdit Lantang Tipo	2,59 triliun	1,79 triliun
Kisel Jakarta	1,09 triliun	5,77 triliun
KSP BMT Sidogiri	2,24 triliun	2,04 triliun
Kopdit Pancur Kasih	2,01 triliun	1,31 triliun
Mandiri Healthcare Jakarta	2,03 triliun	2,10 triliun
KSP Sejahtera Bersama Bogor	2,05 triliun	1,04 triliun
KWSG Semen Gresik	1,20 triliun	2,64 triliun
Kopdit Keling Kumang	1,28 triliun	781 miliar
Kop Astra Internasional Jakarta	974 miliar	636 miliar

* Kementerian Koperasi dan UKM, 2020

Koperasi Terbesar Dunia

Menurut laporan World Cooperative Monitor, 300 koperasi terbesar di dunia memiliki volume usaha sebesar USD 2 triliun, atau sekitar Rp. 30.000 triliun rupiah.

Sektor	Nama Koperasi	Negara	Volume Usaha (USD)
Pertanian	Zen noh	Jepang	41 milyar
	Nonghyup	Korea Selatan	38 milyar
	CHS Inc.	Amerika Serikat	31 milyar
Industri	Corporación Mondragón	Spanyol	13 milyar
	Basin Electric Power Cooperative	Amerika Serikat	2 milyar
	SACMI	Italia	1 milyar
Perdagangan Eceran	REWE Group	Jerman	55 milyar
	ACDLEC-E Leclerc	Perancis	42 milyar
	Edeka Zentrale	Jerman	37 milyar
Asuransi	Zenkyoren	Jepang	51 milyar
	Nippon Life	Jepang	48 milyar
	State Farm	Amerika Serikat	42 milyar
Layanan Keuangan	Groupe Crédit Agricole	Perancis	51 milyar
	BVR	Jerman	29 milyar
	Groupe BPCE	Perancis	25 milyar
Pendidikan dan kesehatan	Health Partners Inc.	Amerika Serikat	6 milyar
	Fundación Espriu	Spanyol	2 milyar
	Unimed	Brazil	1 milyar

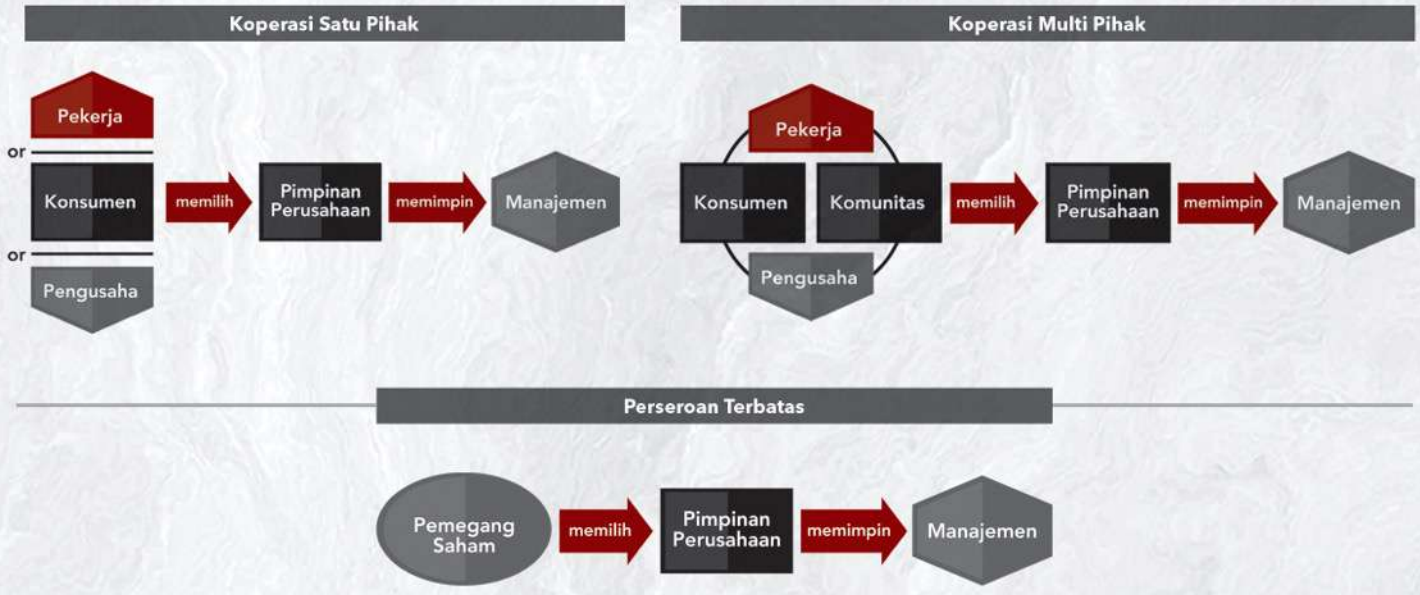
Dari Kapitalisme "Pemegang Saham" ke Pemangku Kepentingan

Agar tercapai pemerataan dalam investasi, diperlukan perubahan haluan dari "*shareholder capitalism*" yang menjadi dasar dari kapitalisme murni, ke "*stakeholder economy*" yang memperkuat semua pihak dalam ekonomi tersebut – tidak hanya pemilik modal.

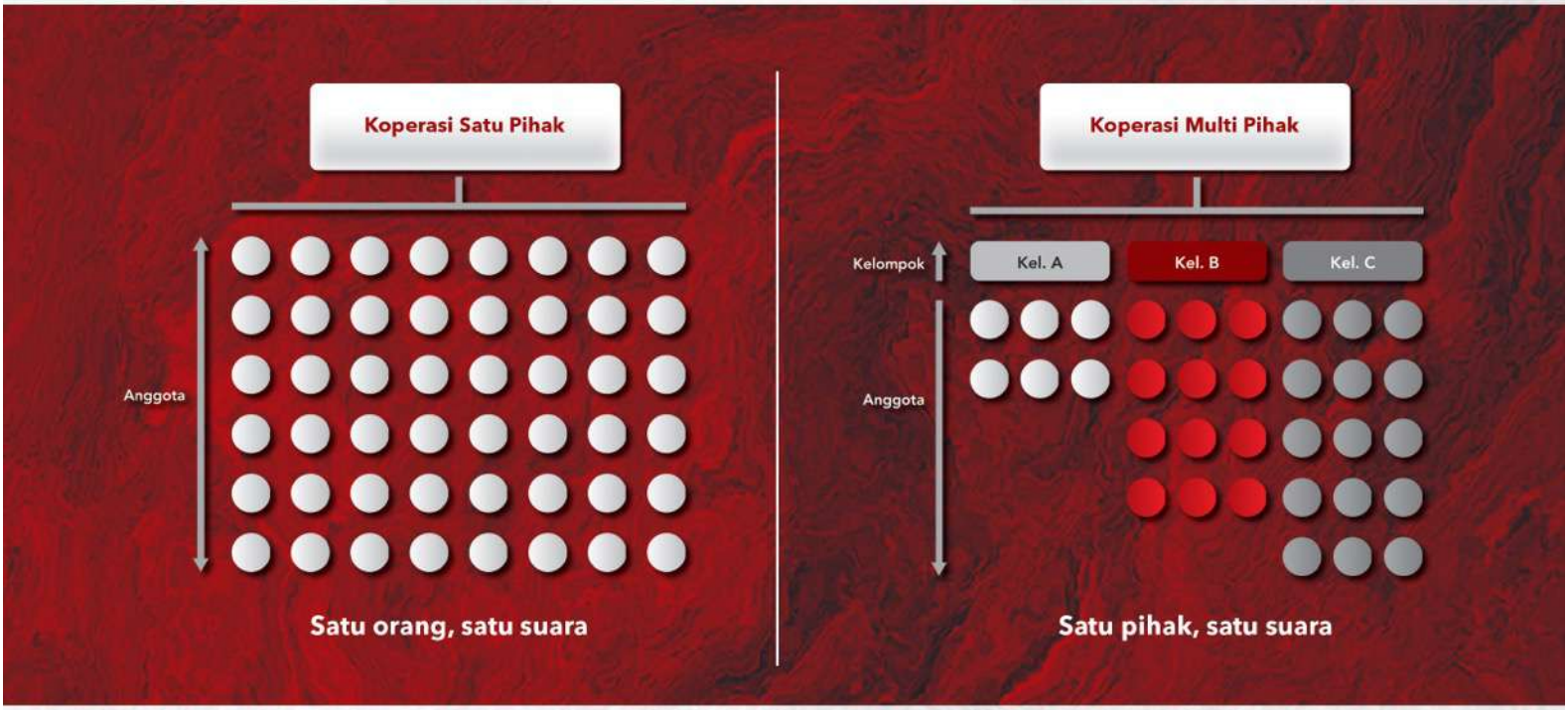
Terbitnya Permenkop 8 / 2021 tentang Koperasi Multi Pihak memungkinkan kita untuk masuk ke babak baru berkoperasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan pemilik modal tetapi juga menguntungkan semua pihak yang terlibat.



Perbandingan Tata Kelola



Tata Kelola Koperasi Multi Pihak



Strategi modernisasi koperasi Indonesia

Koperasi Kemarin

- Jumlahnya banyak
- Berdiri sendiri
- Kurang nilai tambah



Koperasi Modern

- Hulu hilir sektor riil
- Profesional
- Koefisien tumbuh tinggi

Sumber: Kementerian Koperasi, 2021

Tugas Kita:
Kembalikan Konstitusi Negara
Ke Naskah UUD 1945 Asli

Saya orang yang berpendapat bahwa masalah ekonomi negara tidak terlalu jauh berbeda dengan mengatur diri sendiri, mengatur rumah tangga, dan mengatur perusahaan.

Coba bayangkan kalau kita bekerja, tapi tidak jelas tabungan kita ada di mana? Kan kita jadinya tidak bisa apa-apa? Anda bekerja, umpamanya, tiap bulan. Anda digaji, tapi sebagian dari gaji Anda tidak boleh Anda gunakan, tidak boleh untuk menabung. Maka Anda tidak tidak bisa berbuat banyak.

Pasal 33 Undang-undang Dasar ’45 dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita untuk memastikan negara kita punya tabungan yang cukup untuk membangun.

Selama pasal 33 Undang-undang Dasar ’45 tidak kita patuhi, selama itu kekayaan kita akan terus mengalir ke luar negeri. Selama itu mata uang kita tidak akan kuat, dan selama itu ekonomi kita akan menjadi bancakan bangsa lain.

Ini yang harus kita ubah. Ini yang harus kita perbaiki. "Bumi, air dan semua kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Itu adalah perintah Undang-undang Dasar '45.

Namun, itu yang banyak elite Indonesia pura-pura tidak baca. Ada juga orang-orang pintar di Indonesia pura-pura tidak tahu tentang Undang-undang Dasar '45. Mereka mengatakan pasal 33 ini kuno, sudah kedaluwarsa, tidak penting. Sebagian juga mengatakan, "sekarang yang penting adalah persaingan bebas, pasar bebas, globalisasi". Semua serahkan ke pasar. Nanti, yang kaya sedikit, tapi dia akan meneteskan ke bawah kekayaannya. *Trickle down effect.* Netes, netes, netes.

Benar ada yang menetes, tapi mohon maaf, mungkin kita semua sudah mati baru sampai turun ke bawah.

Selain itu, kalau saya bicara UUD 1945 Pasal 33, seringkali saya diledek. Bahkan ada yang mengatakan, "Prabowo bahaya. Prabowo nanti akan nasionalisasi. Semua milik orang kaya akan diambil."

Anggapan tersebut tidak benar. Yang saya mau adalah, kita besarkan ekonomi kita, dan ekonomi dibagi lebih rata. Jangan 1% yang kuat menguasai semua. Jangan asing menguasai semua. Yang kuat, monggo, maju kamu. Negara angkat yang kurang kuat.

Prinsip saya adalah *live and let live*. Hidup dan jadikan orang lain hidup. Jangan *live for yourself*. Jangan *zero sum game*. Jangan *I win, you lose*.

Prinsip saya, saya menang, kamu juga menang. Kita menang. *Win-win*, itu yang saya mau, dan itu prinsip yang terkandung di UUD 1945 Pasal 33, Ayat 1 hingga Ayat 3.

Pasal 33 sangat jelas. Ayat 1. "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan".

Jadi, ini dasar. Kita tidak boleh punya pendapat yang kuat tambah kuat, yang tidak kuat terserah. Pendapat seperti itu bukan Pancasila, bukan cita-cita pendiri bangsa kita.

Sesuai Ayat 1, yang ekonominya kuat harus tarik yang lemah. Pemerintah harus jadi pelopor, bukan wasit.

Pemerintah harus di depan untuk menjaga kekayaan negara. Kalau rakyat masih miskin, pemerintah harus ikut bertanggung jawab untuk memperbaiki keadaan. Ini adalah perintah Undang-Undang Dasar '45.

Ayat 2, "Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara". Ini perintah konstitusi Republik Indonesia.

Ayat 3, "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Ini bukan maunya Prabowo, ini perintah Undang-undang Dasar kita.

Saat ini, elite Indonesia banyak meninggalkan nilai-nilai Undang-undang Dasar '45. Meninggalkan nilai-nilai Pancasila.

Pancasila dipakai di mulut, tetapi tidak dijalankan. Ini dimungkinkan oleh amandemen UUD 1945 yang telah menambahkan Ayat 4 dan Ayat 5 di Pasal 33. Ayat 4, "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi", yang sesungguhnya bertabrakan

dengan Ayat 1 hingga Ayat 3 karena menjadikan ekonomi Indonesia menjadi ekonomi bermazhab pasar bebas.

Karena itulah, saya percaya, kalau kita benar-benar ingin berjuang menuju negara sejahtera, kita harus lihat sumber penyakit kita apa, dan kita harus perbaiki sumber penyakit itu. *Root cause*, atau akar permasalahan ekonomi kita ada di Pasal 33 yang telah diganti dan tidak dijalankan sepenuh hati.

Untuk memperbaikinya, kita harus kembalikan konstitusi kita ke naskah aslinya, versi 18 Agustus 1945. Dengan demikian ekonomi Indonesia akan dikuasai oleh rakyat Indonesia, dan negara akan punya tabungan untuk membangun.

Dengan demikian, para pimpinan, para tokoh politik yang sekarang hadir di tengah rakyat, bisa berhenti jadi pemimpi. Bisa berhenti jadi 'pejuang akan'. Akan ini, akan itu, tapi tidak bisa berbuat banyak karena uangnya tidak ada. Kalau uangnya ada, akan ada banyak yang mereka bisa perbuat untuk Indonesia.

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33



Teks Awal, 18 Agustus 1945

Ayat 1:
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.

Ayat 2:
Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

Ayat 3:
Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tambahan 2 Ayat Saat Amandemen 11 Agustus 2002

Ayat 4:
Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

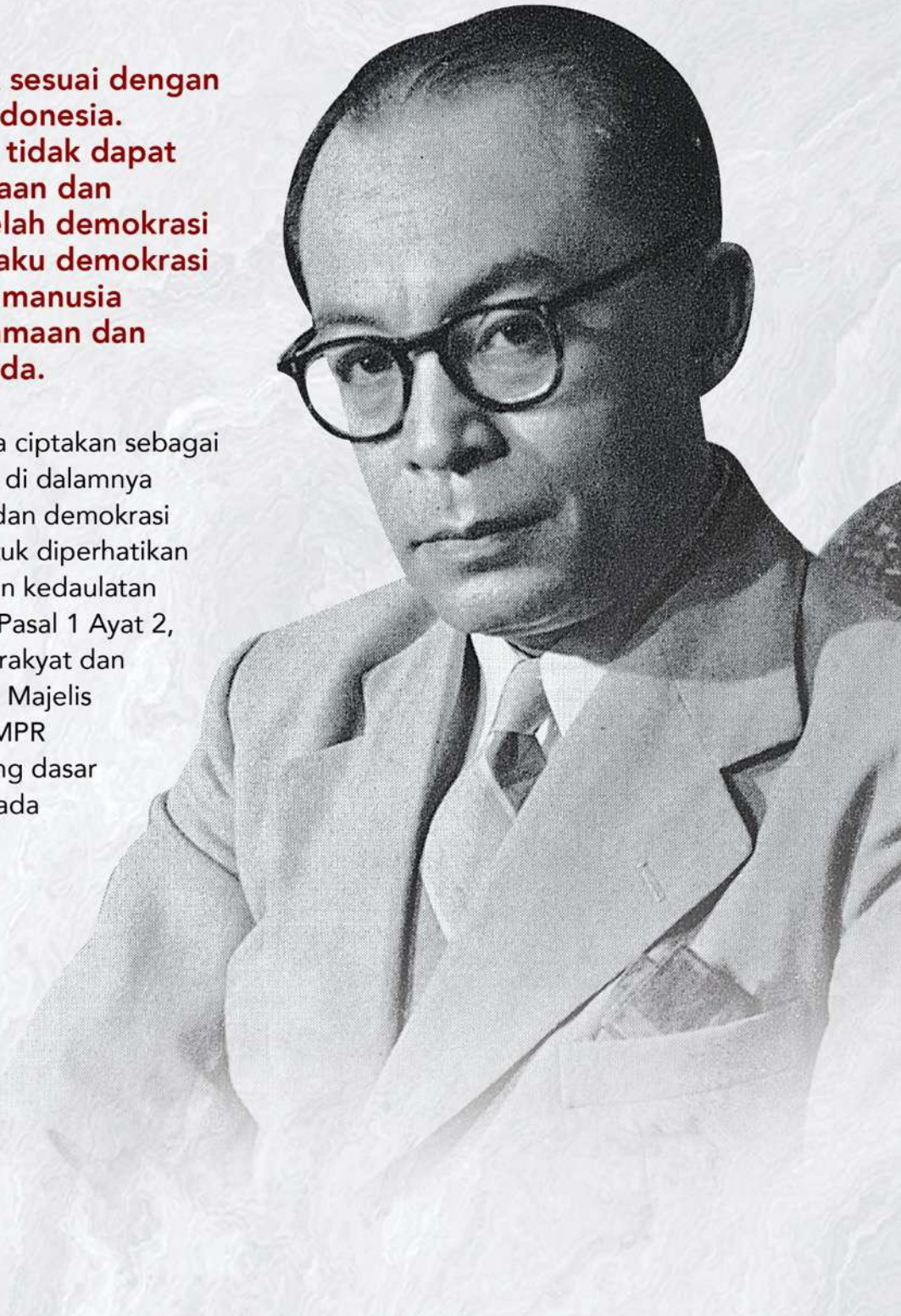
Ayat 5:
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Peringatan Bung Hatta Soal Demokrasi Indonesia

Demokrasi barat tidak sesuai dengan cita-cita perjuangan Indonesia. Demokrasi politik saja tidak dapat melaksanakan persamaan dan persaudaraan. Di sebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak, manusia belum merdeka, persamaan dan persaudaraan belum ada.

Kedaulatan rakyat yang kita ciptakan sebagai sendi negara mengandung di dalamnya cita-cita demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Yang penting untuk diperhatikan disini ialah cara menjalankan kedaulatan rakyat. Menurut UUD kita, Pasal 1 Ayat 2, 'Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR menetapkan undang-undang dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara."

Mohammad Hatta
'Demokrasi Kita'



Mewujudkan Demokrasi Rakyat

Celakalah kita jika kita tidak belajar dari sejarah. Sejarah dunia telah mengajarkan kepada kita, bahwa demokrasi hanya dapat dipertahankan jika pemimpin-pemimpin penganut demokrasi dapat membuktikan bahwa mereka memberikan pemerintahan yang sebaik-baiknya, pemerintahan yang sesuai dengan kehendak rakyat.

Kita Butuh Pendekar-Pendekar Penyelamat Demokrasi

Para pendahulu kita, para pemimpin kemerdekaan Indonesia menyetujui demokrasi sebagai dasar negara kita. Demokrasi artinya susunan pemerintah, dan kebijaksanaan pemerintah ditentukan oleh rakyat Indonesia sendiri.

Namun, saudara-saudara, demokrasi kita sekarang terancam. Demokrasi kita disandera. Demokrasi kita bisa diperkosa. Demokrasi kita sekarang bisa dirusak dengan politik uang.

Kita tidak usah berpura-pura. Kita tanya saja kepada mereka yang sudah punya pengalaman maju dalam suatu

pemilihan. Kalau mau maju jadi bupati, modal berapa puluh miliar? Kalau mau maju jadi wali kota, modal berapa puluh miliar? Kalau mau jadi gubernur, modal berapa ratus miliar yang harus dihabiskan?
Politik uang membahayakan demokrasi Indonesia. Ini berarti, mereka yang kuasai uang, mereka menguasai kedaulatan politik Indonesia.

Demokrasi kita inginkan. Demokrasi adalah sistem orang beradab. Tapi, demokrasi kalau diselewengkan, kalau dicurangi, kalau dipermainkan, ya, berarti tidak perlu lagi kita terlalu sopan. Tidak perlu lagi kita terlalu nrimo.

Kita harus yakin bahwa rakyat membutuhkan suatu gerakan yang berani, gerakan yang bersih, yang jujur, yang hatinya mulia untuk memperbaiki demokrasi kita. Gerakan untuk mewujudkan demokrasi rakyat. Gerakan yang cinta tanah air, yang ingin membuat bangsa Indonesia bangsa yang terhormat. Kita harus yakin itu harapan rakyat kita.

Namun sebagian besar rakyat kita tidak mampu bersuara. Kepada anda yang sekarang membaca buku ini, saya mengajak anda untuk bersama-sama kita harus jadi suara mereka.

Kita harus jadi hati mereka. Kita harus jadi pemimpin-pemimpin mereka. Kita harus jadi pelindung-pelindung mereka. Kita tidak boleh capai, tidak boleh lelah, tidak boleh surut hati kita, tidak boleh takut, tidak boleh gentar.

Kita harus percaya, apapun kesulitan yang kita hadapi, yang benar akan menang walau harus menunggu dan bersabar. Yang zalim akan selalu kalah. Itu pelajaran sejarah. Yang jahat selalu akan kalah pada ujungnya.

Kita harus yakin, dan Insya Allah kalau kita setia, kalau kita jujur, kalau kita bersih, kalau kita tetap berpegang kepada cita-cita negara kita, Insya Allah kita nanti bisa menjadi penyelamat masa depan bangsa Indonesia.

Berikut saya sampaikan, beberapa hal, dua tugas besar yang menurut saya wajib kita lakukan untuk mewujudkan demokrasi yang kita dambakan.

Pertama, kita harus pastikan supremasi hukum. Kedua, kita harus kejar dan tangkap koruptor.

Tugas Kita: Pastikan Supremasi Hukum

Kita tidak boleh menyerahkan demokrasi kita kepada preman-preman bayaran. Kita ingin kesejukan, untuk itu kita tidak boleh tinggal diam jika ada yang robek-robek hukum yang kita damba-dambakan.

Kita harus sampaikan kepada mereka-mereka yang merasa di atas hukum: "Kalau Anda robek-robek hukum, Anda harus menghadapi risiko yang Anda lakukan. Siapa yang menabur angin, dialah yang akan menuai badai, saudara-saudara sekalian."

Menyikapi ini, saya pernah tanya kader-kader Partai GERINDRA. Kamu takut atau tidak dengan preman-preman itu? Kalau ada kawan dalam berdemokrasi yang terancam, seluruh Indonesia terancam. Kalau ada sekutu dalam berdemokrasi yang tersentuh, seluruh Partai GERINDRA tersentuh.
Kita selalu ingin sejuk, kita selalu ingin damai, karena kita butuh keutuhan dan persatuan menghadapi keadaan yang tidak gampang. Tetapi, kita juga tidak boleh menjadi penakut. Kita tidak boleh menjadi kambing yang bisa disuruh-suruh, apalagi ditipu-tipu dan diperdaya.

Kita harus pada saatnya berani menegakkan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Jangan kita biarkan jika ada orang yang menambahkan hantu di daftar pemilih. Jangan kita tinggal diam saat melihat kotak suara dibuka di luar proses yang telah kita sepakati bersama. Kita harus bersuara saat melihat ketidakadilan.

Apalagi sekarang sudah ada Internet, sudah ada Facebook, Twitter, Instagram, dan media sosial lainnya. Kalau kita lihat ada pejuang yang tidak salah, tapi dikriminalisasi, kita harus bersuara, harus bela, walaupun media tidak meliput karena mungkin sudah dibeli oleh orang tertentu.

Tugas Kita: Kejar dan Tangkap Koruptor

Korupsi di Indonesia sudah kelewatan. Kalau yang bocor 5%, kita ini orang Indonesia. Maksudnya, kalau 5% bocor, "Biasa deh. Cingcay lah." Sepuluh persen bocor, "Sudah deh. Sama kawan 10% boleh." Lima belas persen bocor, "Ya sudah, deh." Dua puluh persen bocor, mungkin kadang masih bisa kita mengerti.

Sekarang ini, saya mencatat semakin banyak kasus yang bocornya 80%. Kalau ada proyek buat jembatan, seringkali

tidak ada gempa, roboh sendiri[33]. Kalau buat gedung, ada yang belum diresmikan jatuh sendiri[34].

Sejarah manusia, sejarah peradaban manusia mengajarkan kepada kita, setiap negara yang tidak mampu mengatasi korupsi di pemerintahannya, negara itu akan bubar.

Mohon saudara garisbawahi pernyataan saya ini. Catat apa yang saya tuliskan.

Kalau bangsa Indonesia tidak mampu mengurangi korupsi yang sudah merajalela, pasti bangsa ini akan gagal. Ini ajaran sejarah. Tidak usah kita ragukan lagi.

Dengan korupsi, semua aparat pemerintah akan rapuh. Dengan korupsi, tidak ada uang cukup untuk menyelenggarakan jasa-jasa kepada rakyat. Dengan korupsi, negara ini tidak punya cukup uang untuk membeli dan memproduksi pesawat terbang untuk angkatan udaranya. Tidak cukup anggaran untuk mengadakan kapal patroli untuk angkatan lautnya. Tidak bisa sediakan peluru untuk angkatan daratnya. Tidak mampu memberikan alat-alat yang diperlukan polisi-polisinya.

[33] Kasus robohnya jembatan Kutai Kartanegara, 2011
[34] Kasus ambruknya gedung Pemerintah Daerah Kota Depok, 2017

Kalau tentara, angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat, dan polisi lemah, kalau jaksa-jaksanya lemah dan maling, kalau hakim-hakimnya tidak kuat, negara ini bisa gagal. Kita sudah rasakan semua. Kita sudah rasakan semua apa yang kita hadapi sekarang.

Sebelum kita terkena pandemi COVID 19, pertumbuhan benar ada. Konsumsi kita, benar naik. Tetapi, semua ini rapuh. Saya bicara dengan beberapa ahli, kondisi bangsa kita sekarang sangat rentan.

Karena kekuatan kaum koruptor sangat kuat bercokol, perjuangan kita tidak ringan. Perjuangan kita berat. Semakin kita menguat di rakyat, semakin kita akan dihalangi, dan akan diterpa oleh mereka.

Kita tidak boleh mengizinkan kekayaan bangsa Indonesia dicuri terus-menerus. Dan, kita tidak boleh mengizinkan koruptor-koruptor untuk melanglang buana, untuk bergentayangan bebas.

Tidak! Kita harus dorong para penegak hukum kita untuk kejar mereka sampai ujung dunia.

Untuk memberantas korupsi di bumi Indonesia, kita juga harus memberi contoh. Harus *ing ngarso sung tulodo*, di depan memberi contoh. Bukan *ing ngarso entek-enteke*. Kita harus menyumbang sesuatu yang baik. Kita harus menyumbang politik yang bersih, politik yang menegakkan kebenaran dan keadilan. Jika orang lain belum bisa, kita harus bisa.

Kita harus *sabdo pandito ratu*. Ucapan kita harus bisa dipegang. Jangan jam dua tahu, jam empat tempe. Jangan bilang "iya", kalau maksudmu "tidak". Jangan memberi janji yang tidak bisa kamu penuhi, karena itu juga sesungguhnya termasuk korupsi.

Menunaikan Janji Kemerdekaan



Menjawab Tantangan Sejarah

Saudara-saudara,

Yang ingin saya lakukan adalah mendorong perubahan besar cara kita bernegara. Saya ingin menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia. Saya ingin membangun sistem ekonomi dan sistem politik yang kuat dan yang bersih, yang membela rakyat, dan yang membangun bangsa ini.

Saya ingin mencegah korupsi. Saya tidak ingin Republik kita menjadi republik maling. Saya tidak ingin Republik kita hancur karena uang rakyat dirampok oleh sekelompok orang yang tamak.

Tujuh puluh lima tahun lebih kita merdeka, kita bangun bangsa, tapi hari ini kita seperti jadi tamu di rumah kita sendiri. Sebentar lagi seratus tahun kita merdeka, rakyat kita tidak punya apa-apa. Tujuh puluh lima tahun lebih kita merdeka, negara kita tiap tahun harus pinjam uang. Negara kita seolah begitu miskin.

Saya percaya, kita sebagai bangsa mampu. Kita mampu dan kita harus, dan kita wajib menghapus kemiskinan di

Indonesia. Kita wajib memastikan "mimpi Indonesia" ada dan nyata.

Anak para petani harus bisa jadi profesor. Anak buruh harus bisa jadi jenderal. Anak nelayan harus bisa jadi orang kaya. Anak pedagang kaki lima harus jadi pemilik restoran. Itu cita-cita Republik Indonesia!

Anak orang miskin tidak boleh miskin terus-menerus. Untuk apa kita merdeka kalau kita membiarkan orang hidup miskin di Republik ini?

Mungkin ada analisis di dalam buku ini keliru. Mungkin ada pendapat saya yang disampaikan di dalam buku ini keliru. Saya siap disanggah. Saya siap dikoreksi.

Inti argumen saya, apakah salah rakyat Indonesia ingin berdiri di atas kaki sendiri? Apakah salah kita ingin punya mobil milik bangsa sendiri? Apakah salah kita ingin rakyat naik motor buatan dan milik Indonesia sendiri? Apakah salah?

Apakah bangsa kita tidak boleh punya harga diri? Salahkah kita kalau kita ingin rakyat Indonesia makan yang cukup,

supaya anaknya tidak lapar? Haruskah kita lihat anak-anak di ibu kota kita sendiri tidak bisa tidur karena lapar? Haruskah kita lihat rakyat kita, untuk cari makan tiap hari setengah mati? Dan, saat kita lihat dan sadar kekayaan kita terus mengalir ke luar, kita disuruh diam, dan kita disuruh baik?

Saudara-saudara sekalian, saya kira saya ambil kesimpulan bahwa kita merasakan kejanggalan-kejanggalan Indonesia. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa. Kita harus menyalahkan diri kita sendiri. Ini adalah tanggung jawab kita semua.

Karena itu, sekarang tantangannya adalah, beranikah kita mengoreksi diri kita sendiri? Beranikah kita mendidik rakyat kita, menyadarkan bahwa perlu ada perubahan di negara kita. Perlu ada perubahan, karena kalau tidak, kalau kita tidak bisa mengatasi dua masalah besar yang ada di buku ini, saya kira ujungnya adalah sesuatu yang tidak kita inginkan.

Pilihan dan Perjuangan Kita Sulit

Bagi saya, masuk ke politik ini adalah pengorbanan. Pengorbanan tenaga, waktu, dan perasaan. Tetapi jika tidak masuk ke politik, tidak mungkin saya bisa memperbaiki kehidupan rakyat banyak.

Ya, saya percaya tidak mungkin kita bisa wujudkan perbaikan kehidupan rakyat secara besar-besaran hanya dengan mengomel dan mengkritik. Tidak mungkin kita bisa memperbaiki bangsa hanya dengan menjadi pengamat. Tidak mungkin hanya dengan menghardik kita bisa melakukan perbaikan.

Sebagian dari saudara yang membaca buku ini mungkin sudah masuk ke politik, atau sekedar paham dan peduli politik nasional. Sebagian juga mungkin belum. Jika belum, saya ingin saudara renungkan hal berikut.

Ada kalanya dalam hidup kita harus memilih pilihan yang sulit. Apakah kita membela kebenaran, atau merestui ketidakbenaran?

Apakah kita berdiri tegak untuk membela keutuhan bangsa, kemandirian bangsa, dan nilai-nilai yang kita junjung

tinggi? Atau, kita menyerah kepada uang, kita menjual nilai-nilai kita, kita menjual diri kita, kita menjual kepribadian kita, kita menjual harga diri kita?

Pilihan-pilihan semacam ini sangat sulit.

Pada tahun ’45 pemimpin-pemimpin kita dihadapkan dengan pilihan semacam ini. Apakah menyatakan kemerdekaan, atau menunggu diberikan kemerdekaan oleh penjajah?

Mereka yang menghendaki menyatakan kemerdekaan, agar kemerdekaan kita bukan hadiah dari penjajah, memang mempertaruhkan nyawanya dalam risiko.

Pada 10 November 1945, rakyat Surabaya dan pemimpin-pemimpin di Surabaya juga dihadapkan pada pilihan yang susah. Menyerah pada ultimatum Inggris untuk angkat tangan dan menyerahkan senjata paling lambat tanggal 9 November, atau menghadapi serbuan dan serangan negara adidaya pada saat itu.

Kita bayangkan, bagaimana harga diri bangsa kita kalau waktu itu pemimpin-pemimpin di Surabaya dan rakyat di

Surabaya menyerah. Kalau Gubernur Suryo, Bung Tomo, dan semua pemimpin Jawa Timur dan Surabaya, tunduk kepada ultimatum asing, bagaimana harga diri kita sekarang?

Juga dalam krisis-krisis besar bangsa kita tahun '65, apakah pemimpin membela Pancasila, atau menyerah kepada ideologi yang tidak sesuai dengan bangsa kita, yaitu komunisme?

Demikian juga pada tahun '98. Pada era Reformasi, banyak pemimpin kita juga yang dihadapkan pada pilihan susah. Membela sistem yang kurang demokratis, atau berani membawa reformasi dan demokrasi?

Dalam perjalanan politik saya 15 tahun terakhir, saya membawa pesan yang kurang lebih sama dengan apa yang terkandung di dalam buku ini. Dalam perjalanan saya, banyak lawan saya yang selalu hendak mendiskreditkan saya.

Saya digambarkan sebagai seorang yang haus kekuasaan, yang nafsu untuk berkuasa. Dan, saya digambarkan sebagai

seorang yang suka menggunakan kekerasan, yang kejam, dan sebagainya.

Padahal, saya telah membuktikan setelah sekian belas tahun, bahwa saya selalu mengutamakan jalan damai.

Saya seorang mantan prajurit yang mengerti perang. Saya pernah melihat perang. Saya pernah melihat korban-korban perang. Komandan yang sangat saya hormati gugur di tangan saya karena ditembak musuh. Anak buah-anak buah saya yang terbaik gugur di sekitar saya, di medan perang.

Saya yang harus ke keluarga mereka, ke ibu-ibu mereka, ke istri mereka, ke orang tua mereka, untuk memberi tahu putranya gugur di bawah kepemimpinan saya. Karena itu, saya selalu ingin jalan damai.

Fitnah-fitnah yang mereka lontarkan sungguh sangat keji. Saya dituduh ingin menutup semua gereja di Republik Indonesia, padahal keluarga saya sebagian Kristen. Bahkan di sekitar saya, pengawal-pengawal saya, ajudan-ajudan saya, sekretaris saya, sebagian orang Nasrani.

Saya seorang mantan prajurit TNI. Sumpah saya membela seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras. Saya telah mempertaruhkan nyawa saya, dan banyak anak buah saya dari berbagai suku dan agama telah gugur di bawah komando saya.

Bagaimana bisa saya melanggar sumpah saya, dan melupakan pengorbanan anak buah saya?

Saya juga telah difitnah, seolah bahwa saya adalah anti etnis Tionghoa. Padahal saya selalu membela semua kelompok minoritas. Fitnah-fitnah itu adalah bagian yang keji dari politik.

Saya selalu minta kepada para sahabat dan pendukung saya untuk sabar dan tenang. Jangan menjadi marah. Kita harus semakin arif, semakin sabar. Dengan diam bukan kita menerima fitnah itu, tetapi kita perhitungkan dengan sebaik-baiknya.

Jangan kita balas kedengkian dengan kedengkian. Jangan kita balas kejahatan dengan kejahatan. Jangan kita balas fitnah dengan fitnah.

Dalam situasi seperti ini saya minta saudara-saudara terus, walaupun sabar, kita juga harus siap. Siap mental kita, siap tenaga kita, siap napas kita.

Saya minta saudara-saudara yang membaca buku ini, dalam keheningan malam nanti, renungkanlah pendapatmu, renungkanlah sikapmu, renungkanlah jawabanmu.

Saya bertanya, apakah kita akan bersama-sama membela kebenaran, atau kita menyerah kepada ketidakbenaran, kepada kecurangan, kepada kezaliman?

Dan, dalam hari-hari yang akan datang, setelah saudara merenung, saya mengajak saudara untuk mengambil langkah-langkah untuk menghadapi hari-hari yang akan datang.

Saya telah memilih berjuang di atas landasan konstitusional. Saya tidak mau menyerah kepada keadaan yang tidak benar dan tidak adil. Saya menilai yang dialami Indonesia sekarang ini sarat dengan campur tangan asing. Ada negara-negara tertentu yang ingin Indonesia lemah, yang ingin Indonesia hancur, yang ingin Indonesia miskin.

Saya punya bukti-bukti yang kuat tentang keterlibatan mereka. Sebagian bukti sejarah sudah saya paparkan di buku ini. Tetapi kita tetap harus tenang. Kita harus sabar, dan kita harus percaya pada kekuatan kita sendiri.

Kita Memimpin Dengan Dawuh Fatwa

Di Padepokan Garudayaksa, dan dimanapun saya mendapat kesempatan berbagi, setiap saya bertemu dengan siswa-siswi baru, saya mendapat semangat baru. Saya mendapat harapan baru. Saya menilai harapan rakyat akan masa depan yang lebih baik terletak di pundak mereka yang berjuang belajar dan berbagi dengan saya.

Harapan rakyat akan masa depan yang lebih baik juga terletak di pundak saudara yang telah membaca buku ini dengan seksama. Yang telah mempelajari data-data, angka-angka yang disajikan, dan arti dari data-data dan angka-angka tersebut. Yang memahami pentingnya menyebarkan informasi yang terkandung di buku ini ke sanak saudara, kerabat dan rakyat luas.

Jika dalam membaca buku saudara mendapatkan pelajaran-pelajaran yang berharga, ingatlah filosofi

pendekar. Ilmu yang dimiliki pendekar harus dipakai untuk membela yang lemah, membela yang tidak bisa membela dirinya sendiri.

Saudara harus turun gunung, harus turun dari menara gading. Harus berani memimpin rakyat. Memimpin dengan ilmu. Memimpin dengan dawuh fatwa. Karena, sesungguhnya saudara termasuk *the best and the brightest brains of the country.*

Carilah orang-orang yang hatinya merah putih. Hatinya Pancasila. Hatinya Indonesia terhormat, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Bangunkan jawara-jawara baru yang mau membela orang miskin, membela orang lemah.

Kita Tidak Boleh Tinggal Diam

Saudaraku, banyak dari apa yang saya katakan di sini memang pahit. Juga pahit kenyataan kita tidak bisa terlalu banyak berharap pada sebagian elite kita. Banyak elite Indonesia pintar bicara.

Saking pintarnya, banyak juga yang pintar bohong.

Saya masuk politik karena terpaksa. Minta ampun politik ini! Dari 15 orang yang saya temui di politik, 14 orang bicara kebohongan. Karena itu saya semangat mengetahui saudara-saudara yang membaca buku ini untuk mengetahui situasi dan kondisi bangsa kita yang sebenarnya.

Karena itu yang kita butuhkan sekarang adalah kebersamaan. Bekerja dengan bersatu. Bekerja dengan akal yang baik, akal yang sehat.

Untuk sukseskan demokrasi kita, orang-orang baik, para Pandawa, mereka-mereka yang ingin melakukan, membuat, dan membangun suatu *legacy*, suatu warisan yang baik bagi anak cucunya, harus berkumpul menjadi satu untuk menawarkan kepada rakyat, suatu alternatif pilihan.

Saudara yang membaca buku ini adalah bagian dari kaum intelektual. Kaum intelektual bangsa Indonesia harus menjadi kekuatan yang menentukan. Kekuatan yang damai, kekuatan yang memberi kesejukan, dan juga kekuatan yang tidak akan membiarkan ketidakadilan terus-menerus berjalan di Republik Indonesia.

Sekarang, kuncinya kembali kepada apa yang Edmund Burke pernah katakan. "*If everybody keeps quiet,*" kalau semua orang diam, yang akan memimpin dan berkuasa adalah orang-orang yang tidak baik.

Satyagraha, Landasan Perjuangan Kita

Saya butuh dukungan saudara-saudara. Saya butuh dukungan secara riil, secara konkret.

Mereka, para pemodal besar yang ingin menjajah tanah air, mengatakan: Indonesia gampang, banyak rakyat Indonesia bisa dibeli, banyak pemimpin Indonesia bisa disogok.

Negara kita saat ini ada pada kondisi yang kita tidak boleh seenaknya. Kita harus waspada. Kita harus saling mengingatkan. Kita harus saling mendukung. Sebagai bangsa yang besar, kita harus saling menjaga.

Untuk itu marilah kita bersatu. Kita harus bersatu.

Kita buktikan bahwa rakyat Indonesia masih punya cita-cita yang luhur, rakyat Indonesia masih punya harga diri, rakyat Indonesia tidak mau dibeli begitu saja. Rakyat

Indonesia tidak mau jadi kacung, rakyat Indonesia tidak mau menjadi budak. Rakyat Indonesia ingin menjadi rakyat yang terhormat.

Saudara-saudara sekalian yang membaca buku ini.

Katakanlah yang benar, benar. Dan, katakanlah yang salah, salah. Apakah benar kekayaan kita keluar tiap tahun dan kita harus menerima? Apakah benar rakyat kita ditakdirkan hanya menjadi kacung, rakyat kita hanya menjadi pelayan? Rakyat kita hanya boleh menjadi pasar? Rakyat kita hanya boleh mendapat upah murah?
Kalau saudara-saudara menilai kondisi ini benar, kita mau bilang apa?

Tapi, kalau saudara-saudara menilai ini tidak benar, dan mampu kita ubah, dan mampu kita amankan kekayaan kita, maka tidak ada jalan lain, saudara-saudara harus turun gunung. Harus memimpin rakyat.

Memimpin dengan ilmu, memimpin dengan hati, memimpin dengan anjuran, memimpin dengan pendidikan, memimpin dengan keberpihakan kepada bangsa sendiri.

Mari kita laksanakan perjuangan kita di atas landasan "satyagraha" yang telah diberi contoh di India oleh Mahatma Gandhi, dan di Amerika oleh Martin Luther King, dan di Afrika Selatan oleh Nelson Mandela.

Satyagraha artinya adalah perjuangan tanpa kekerasan, perjuangan tanpa henti yang berlandaskan pada kebenaran.

Percayalah kebenaran akan menang, kebenaran tidak bisa dikalahkan. Yang penting, kita harus berani, kita harus tegar, kita harus mau berkorban.

Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, Pak Dirman, Gubernur Suryo, dan I Gusti Ngurah Rai, dan semua pahlawan pendiri bangsa kita, telah mengajarkan bahwa kalau kita tidak menyerah, kalau kita berani, kalau kita tegar, kebenaran akan unggul. Kebenaran akan menang pada saatnya.

Kita harus siap menghadapi kesulitan. Kita harus siap menghadapi penderitaan.

Tapi, pilihannya apa? Kita menyerah seperti budak yang disuruh duduk, duduk? Disuruh berdiri, berdiri? Disuruh tunduk, tunduk? Disuruh diam, diam? Disuruh ambil air, ambil air? Atau, kita jadi bangsa yang terhormat, bangsa yang mengerti, membela haknya, membela hak-hak rakyat?

Saudara-saudara sekalian, kita harus percaya bahwa kekuatan kita besar. Sistem pertahanan kita adalah sistem pertahanan rakyat semesta, atau HANKAMRATA. Dengan sistem pertahanan rakyat semesta, kita pernah buktikan, kita berhasil melawan penjajah.

Kekuatan rakyat ini harus kita susun dan selalu kita rawat. Ya, dari orang ke orang, susunlah kekuatan. Lima orang demi lima orang, nanti sepuluh orang demi sepuluh orang. Adakan diskusi. Bahas isi buku ini di rumah masing-masing. Atur, dan pada saatnya saya akan umumkan bagaimana perjuangan kita.

Yang jelas, pilihannya hanya dua. Berdiri menghormat sebagai bangsa kesatria, atau tunduk selamanya sebagai bangsa kacung, bangsa budak, bangsa yang lemah,

bangsa yang bisa dibeli, bangsa yang bisa disogok.
Pilihannya ada di hati kita masing-masing.
Saya percaya, kita bisa, kita harus bisa melaksanakan suatu perombakan besar untuk bangsa kita.

Kita buktikan bahwa rakyat Indonesia masih ada yang punya cita-cita. Masih ada yang cinta tanah air. masih ada yang ingin Indonesia berdiri dengan terhormat, dengan pemimpin-pemimpin yang terhormat, yang berdiri diatas kaki kita sendiri. Bermartabat, kuat, adil, makmur. Itu cita-cita kita bersama.

Sadarkan dan kerahkan dukungan dari sekitarmu. Temui dan sadarkan keluargamu, kerabatmu, tetanggamu. Sadarkan dan yakinkan mereka. Jelaskan asas-asas dan fakta-fakta yang terkandung di dalam buku ini. Himbau mereka, gugah mereka untuk berpartisipasi aktif dalam demokrasi kita.

Beri tahu kepada rakyat bahwa bangsa kita tidak miskin. Beri tahu kepada rakyat, ada jawaban kepada masalah bangsa. Beri tahu kepada mereka, di buku ini ada keyakinan, ada pemahaman bagaimana mengatur ekonomi.

Dalam perjuanganmu, jangan pernah menghardik, jangan mencela orang lain, tapi percaya kepada diri kita sendiri, dan selalu bimbing rakyat. Beri tahu kepada mereka, yang benar itu benar, dan yang benar pada akhirnya akan menang.

Ingatlah, semakin kita berisi, semakin kita kuat, semakin kita tunduk, semakin kita merendahkan hati kita. Bukan rendah diri, tapi rendah hati. Semakin dihina, semakin sopan. Semakin difitnah, semakin kita tegak.

Tidak perlu kita balas kebencian dengan kebencian. Tidak boleh ada waktu untuk kebencian. Biarlah mereka yang jahat kita yakini akan dihukum oleh kekuatan yang lebih besar dari kita semua, kekuatan yang di atas.

Marilah kita percaya, kekuatan yang di bawah, kekuatan rakyat Indonesia, akan selalu akan mendukung yang benar.

Saudara-saudaraku, rakyat kita tidak bodoh. Rakyat kita berpikir dengan hati mereka. Mereka akan senantiasa mendukung kita, asal kita selalu membenahi diri, selalu

memperkuat akar kita ke rakyat, selalu menjadi sumber kebenaran, selalu menjadi pembela kebenaran, selalu memberi pemecahan masalah-masalah rakyat, dan jangan sekali-sekali menjadi sumber kerusakan.

Jangan juga kita tinggal diam mana kala kita melihat ketidakbenaran dan ketidakadilan. Dan, kalau kita lihat penindasan terhadap rakyat kecil, kita tidak boleh tinggal diam. Kita tidak boleh takut membela kaum yang lemah dan kaum yang tertinggal.

Kita juga tidak boleh berjuang hanya untuk mencari kursi jabatan. Kursi kekuasaan harus direbut dengan baik, dengan terhormat, dengan halal, dengan konstitusional, dengan demokratis, oleh orang-orang yang hatinya merah putih.

Inilah Inti Perjuangan Gerindra



Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, secara murni dan konsekuen.

AD ART Partai Gerindra, Pasal 11 Ayat 1

Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui ekonomi kerakyatan dengan bertumpu pada kekuatan bangsa, yang mengarah pada kedaulatan bangsa yang berdikari.

AD ART Partai Gerindra, Pasal 11 Ayat 5

Menghimpun dan membangun kekuatan politik rakyat untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang maju, modern, sejahtera, kuat dan berdaulat.

AD ART Partai Gerindra, Pasal 11 Ayat 6

Amanat Jenderal Sudirman



"Tunaikan sumpah dan tugas kewajiban sebagai prajurit Negara Republik Indonesia, yang sanggup menjamin keamanan dan keselamatan nusa dan bangsanya"

Panglima Besar Jenderal Sudirman

Ada 3 Golongan Manusia, yang Manakah Anda?

The Leaders

Mereka yang membuat hal-hal terjadi

The Followers

Mereka yang melihat hal-hal terjadi

The Apathethic

Mereka yang menanyakan bagaimana hal-hal bisa terjadi

Di Partai GERINDRA atau Tidak,
Kita Tetap Bergerak Berjuang Bersama

Saudaraku, banyak yang saya sampaikan di buku ini memang pahit. Karena itu, saya membangun Partai GERINDRA, suatu partai politik yang adalah partai massa, tapi dipimpin oleh kader-kader yang punya ideologi.

Ideologi apa? Ideologi GERINDRA adalah 17 Agustus 1945, Undang-undang Dasar '45, dan Pancasila sebagai jaminan kerukunan dan persatuan bangsa.

Partai GERINDRA berdiri untuk memberi harapan kepada rakyat kita. Partai GERINDRA berdiri untuk melarang usaha-usaha untuk membuat bangsa Indonesia terus miskin.

Partai GERINDRA memang didirikan begitu di luar akal, begitu cepat, dalam hanya beberapa minggu saja, tetapi bisa dapat kepercayaan begitu banyak rakyat. Saya percaya ini karena Partai GERINDRA memang ingin memberi suatu pilihan lain pada bangsa kita.

Jangan sampai bangsa dan negara, dan masyarakat yang kita cintai dibuat agar terus menjadi bangsa miskin. Bangsa pelayan, bangsa tukang sapu, bangsa kacung, bangsa

pinjam-pinjam, bangsa minta-minta. Bangsa yang tidak punya tabungan, bangsa yang anak mudanya tidak punya harapan.

Partai GERINDRA didirikan untuk jadikan Indonesia kembali milik rakyat Indonesia.

Partai GERINDRA menolak anggapan bahwa bangsa Indonesia bangsa yang miskin. Bangsa Indonesia bukan bangsa miskin. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kekayaannya mengalir terus ke luar negeri.

Saya menulis buku ini, dan saya berbicara di berbagai kesempatan untuk memberi pencerahan bukan untuk memberi janji palsu. Saya berdiri di panggung demokrasi, karena saya percaya kita harus kembali ke Pancasila, kembali ke Undang-undang Dasar '45.

Seperti yang sudah saya jelaskan di buku ini, saya percaya di dalam Undang-undang Dasar '45 itu sebetulnya letak daripada rumus kebangkitan bangsa Indonesia.

Benar yang dikatakan Bung Karno. Bangsa kita harus punya keberanian. Hanya rakyat yang berani mempertahankan

hartanya sendiri, kekayaannya sendiri, hanya rakyat itulah yang akan mendapat kemakmuran.

Jika saudara sudah menjadi anggota dari partai lain, atau tidak bisa berpartisipasi dalam politik karena masih aktif sebagai anggota TNI/POLRI, tidak apa. Mari kita bekerja keras saling bahu-membahu, saling isi-mengisi, saling membangun komunikasi. Saya percaya dan selalu katakan, Partai GERINDRA harus bersahabat dengan semua kekuatan merah putih di seluruh Indonesia. Saya percaya di semua partai banyak orang baik, orang baik yang berjiwa patriot dan cinta tanah air.
Kita harus galang komunikasi, bangun persahabatan, dan kita pada saatnya harus wujudkan suatu bukti yang nyata untuk rakyat kita.

Perjuangan kita tidak semata-semata cari kursi pemilihan. Kursi di dewan, kursi di kabupaten, kursi gubernur, kursi wali kota, kursi Menteri, kursi Presiden, itu semua penting, karena dengan kita mendapat kepercayaan di pemerintahan, baru kita bisa wujudkan cita-cita kita. Tapi, jangan fokus dan berpikiran hanya ke situ. Harus lebih dari itu.

Bersama atau tidak bersama Partai GERINDRA, kita semua yang hatinya merah putih harus menjadi kekuatan ekonomi dan kekuatan sosial. Kita harus hadir di kehidupan rakyat. Hadir di sawah-sawah. Hadir di lembah-lembah. Hadir di desa-desa. Hadir di daerah-daerah kumuh.

Kita harus bela orang-orang yang sedang susah. Kalau tidak bisa bantu banyak orang, bantu sedikit dulu. Kalau sedikit pun tidak bisa bantu, bantu satu orang.

Kalau satu orang pun kau tidak bisa bantu, minimal saudara didik rakyat sekitarmu, sadarkan mereka bahwa bangsa Indonesia harus kembali berdiri di atas kaki kita sendiri. Jangan mau kita jadi bangsa pesuruh. Jangan mau terus-menerus kita dipermalukan di mana-mana.

Sekaranglah saatnya saudara menjadi guru di tengah rakyat. Bangkitkanlah kesadaran rakyat bahwa Allah SWT tidak akan mengubah nasib suatu kaum, manakala kaum itu tidak mau mengubah nasibnya sendiri.

Saya minta, bagi saudara-saudara yang ingin berjuang bersama saya dalam memperjuangkan dan membela nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai membela Indonesia, nilai-nilai membangun Indonesia yang benar, yang baik, untuk anak

dan cucu kita. Bagi saudara-saudara yang ada di golongan ini, marilah terus kita berjuang dalam kekompakan dan kebersamaan. Marilah kita menilai, dari hari ke hari, apa pun yang kita lakukan harus selalu di atas landasan konstutitusi kita, tidak boleh menggunakan kekerasan.

Saya tidak tahu, dari semua yang membaca buku ini, berapa dari antara saudara yang mau berjuang bersama saya. Atau, bagi saudara yang hanya mau melihat dari pinggir, saya pun tidak masalah.

Terima kasih, saudara telah meluangkan waktu untuk membaca pikiran-pikiran saya. Jika setelah membaca buku ini saudara memutuskan untuk bergabung dengan perjuangan saya, saya ucapkan terima kasih atas bergabungnya saudara.

Percayalah, selama saudara memandang saya kawan, saya akan menjadi kawanmu. Saya akan berjuang bersamamu. Saya akan setia kepada saudara, karena saya yakin, saudara setia kepada rakyat Indonesia. Saudara setia kepada bangsa Indonesia dan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

Semoga Tuhan Maha Besar senantiasa merestui perjuangan kita, dan semoga kita selalu kuat, iman kita kuat, keyakinan kita kuat, keberanian kita kuat untuk cinta dan bela tanah air kita sehingga setidaknya cita-cita Para Pendiri Bangsa dapat terwujud di 100 tahun kemerdekaan Indonesia tahun 2045.

Jangan sekali-sekali kita lupa sejarah kita. Bahwa kita berasal dari bangsa yang berani. Bangsa yang tidak takluk dengan siapa pun. Bangsa yang punya kehormatan. Bangsa yang punya cita-cita. Bangsa yang ingin hidup seperti bangsa-bangsa lain.

Itu adalah perjuangan, impian dan tekad saya. Impian ini hanya bisa jadi kenyataan kalau kita atur haluan negara kita agar bisa mewujudkan dua fondasi utama pembangunan bangsa yang saya paparkan di buku ini.

Kita harus berani dan bisa mengamankan dan menyelamatkan kekayaan bangsa Indonesia. Kalau kita tidak berani dan tidak mampu menghentikan mengalirnya kekayaan kita ke luar negeri, negara kita tidak mungkin jadi negara sejahtera.

Kita harus berani dan bisa mewujudkan demokrasi yang benar-benar dari dan untuk rakyat, agar siapapun yang terpilih dalam proses demokrasi memiliki kemampuan membuat kebijakan-kebijakan terbaik untuk Indonesia.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera. Shalom. Om santi, santi, santi om.
Namo buddhaya.

Merdeka!

Prabowo Subianto

Kesimpulan:
Paradoks Indonesia dan Solusinya

TANTANGAN BANGSA & NEGARA KITA

Ekonomi untuk Pemodal Besar

- Kekayaan bangsa mengalir ke luar negeri (*net outflow of national wealth*)
- Yang menikmati ekonomi hanya 1% rakyat
- Kita terancam masuk perangkap negara menengah (*middle income trap*) atau selamanya tidak akan sejahtera

Demokrasi bisa Dikuasai Pemodal Besar

- Biaya demokrasi sangat mahal mengakibatkan marak politik uang

SOLUSI

Ekonomi untuk Rakyat Indonesia

- Penerapan UUD 1945 Pasal 33 secara konsekuen
- BUMN dan koperasi multi pihak jadi ujung tombak ekonomi
- Pertumbuhan ekonomi double digit didorong investasi di pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan, pengolahan dan industri strategis.

Demokrasi oleh dan untuk rakyat Indonesia

- Demokrasi sesuai UUD 1945 berasaskan musyarawarah mufakat



Indonesia merdeka untuk jadi negara yang kuat dan terhormat. Menjadi negara yang disegani karena rakyatnya hidup sejahtera, dan berkontribusi positif pada kehidupan bangsa-bangsa. Menjadi Macan Asia.

Saat ini, kurang dari 25 tahun menuju 100 tahun kemerdekaan Indonesia, kita belum mencapai, bahkan masih jauh dari taraf kesejahteraan dan gambar-gambar pembangunan yang sesuai dengan cita-cita para Pendiri Bangsa.

Namun saya percaya, dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang kita miliki seharusnya negara kita tidak hidup dalam ketimpangan dan kemiskinan. Kuncinya adalah pemahaman dan kemampuan segenap lapisan pimpinan negara dalam mengelola sumber daya yang kita miliki agar berjalan sesuai dengan pemahaman ekonomi para pendiri bangsa. Inilah tantangan sejarah bagi generasi kita.

Dengan buku ini, saya mengajak saudara untuk turut memahami kondisi negara kita, memahami dua tantangan terbesar kita dalam bernegara, dan turut ambil peran dalam perjuangan mewujudkan negara yang rakyatnya hidup sejahtera.

ISBN 978-602-51541-5-7

9 786025 154157